

**ANALISIS KUALITAS *SUSTAINABILITY REPORTING* BERDASARKAN
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) INDEX DAN
*ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) INDEX***

(Studi Komparatif Perbankan Syariah dengan Perusahaan terdaftar *Jakarta Islamic Index*)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

HASNITA

NIM: 10800112080

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasnita
NIM : 10800112080
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 19 Oktober 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Tamangapa Raya IV No. 202 Makassar
Judul : Analisis Kualitas *Sustainability Reporting* berdasarkan
Global Reporting Initiative (GRI) Index dan *Islamic Social Reporting (ISR) Index* (Studi Komparatif Perbankan Syariah dengan Perusahaan terdaftar *Jakarta Islamic Index*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, November 2016
Penyusun,

HASNITA
NIM: 10800112080



PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji penulis skripsi saudara **Hasnita**, NIM: 10800112080, Mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “*Analisis Kualitas Sustainability Reporting berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Index dan Islamic Social Reporting (ISR) Index (Studi Komparatif Perbankan Syariah dengan Perusahaan terdaftar Jakarta Islamic Index)*”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan telah mendapat persetujuan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, November 2016

Dewan Penguji dan Pembimbing

Penguji I : Andi Wawo, SE., Ak

(.....)

Penguji II : Hasbiullah, SE., M.Si

(.....)

Pembimbing I : Dr. Muh. Wahyuddin A., SE., M.Si., Ak

(.....)

Pembimbing II : Ahmad Efendi, SE., MM

(.....)

Diketahui Oleh
Dekan



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Analisis Kualitas Sustainability Reporting** berdasarkan **Global Reporting Initiative (GRI) Index dan Islamic Social Reporting (ISR) Index (Studi Komparatif Perbankan Syariah dengan Perusahaan terdaftar Jakarta Islamic Index)**”, yang disusun oleh **Hasnita**, NIM: **10800112080**, mahasiswa jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2016, bertepatan dengan 30 Shafar 1438 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Makassar, 30 November 2016

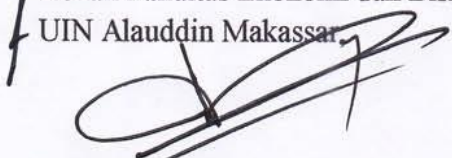
30 Shafar 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Memen Suwandi, SE., M.Si	(.....)
Penguji II	: Hasbiullah, SE., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh. Wahyuddin A., SE., M.Si, Ak	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad Efendi, SE., MM	(.....)

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata terindah yang peneliti patut ucapkan selain puji syukur yang sebesar-besarnya hanya kepada Allah *Subhanahu Wa ta'aala* yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, keselamatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada hamba-Nya. Atas perkenan-Nya juaah sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini, bukti dari perjuangan yang panjang dan jawaban atas do'a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam "*Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad*" juga peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sang pejuang sejati yang telah membawa obor kebenaran.

Skripsi dengan judul "*Analisis Kualitas Sustainability Reporting berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Index dan Islamic Social Reporting (ISR) Index (Studi Komparatif Perbankan Syariah dengan Perusahaan terdaftar Jakarta Islamic Index)*" peneliti hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selama penyusunan hingga terampungkannya skripsi ini tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak. Olehkarena itu perkenankanlah peneliti menghanturkan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya, terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hamka

dan Ibunda Nuraeni atas setiap kesabaran, luapan cinta, kasih, dan tetesan keringat serta kerja keras dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya begitu pula do'a yang tiada putus mereka panjatkan. Orang tua terhebat dan motivator terbesar peneliti dalam menyelesaikan studi. Serta adik-adikku tercinta, Accun, Uni, Anti dan Fadli atas pengertiaannya selama ini serta dukungannya baik moril maupun materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selama menempuh studi maupun dalam merampungkan dan menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari M. Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin Majid, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Memen Suwandi, S.E., M. Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, S.E., M.Si., Ak. sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Effendi, S.E., M.M. sebagai dosen pembimbing II yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan dan saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.

7. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta pelayanan yang layak selama peneliti melakukan studi.
8. Teman-teman seperjuangan dalam setiap pengurusan berkas sampai berlangsungnya satu per satu ujian menuju pemberian gelar sarjana, Lia, Ayu, Ainun, Ira, Kiki, Mirna, Irma, Ros, Hasma, Jhum, Lina, Alel, Rahma, Indah, Hikmah, Efhi, Emi, Uni, Niar, Rama, Ukhi, Mur dan yang lainnya, terima kasih atas segala bantuannya selama ini.
9. Teman-teman Akuntansi UIN Alauddin Makassar angkatan 2012 khususnya Akuntansi 5 6 7, Dian, Icha, Ainun, Ira, Islailia, Rahma, Sinta yang selama ini telah memberikan semangat kepada peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai, serta telah menemani peneliti selama menempuh studi.
10. Semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut memberikan bantuan dan dukungan secara tulus.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian skripsi ini. Akhir kata penulis memohon maaf dan terimakasih untuk semua yang telah hadir dalam kehidupan penulis dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Aamiin ya Allah.

Wassalamu' alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Makassar, November 2016

HASNITA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1-19
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN TEORETIS	20-46
A. Teori Komunikasi Aksi (<i>Theory of Communicative Action</i>)	20
B. Teori Stakeholder (<i>Stakeholder Theory</i>)	22
C. <i>Shariah Enterprise Theory</i>	26
D. <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Sustainability Reporting</i> dalam Islam	28
E. GRI dan ISR sebagai Pedoman <i>Sustainability Reporting</i>	32
F. Konvergensi ISR ke dalam GRI	37
G. Perbankan Syariah dan <i>Jakarta Islamic Index (JII)</i> sebagai Entitas Syariah	39
H. Kerangka Konseptual	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47-58
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Data	50
D. Metode Pengumpulan Data	51
E. Instrumen Penelitian	52
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
G. Pengujian Keabsahan Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59-109
A. Gambaran Umum Perusahaan	59
B. Perbandingan Kualitas <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan terdaftar JII berdasarkan Indeks ISR	67
C. Perbandingan Kualitas <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan terdaftar JII berdasarkan Indeks GRI	83
D. Perbandingan Kualitas <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan terdaftar JII berdasarkan Indeks ISR dan Indeks GRI	93
E. Analisa Konvergensi ISR Index ke dalam GRI Index	99
BAB V PENUTUP	110-111
A. Kesimpulan	110
B. Implikasi Penelitian	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model <i>Stakeholder</i> Mitchell, Agle and Wood	23
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual	46



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Perbandingan Rata-rata Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per-Kategori Indeks ISR	71
Grafik 4.2 Perbandingan Rata-rata Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per-Kategori Indeks GRI	86
Grafik 4.3 Perbandingan Skor Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII berdasarkan Indeks ISR dan Indeks GRI	94



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan <i>Stakeholder Theory</i> dengan <i>Syariah Enterprise Theory</i>	27
Tabel 3.1	Skala Penilaian Kualitas <i>Sustainability Reporting</i>	55
Tabel 3.2	Predikat Tingkat Kualitas <i>Sustainability Reporting</i>	56
Tabel 4.1	Perbandingan Total Skor Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII berdasarkan Indeks ISR	67
Tabel 4.2	Perbandingan Predikat Tingkat Kualitas <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII Berdasarkan Indeks ISR	68
Tabel 4.3	Perbandingan Persentase Total Skor Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per-Kategori berdasarkan Indeks ISR	70
Tabel 4.4	Perbandingan Predikat Tingkat Kualitas <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per Kategori berdasarkan Indeks ISR	82
Tabel 4.5	Perbandingan Total Skor Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII berdasarkan Indeks GRI	83
Tabel 4.6	Perbandingan Predikat Tingkat Kualitas <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII Berdasarkan Indeks GRI	84
Tabel 4.7	Perbandingan Persentase Total Skor Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per-Kategori Indeks GRI	86
Tabel 4.8	Perbandingan Predikat Tingkat Kualitas <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per Kategori berdasarkan Indeks GRI	92

Tabel 4.9	Perbandingan Skor Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII berdasarkan Indeks ISR dan Indeks GRI	93
Tabel 4.10	Perbandingan Skor Rata-rata Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per Kategori berdasarkan Indeks ISR dan Indeks GRI	96
Tabel 4.11	Item Konvergensi Indeks ISR ke Indeks GRI-G4 Kategori Ekonomi	101
Tabel 4.12	Item Konvergensi Indeks ISR ke Indeks GRI-G4 Kategori Sosial Sub-Kategori Tanggungjawab atas Produk	102
Tabel 4.13	Item Konvergensi Indeks ISR ke Indeks GRI-G4 Kategori Sosial Sub-Kategori Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja	103
Tabel 4.14	Item Konvergensi Indeks ISR ke Indeks GRI-G4 Kategori Sosial Sub-Kategori Masyarakat	105
Tabel 4.15	Item Konvergensi Indeks ISR ke Indeks GRI-G4 Kategori Lingkungan	106

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks ISR
- Lampiran 2 Hasil Skoring Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per Kategori Indeks ISR
- Lampiran 3 Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks GRI
- Lampiran 4 Hasil Skoring Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per Kategori Indeks GRI
- Lampiran 5 Manuskrip
- Lampiran 6 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama : Hasnita

NIM : 10800112080

Judul : Analisis Kualitas *Sustainability Reporting* berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI) Index* dan *Islamic Social Reporting (ISR) Index* (Studi Komparatif Perbankan Syariah dengan Perusahaan terdaftar *Jakarta Islamic Index*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan kualitas *sustainability reporting* antara perbankan syariah dan perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) berdasarkan indeks GRI dan indeks ISR. Setelah perbandingan dilakukan, tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konvergensi indeks ISR ke indeks GRI dalam membentuk *sustainability reporting* pada entitas syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan metode *scoring*. Sementara penilaian kualitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan skala yang dikembangkan dari skala nol sampai skala empat.

Hasil yang kemudian diperoleh dari penelitian ini ialah, bahwa kualitas *sustainability reporting* perbankan syariah berdasarkan indeks ISR lebih baik dibanding perusahaan dalam JII. Namun sebaliknya, berdasarkan indeks GRI, kualitas *sustainability reporting* perusahaan dalam JII lebih baik dibanding perbankan syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa, pengungkapan *sustainability reporting* kedua perusahaan berdasarkan indeks ISR lebih tinggi dibandingkan indeks GRI, dengan tingkat perbedaan yang sangat menonjol. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah, khususnya di Indonesia, mulai bergeser untuk menjalankan aktivitas sosial dari yang awalnya berdasarkan indeks GRI menuju indeks ISR yang notabene dirancang untuk unit bisnis syariah. Sehingga, konvergensi antara indeks ISR dan indeks GRI dapat dilakukan dengan menyempurnakan indeks GRI, tetapi tidak meninggalkan indeks ISR. Karena pada dasarnya, item-item pada indeks ISR tidak jauh berbeda dengan item pada indeks GRI kecuali untuk aspek syariahnya

Kata kunci : Sustainability Reporting, Indeks ISR, Indeks GRI, Perbankan Syariah, Perusahaan dalam JII, Konvergensi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah terkini yang dihadapi masyarakat dunia bukan lagi terfokus pada masalah ekonomi saja. Masyarakat kini mulai dihadapkan pada berbagai masalah sosial dan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidupnya. Hal ini terlihat dari semakin maraknya masalah krisis sosial dan lingkungan, seperti pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan sosial dan kemiskinan, semakin langkanya persediaan pangan akibat peningkatan konsumsi dan populasi, kerusakan alam akibat sistem pembangunan yang tidak ramah lingkungan, pencemaran air akibat limbah, polusi, kerusakan hutan, serta kerusakan lapisan ozon yang berakibat pada pemanasan global dan hujan asam sampai pada perubahan iklim, yang pada akhirnya akan menjalar pula menjadi krisis ekonomi yang terjadi di seluruh dunia (Agustia, 2010; Anugrah, 2011; Wibowo dan Sekar, 2014; Arta *et al.*, 2015; Marwati dan Yulianti, 2015; Anonim, 2016).

Serangkaian tragedi lingkungan dan kemanusiaan di berbagai belahan dunia pun tak henti-hentinya terdengar beberapa dekade terakhir ini (Susanto dan Josua, 2013). Beberapa bencana lingkungan yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia ini di antaranya, *Three Mile Island*, *Love Canal* di Bhopal (India), *Chernobyl* (Uni Sovyet), *Shell* (Nigeria), *Times Beach* (Missouri) sampai peracunan merkuri di Minamata (Jepang) (Sobur, 2005; Susanto dan Josua, 2013). Di Indonesia sendiri telah terjadi kasus-kasus seperti banjir lumpur panas Lapindo Brantas *Inc.* di Sidoarjo, Jawa Timur, pencemaran Teluk Buyat di Minahasa Selatan oleh PT

Newmont Minahasa Raya, masalah pemberdayaan masyarakat suku di wilayah pertambangan PT Freeport di Papua (Luthfia, 2012; Susanto dan Josua, 2013; Rufaida, 2014), pembakaran hutan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sumatra dan Kalimantan, serta konflik masyarakat Aceh dengan Exxon Mobil yang mengelola gas bumi di Arun (Rufaida, 2014). Adanya tragedi-tragedi lingkungan dan sosial ini pun telah diterangkan Allah SWT dalam QS Ar-Rum/30: 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ٤١

Terjemahnya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum: 41).

Ayat di atas telah jelas menerangkan bahwa segala kerusakan yang terjadi di dunia dan telah dirasakan akibatnya oleh manusia, disebabkan oleh manusia itu sendiri. Manusia dengan segala kepentingan dan keserakahannya, akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, termasuk dengan merusak alam. Dari sekian banyaknya bencana yang terjadi, perusahaanlah yang kemudian dicurigai (Maulida dan Helmy, 2012) dan dituduh sebagai pihak utama yang harus bertanggungjawab atas semua permasalahan ini. Penyediaan lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan dengan produknya, tidaklah sebanding dengan dampak negatif yang telah ditimbulkan perusahaan. Memang sulit dipercaya, bahwa dunia usaha baik di sektor publik maupun privat yang pada awalnya diharapkan sebagai

tumpuan hidup rakyat, ternyata telah menjadi biang keladi dari semua permasalahan ini (Dewi, 2010).

Perusahaan dengan tujuan utamanya untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya (Idah, 2013; Sharafina dan Esther, 2014; Arta *et al.*, 2015; Gunawan dan Sekar, 2015), akan melakukan eksploitasi sumber daya alam dan masyarakat secara tak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia (Cahyono, 2011; Gunawan dan Sekar, 2015) dalam rangka mencapai tujuannya tersebut. Reverte (2009) kemudian berkata bahwa, banyak perusahaan telah dikritik karena masalah dampak sosial dan lingkungannya. Tidak cukup dengan kritikan saja, berbagai perlawanan dan tuntutan dari berbagai pihak pun dilayangkan kepada perusahaan.

Perusahaan dengan strategi pertumbuhan bersamanya dalam teori ekonomi klasik, dengan ciri utamanya yaitu tamak, riba, dan harus serba hati-hati serta serba perhitungan (Schumacher, 1961 dalam Mardikanto 2014: 83) disertai konsep maksimalisasi labanya yang merupakan salah satu dari konsep yang dianut kaum kapitalis (Suartana, 2010) dirasa sudah tidak tepat lagi saat ini (Cahyono, 2011). Selain itu, kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan adanya tuntutan dari para *stakeholder* perusahaan yang ingin mengetahui lebih dari hanya sekedar kinerja keuangan perusahaan, namun ingin pula mengetahui mengenai kinerja non keuangan seperti lingkungan dan sosial (Burhan, 2009 dalam Natalia dan Josua, 2014). Pelaporan keuangan saja gagal dalam memenuhi kebutuhan informasi aktual, pengungkapan yang lebih tinggi dari informasi non-keuangan dituntut untuk menekankan suatu

tanggung jawab dan komitmen entitas untuk isu-isu sosial, lingkungan dan ekonomi (Meyer, 2011 dalam Turcu, 2015; Eccles, *et al.*, 2011; Lynch, *et al.*, 2014; Speziale and Klovien, 2014 dalam Turcu, 2015). Sudah tidak ada lagi ‘bisnis seperti biasa’, sistem ekonomi yang lama tidak lagi cocok untuk tujuan ini (Anonim, 2015). Sehingga, perlahan tapi pasti, paradigma ini harus digeser (Adjie, 2013). Hal ini menyiratkan bahwa, perusahaan telah menyadari bahwa memenuhi harapan *stakeholder* diperlukan sebagai syarat untuk keberlanjutan (*sustainability*) dan sebagai kebutuhan untuk mencapai tujuan bisnis strategis secara keseluruhan (Ballou, *et al.*, 2016).

Kini saatnya perusahaan menjalankan bisnis sambil mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan dampak positif terhadap masyarakat (Anonim, 2015). Perusahaan modern, sebagai aktor terkemuka dari perkembangan ekonomi dunia yang sebenarnya, harus menyesuaikan strategi dan struktur mereka untuk merespon tantangan global baru, termasuk permasalahan sosial dan lingkungan (Turcu, 2015). Menurut Garrigues and Trullenque (2008) dalam Ferrero, *et al.* (2013), saat ini perusahaan beroperasi di lingkungan di mana pelaksanaan tanggung jawab merupakan prasyarat untuk bersaing. Agar perusahaan dapat lebih bersaing, maka harus lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaannya, sehingga akan lebih membantu para pengambil keputusan dalam mengantisipasi kondisi yang semakin berubah (Nurdin dan Fani, 2006). Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebutlah yang kemudian mendorong terjadinya perubahan paradigma para pemegang saham, bahwa tujuan akhir organisasi bukan hanya berorientasi pada keuntungan belaka, namun juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan

(Elkington, 1997; Nanna, *et al.*, 2014). Hal ini pula lah yang mendorong munculnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penerapan program CSR di perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya dan akan menaikkan motivasi serta komitmen karyawan terhadap perusahaan (Epstein and Roy, 2001; Heal, 2005 dalam Susilowati, 2013), kinerja serta keuntungan yang lebih baik dan pertumbuhan yang meningkat (Schaltegger and Figge, 2000 dalam Susilowati, 2013) serta citra perusahaan akan semakin baik. Hal ini menjadikan CSR kemudian dipandang sebagai suatu bentuk investasi dan strategi korporasi yang akan berdampak terhadap kinerja sosial dan keuangan dalam jangka panjang (Heal and Garret, 2004 dalam Susilowati, 2013; Ghozali dan Anis, 2007; Sayekti dan Ludovicus, 2007; Nanna, *et al.*, 2014). Dengan demikian, aktivitas CSR ini akan menjadi jantung strategi dan sumber keunggulan bersaing yang sangat *powerful* bagi perusahaan (Porter, 1998 dalam Susilowati, 2013), yang telah terbukti menjadi alat yang efektif memotivasi keberhasilan banyak perusahaan nasional dan internasional (Arsad, *et al.*, 2014).

CSR sendiri memiliki beragam definisi dari sejumlah peneliti. Salah satunya datang dari Ahzar dan Rina (2013), yang mengatakan bahwa, CSR dapat didefinisikan sebagai segala upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif di setiap pilar. Informasi CSR ini dapat dilaporkan secara tersendiri ataupun terintegrasi dengan laporan tahunan perusahaan (*annual report*). Namun,

seiring dengan perkembangan waktu dan semakin beragamnya kebutuhan akan informasi, *stakeholder* menginginkan transparansi perusahaan yang lebih baik lagi (Sakina, *et al.*, 2014).

Perusahaan harus memiliki konsep keberlanjutan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Konsep keberlanjutan ini memerlukan kerangka global dengan bahasa yang konsisten dan dapat diukur dengan tujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami (Widianto, 2011; Fahriza, 2014). Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan *sustainability reporting* (laporan keberlanjutan) (Suryono dan Prastiwi, 2011; Widianto, 2011). Meskipun ada perdebatan mengenai istilah yang paling tepat untuk menggambarkan pelaporan organisasi pada isu-isu keberlanjutan ini, seperti istilah pelaporan *triple-bottom-line*, pelaporan tanggung jawab perusahaan, pelaporan lingkungan atau sosial, pelaporan non-keuangan dan pelaporan ekstra-keuangan, namun pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) adalah definisi terbaik (*Certified General Accountants Association of Canada/CGA-Canada*, 2005: 22).

Global Reporting Initiative/GRI (2014) dalam Thistlethwaite and Melissa (2016) kemudian mendefinisikan *sustainability reporting* sebagai sebuah laporan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari (yang) juga menyajikan nilai-nilai organisasi dan model tata kelola, serta menunjukkan hubungannya antara strategi dan komitmen untuk ekonomi global yang berkelanjutan. Meskipun dari definisi ini *sustainability reporting* dan CSR terlihat sama-sama merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan, sehingga

sulit dibedakan, namun keduanya tetap memiliki perbedaan (Soelistyoningrum, 2011; Wibowo dan Sekar, 2014).

Hal yang membedakan antara *sustainability reporting* dengan CSR ialah dalam hal pengungkapannya. Pengungkapan *sustainability reporting* lebih terperinci dan berdiri sendiri, sedangkan pengungkapan CSR terintegrasi dengan laporan tahunan perusahaan (Soelistyoningrum, 2011). Selain itu, pada indikator pengungkapannya, *sustainability reporting* dibagi menjadi tiga indikator pengungkapan yang meliputi kategori ekonomi, lingkungan dan sosial berupa praktek tenaga kerja dan pekerjaan layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk (GRI, 2013), sedangkan pada CSR hanya mencakup informasi tanggung jawab sosial lingkungan saja. Sehingga, penyampaian informasi CSR melalui *sustainability reporting* dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam mengukur dan menilai kinerjanya berdasarkan harapan dan persyaratan yang ada dalam masyarakat (Widianto, 2011).

Sustainability reporting kini kian menjadi tren global dan kebutuhan progresif bagi perusahaan (Chariri dan Firman, 2009; Rama, 2014). Meningkatnya tren *sustainability reporting* ini juga diikuti dengan meningkatnya pedoman-pedoman atau aturan yang disediakan oleh badan pemerintah dan badan industri (Sari, 2013). Tapi, seiring waktu, salah satu pedoman yang muncul sebagai kerangka dominan adalah *Global Reporting Initiative* (GRI) (Ching, *et al.*, 2013). Hal ini karena, secara luas, GRI dianggap sebagai pusat standar internasional terkemuka dalam pelaporan keberlanjutan (Thistlethwaite and Melissa, 2016) dan merupakan kerangka terbaik untuk mencapai standarisasi yang diperlukan (CGA-

Canada, 2005: 81). Daya tarik Pedoman GRI sebagai standar untuk pelaporan keberlanjutan sebagian besar disebabkan oleh pendekatan *multi-stakeholder* yang diadopsi dalam pengembangannya (CGA-Canada, 2005: 81). Sehingga, menjadikan pedoman GRI sebagai standar dan kerangka pelaporan keberlanjutan komprehensif yang paling banyak digunakan perusahaan di seluruh dunia sebagai acuan mengembangkan *sustainability reporting* (Daub, 2007; Burhan and Rahmati, 2012, Davys and Searcy, 2010 dalam Ching, *et al.*, 2013; GRI, 2013).

Pengungkapan *sustainability reporting* di Indonesia sendiri menurut Chariri dan Firman (2009), Soelistyoningrum (2011), Ruthinaya (2012), Fahriza (2014) dan Hasanah, *et al.* (2014) masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan tidak ada aturan baku yang mewajibkan (Utama, 2006). Padahal, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 74 ayat 3 menegaskan bahwa, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pengungkapan *sustainability reporting* di Indonesia yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) kini menjadi bersifat wajib (*mandatory*) dengan adanya UU No. 40 Tahun 2007 tersebut (Rahma, 2012; Fauziah dan Prabowo, 2013; Idah, 2013; Sharafina dan Esther, 2014; Maulida, 2014; Sakina, *et al.*, 2014; Horison dan Yeterina, 2014; Marwati dan Yulianti, 2015), yang sekaligus telah membantah pernyataan sebelumnya.

Awalnya praktik CSR hanya didominasi oleh perusahaan sektor pertambangan dan manufaktur, namun seiring dengan semakin trennya praktik

CSR, kini industri perbankan juga telah menuliskan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana, tidak terkecuali oleh perbankan syariah (Fitria dan Dwi, 2010). Sehingga dapat dikatakan bahwa, CSR kini tidak hanya berkembang pada ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang pada ekonomi syariah, yaitu lembaga bisnis ataupun perusahaan yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan konsep syariah (Widiawati, 2012; Khoirudin, 2013; Rama, 2014). Konsep CSR dalam Islam lebih ditekankan sebagai bentuk ketaqwaan umat manusia kepada Allah SWT dalam dimensi perusahaan (Rama, 2014). Sehingga bisnis syariah juga harus mengungkapkan semua informasi yang diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan operasional mereka (Rama, 2014).

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan CSR pada entitas syariah maka semakin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang ditetapkan (Baydun and Willet, 1997). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu acuan (*guideline*) untuk mengukur sejauh mana entitas syariah membuat laporan tanggung jawab sosialnya yang turut menyajikan aspek-aspek religi dalam laporan tahunan (Widiawati, 2012). Namun sejauh ini, pengungkapan CSR pada entitas syariah khususnya perbankan syariah masih mengacu kepada Indeks GRI (Haniffa, 2002).

Jika melihat prinsip atau pedoman GRI yang bersifat konvensional, maka kurang tepat bila digunakan sebagai tolok ukur pengungkapan CSR pada entitas syariah (Putra, 2014). Karena menurut Maulida, *et al.* (2014), perusahaan yang

diakui sebagai emiten syariah dan dinyatakan memenuhi syariat Islam seharusnya mengungkapkan informasi yang membuktikan perusahaan tersebut beroperasi sesuai hukum Islam. Sehingga, kini marak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting Index* (selanjutnya disebut indeks ISR) (Fitria dan Dwi, 2010).

Indeks ISR menurut Fitria dan Dwi (2010) merupakan tolok ukur pelaksanaan kinerja entitas syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam. Jika sebelumnya pengungkapan CSR menggunakan indeks GRI belum menggambarkan prinsip-prinsip Islam, seperti belum mengungkapkan terbebasnya dari unsur riba, gharar, dan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Islam, maka lain halnya dengan Indeks ISR, yang merupakan pengembangan pengungkapan tanggung jawab sosial yang di dalamnya sesuai prinsip syariah (Maulida, *et al.*, 2014). Maulida, *et al.* (2014) menambahkan, sesuai indeks ISR untuk entitas Islam karena selain mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam, juga mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti sodaqoh, waqof, qordul hasan, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan. Hal inilah yang kemudian memunculkan wacana konvergensi indeks ISR ke dalam indeks GRI (Fitria dan Dwi, 2010) agar lebih sesuai digunakan untuk entitas syariah.

Salah satu entitas syariah yang relevan dan seharusnya menggunakan Indeks ISR dalam pengungkapan aktivitas pertanggungjawaban sosialnya ialah perbankan

syariah. Sehingga saat ini telah banyak dilakukan penelitian tentang pengungkapan CSR pada perbankan syariah menggunakan Indeks ISR. Namun, disayangkan pula bahwa penelitian mengenai pelaksanaan ISR masih berorientasi di sektor perbankan syariah saja, sedangkan untuk sektor non perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, penelitian mengenai ISR belum banyak dilakukan sehingga kurang meluasnya konsep ISR terutama di Indonesia (Maulida, *et al.*, 2014). Lanjut Maulida, *et. al.* (2014), harusnya sebagai pelaku ekonomi syariah, emiten syariah juga harus melaporkan tanggung jawab sosial yang berbasis syariah. Selain itu, masih jarangya dilakukan penelitian dengan membandingkan pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan Indeks ISR dan Indeks GRI di perbankan syariah, serta belum adanya yang membandingkan kedua Indeks tersebut pada perbankan syariah dan non perbankan atau pasar modal syariah, yang dalam hal ini adalah *Jakarta Islamic Index* (JII), menjadi motivasi untuk melakukan penelitian ini.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini adalah laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) baik yang dilaporkan terpisah maupun yang terintegrasi dalam laporan tahunan (*annual report*) dari perbankan syariah dan perusahaan yang sahamnya masuk dalam JII. Adapun panduan pelaporan *sustainability reporting* yang digunakan pada penelitian mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh GRI versi terbaru, yaitu indeks GRI-G4 dan indeks ISR. Penelitian ini kemudian berfokus pada pengungkapan item-item dalam *sustainability reporting* perusahaan yang diteliti berdasarkan indeks GRI-G4 dan indeks ISR.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang beroperasi di Indonesia dalam kurun waktu bulan Juli hingga Agustus 2016. Penelitian ini bukan merupakan kajian secara mendalam, tetapi dilakukan dengan maksud untuk menggeneralisasi objek yang diteliti. Adapun objek dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis perusahaan, yaitu yang berasal dari perbankan syariah dan perusahaan yang sahamnya masuk dalam JII.

Dipilihnya perusahaan dalam sektor perbankan syariah dalam penelitian ini dengan alasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Dusuki and Humayon (2005), bahwa pada perbankan syariah tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor berikut: perbankan syariah sebagai perbankan yang berlandaskan syariah, meminta mereka untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Selain itu adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah, serta prinsip atas kepentingan umum, yang terdiri dari penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan. Oleh karena itu, pengukuran sejauh mana tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia sangat relevan dengan penggunaan indeks ISR (Susilowati, 2013; Putra, 2014) dibanding menggunakan indeks GRI.

Alasan selanjutnya dalam pemilihan perusahaan yang sahamnya masuk dalam JII ialah bahwa, perusahaan dalam JII merupakan salah satu bentuk entitas syariah yang berada di luar sektor perbankan syariah. Di mana perusahaan dalam JII termasuk dalam perusahaan yang mencatatkan sahamnya pada pasar modal syariah yang sedang mengalami pertumbuhan. Sehingga, seharusnya sebagai pelaku ekonomi syariah, emiten syariah juga harus melaporkan tanggung jawab

sosial yang berbasis syariah (Maulida, *et al.*, 2014), yang dalam hal ini akan relevan pula jika pengungkapannya diukur dengan menggunakan indeks ISR.

C. Rumusan Masalah

Penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan indeks ISR yang selama ini dilakukan lebih berorientasi di sektor perbankan syariah saja, sedangkan untuk sektor non perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, belum banyak dilakukan. Padahal, indeks ISR yang digunakan untuk menilai pengungkapan CSR dalam bentuk *sustainability reporting* di lembaga syariah di Indonesia sampai saat ini belum ada yang baku, dengan demikian sulit untuk mengukur konsistensi hasil temuan peneliti terkait pengungkapan CSR oleh lembaga syariah di Indonesia (Susilowati, 2013). Penelitian yang dilakukan selama ini pun hanya membandingkan indeks GRI dan ISR pada pengungkapan CSR antar perbankan syariah, antara perbankan syariah dan konvensional serta antara perusahaan yang terdaftar dalam JII dan non JII.

Sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang membandingkan kedua Indeks tersebut pada perbankan syariah dan non perbankan, khususnya perusahaan yang terdaftar dalam JII sebagai bagian dari pasar modal syariah. Sebagaimana diketahui bahwa, perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya diyakini telah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga relevan menggunakan indeks ISR. Sementara, perusahaan yang terdaftar dalam JII, yang diketahui tidak melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, namun telah memenuhi syarat untuk mencatatkan sahamnya pada pasar modal syariah, karena usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, belum tentu melakukan pengungkapan CSR

yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, dapat diyakini bahwa, lembaga bisnis atau perusahaan yang sahamnya telah masuk dalam JII tentunya dalam melakukan pengungkapan CSR yang tertuang dalam bentuk *sustainability reporting* akan lebih sesuai dengan perspektif Islam (prinsip syariah) daripada yang tidak terdaftar dalam JII, sehingga akan relevan pula jika menggunakan indeks ISR.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, maka rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas *sustainability reporting* perbankan syariah dan perusahaan terdaftar JII berdasarkan indeks ISR ?
2. Bagaimana kualitas *sustainability reporting* perbankan syariah dan perusahaan terdaftar JII berdasarkan indeks GRI ?
3. Bagaimana kualitas *sustainability reporting* perbankan syariah dan perusahaan terdaftar JII berdasarkan indeks ISR dan indeks GRI ?
4. Bagaimana konvergensi indeks ISR ke indeks GRI membentuk *sustainability reporting* pada entitas syariah ?

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti mengenai pengungkapan CSR yang disajikan dalam *sustainability reporting* ataupun *annual reporting* pada perusahaan industri, pertambangan dan perbankan (syariah dan konvensional), namun sangat sedikit pada pasar modal, terlebih pasar modal syariah. Penelitian terdahulu terkait pengungkapan CSR yang diukur dengan indeks ISR yang diperbandingkan dengan indeks GRI pun belum banyak dilakukan, namun

penelitian ini mencoba mengambil referensi dari berbagai penelitian terdahulu terkait pengungkapan CSR yang diukur baik dengan indeks ISR maupun indeks GRI dan implikasinya terhadap kualitas *sustainability reporting*.

Adapun penelitian pertama datang dari Fitria dan Dwi (2010), dengan judul “Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative* Indeks dan *Islamic Social Reporting* Indeks”. Penelitian ini menggunakan sampel yang berasal dari tiga bank umum syariah dan tiga bank konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bank konvensional memiliki pengungkapan yang lebih baik dibandingkan bank syariah dan bahwa pengungkapan berdasarkan indeks GRI memiliki skor yang lebih baik dibandingkan indeks ISR.

Sofyani dan Anggar (2012) hadir dengan penelitiannya yang berjudul “Perbankan Syariah dan Tanggung jawab Sosial: Sebuah Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan *Islamic Social Reporting Index* dan *Global Reporting Initiative Index*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja sosial secara keseluruhan rata-rata perbankan syariah di Malaysia lebih tinggi dari Indonesia. Selain itu, ditemukan pula bahwa kinerja sosial perbankan syariah berdasarkan indeks ISR lebih tinggi dibandingkan indeks GRI.

Penelitian selanjutnya datang dari Susilowati (2013) dengan judul “Analisis Komparasi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berdasarkan *Islamic Social Reporting* (ISR) Index dan *Global Reporting Initiative* (GRI) Index”. Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan CSR Index (CSRI) berdasarkan pada indeks ISR untuk perusahaan JII dan indeks GRI untuk perusahaan non JII.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang sahamnya masuk dalam JII, kinerja pengungkapan CSR menurut ISR masih jauh dari sempurna, sementara yang menggunakan indeks GRI, penerapannya sudah merata hampir di semua sektor. Selain itu, pengungkapan informasi CSR oleh perusahaan non JII menggunakan GRI Indeks memperoleh *score* lebih tinggi dibandingkan dengan *score* perusahaan JII yang menggunakan ISR Indeks.

Harun, *et al.* (2013) kemudian melakukan penelitian dengan judul “*Measuring The Quality of Sustainability Disclosure in Malaysian Commercial Banks*”. Penelitian menggunakan indeks GRI sebagai pedoman dalam mengukur tingkat kinerja keberlanjutan pada 15 bank komersial di Malaysia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak semua bank mengungkapkan informasi yang mencerminkan kinerja keberlanjutannya. Praktik pengungkapan *sustainability* yang masih sukarela, menjadi salah satu alasan utama rendahnya tingkat pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Hal ini karena perusahaan mungkin berpikir bahwa dengan mencapai tingkat keberlanjutan yang tinggi tidak memberi keuntungan yang signifikan terhadap bank-bank mereka.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui kualitas *sustainability reporting* perbankan syariah dan perusahaan terdaftar JII berdasarkan indeks ISR.

- b. Untuk mengetahui kualitas *sustainability reporting* perbankan syariah dan perusahaan terdaftar JII berdasarkan indeks GRI.
- c. Untuk mengetahui kualitas *sustainability reporting* perbankan syariah dan perusahaan terdaftar JII berdasarkan indeks ISR dan indeks GRI.
- d. Untuk mengetahui konvergensi indeks ISR ke indeks GRI membentuk *sustainability reporting* pada entitas syariah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dengan melaksanakan penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam pengembangan pengetahuan akuntansi khususnya dalam hal pengungkapan CSR entitas syariah yang terefleksi dalam *sustainability reporting* perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pengembangan item-item dalam indeks GRI versi terbaru, lanjutan versi 4 (GRI-G4) jika ada, dengan memasukkan item-item khusus untuk entitas syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang terefleksi dalam item-item ISR. Sehingga diharapkan dapat menarik minat investasi dari para investor muslim untuk berinvestasi dalam entitas syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi praktisi khususnya manajemen perusahaan utamanya bagi entitas syariah, baik yang akan ataupun telah membuat *sustainability reportingnya*, agar

dalam pelaksanaan aktivitas CSR sampai pada pembuatan dan pengungkapan *sustainability reportingnya* tidak bertentangan bahkan dapat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dalam pengungkapan *sustainability reportingnya* diharapkan tidak hanya berpedoman pada indeks GRI tetapi juga dapat berpedoman pada indeks ISR. Terkhusus bagi perbankan syariah, sangat diharapkan agar dalam pengungkapan *sustainability reportingnya* lebih atau hanya berpedoman pada indeks ISR, dibanding dengan indeks GRI. Hal ini karena, mengingat keterbatasan dari indeks GRI yang tidak memiliki item-item untuk mengungkap aktivitas-aktivitas syariah yang dilakukan perusahaan.

Selain itu, bagi pengguna *sustainability reporting*, dalam hal ini ialah pihak investor khususnya investor muslim, dapat lebih percaya pada aktivitas CSR yang tertuang dalam *sustainability reporting* perusahaan. Bahwa perusahaan telah melakukan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah, serta perusahaan tidak hanya melaksanakan tanggungjawabnya secara horizontal kepada alam dan masyarakat, melainkan juga telah melaksanakan tanggungjawabnya secara vertikal, yaitu kepada Allah SWT. Hal ini karena, perusahaan dalam pengungkapan *sustainability reportingnya* telah menggunakan indeks ISR sebagai pedomannya.

c. Manfaat Regulasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Keuangan khususnya Bapepam-LK selaku badan yang mengatur perdagangan di pasar modal, termasuk pasar modal syariah, agar dalam pembuatan kebijakannya memasukkan pengungkapan aktivitas CSR baik yang disajikan dalam *sustainability reporting*

maupun *annual report* perusahaan dengan berpedoman pada indeks ISR sebagai salah satu syarat dalam Penerbitan Efek Syariah. Sehingga, penelitian ini diharapkan akan mampu menyempurnakan Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, dengan memasukkan pengungkapan aktivitas CSR dalam *sustainability reporting* atau laporan tahunan perusahaan dengan berpedoman pada indeks ISR sebagai salah satu syarat dalam Penerbitan Efek Syariah. Sehingga, diharapkan dengan hal tersebut akan menambah keyakinan dan minat investor muslim untuk berinvestasi pada perusahaan yang berada dalam pasar modal syariah.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Komunikasi Aksi (*Theory of Communicative Action*)

Teori komunikasi aksi pertama kali diperkenalkan oleh Habermas dalam bukunya yang berjudul *The Theory of Communicative Action* tahun 1983. Teori komunikasi aksi merupakan teori yang memandang masyarakat melalui paradigma komunikasi (Meutia, 2010 dalam Purwitasari dan Anis, 2011). Teori komunikasi aksi sering digunakan untuk menganalisis interaksi sosial melalui pemisahan dua interaksi mendasar, yaitu: (1) interaksi yang memenuhi kebutuhan alami atau kebutuhan dasar, dengan kata lain interaksi yang berdasarkan kebutuhan sosial (*lifeworld*); dan (2) interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem (*system mechanism*). *Lifeworld* merupakan suatu situasi bertemunya individu dengan individu yang lain dalam melakukan hubungan timbal balik atas *claim* yang diberikan masing-masing individu, yang dapat mengkritisi dan mengkonfirmasi *claim* tersebut, serta menyelesaikan perbedaan pendapat hingga mencapai adanya kesepakatan (Habermas, 1983 dalam Budiani dan Anis, 2011). Oleh karena itu, segala sesuatu kehidupan atau aktivitas manusia dapat dilihat sebagai suatu interaksi yang mengikuti mekanisme *lifeworld*.

Sawarjuwono (2005: 97) kemudian menyebutkan bahwa, interaksi sosial yang termasuk dalam konsep *lifeworld* adalah aktivitas sosial yang dilakukan tanpa adanya unsur keterpaksaan dan terjadi dalam suasana *communicative action*. Sementara itu, interaksi sosial yang termasuk dalam konsep *system mechanism*, adalah aktivitas sosial yang dilakukan karena adanya unsur keterpaksaan dan terjadi

tidak dalam suasana *communicative action*, yang terutama dipengaruhi oleh *steering* media, yaitu *money* (pertimbangan ekonomis/untung dan rugi) dan *power* (tekanan intitusi dan birokrasi). Kedua media ini mempengaruhi interaksi sosial dalam berbagai bentuk (Purwitasari dan Anis, 2011). Pengaruh *money* dan *power* tersebut mendorong perusahaan untuk tetap berupaya menciptakan *image* positif dan menghindari *image* negatif, yang dapat berujung pada pemerolehan legitimasi dari *stakeholder* (Budiani dan Anis, 2011).

Sesuai dengan pandangan paradigma bahasa Habermas, Dewi, *et al.* (2011) melihat bahwa suatu perusahaan tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan *stakeholders* serta masyarakat. Salah satu cara perusahaan melakukan interaksi sosial adalah dengan menerbitkan laporan tahunan dan *sustainability report* yang merupakan produk dari praktik CSR. Jika ditinjau dari pandangan *legitimacy theory*, terlihat bahwa interaksi sosial yang terjadi antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya adalah karena adanya unsur keterpaksaan yang dipengaruhi *system mechanism*. *Sustainability reporting* dalam bingkai *legitimacy theory* dilakukan semata-mata untuk menaati peraturan, untuk mencapai keunggulan kompetitif, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman, untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, serta untuk menarik investor (Basamalah and Johnny, 2005 dalam Sayekti dan Ludovicus, 2007). *Legitimacy theory* juga memprediksi bahwa perusahaan akan melakukan tindakan apapun yang dipandang perlu dalam rangka mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan yang *legitimate* (Villiers and Staden, 2006 dalam Dewi, *et al.*, 2011).

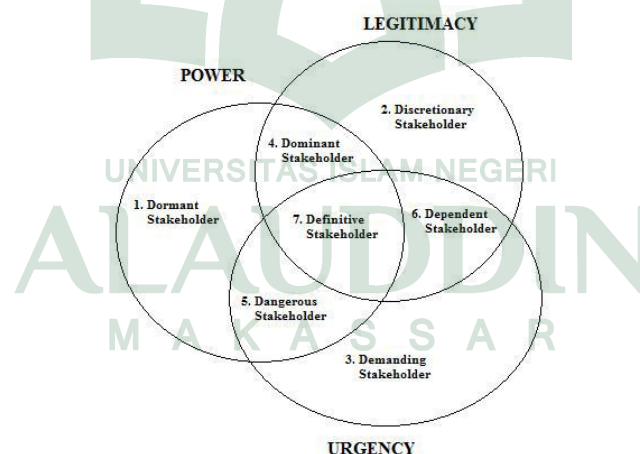
Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan dengan menggunakan *legitimacy theory* sebagai alat analisis, hanya melihat bahwa pelaporan informasi CSR yang dilakukan perusahaan semata-mata sebagai *legitimising process* (Dewi, *et al.*, 2011). Hal ini mengindikasikan bahwa realitas “*sustainability*” yang terefleksi dalam praktik *sustainability reporting* hanyalah digunakan perusahaan sebagai sarana mengalihkan perhatian masyarakat terhadap dampak negatif yang timbul dari aktivitas bisnisnya. Penggunaan *legitimacy theory* dalam penelitian akuntansi, akan lebih merefleksikan peran manusia sebagai makhluk individu yang memiliki sifat egois sebagai basis bertumbuhnya nilai-nilai kapitalistik dan cenderung melupakan peran manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat altruistik (Dewi, *et al.*, 2011). Berbeda halnya dalam perspektif Habermas, realitas “*sustainability*” yang terefleksi dalam praktik *sustainability reporting* dapat dilihat secara lebih holistik (menyeluruh). Menurut pandangan Habermas, interaksi sosial yang terjadi antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya, tidaklah hanya terbatas pada konsep *system mechanism* saja, melainkan juga termasuk dalam konsep *lifeworld* (Dewi, *et al.*, 2011). Sehingga, penggunaan teori komunikasi aksi Habermas dalam penelitian akuntansi akan dapat merefleksikan peran manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial sebagai basis bertumbuhnya nilai-nilai humanis (Purwitasari dan Anis, 2011).

B. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Stakeholder theory adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 2001 dalam Ratnasari dan Andri, 2011). *Stakeholder* sendiri didefinisikan oleh Clarkson (1995) sebagai orang atau

kelompok yang memiliki klaim, kepemilikan, hak dan kepentingan dalam suatu perusahaan dan terlibat dalam aktivitas perusahaan pada masa lalu, aktivitas perusahaan pada masa kini dan masa yang akan datang. Dapat dikatakan pula bahwa, *stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan (Freeman, 1984; dalam Widiyastuti dan Anis, 2012; Arifiyanto, 2013; Rahayu dan Tjiptohadi, 2015).

Mitchell, Bradley and Donna (1997) kemudian mengelompokkan *stakeholder* berdasarkan tipe kemampuan mempengaruhi suatu organisasi atau perusahaan, yang didasarkan pada tiga atribut, yaitu atribut kekuatan, atribut legitimasi dan atribut urgensi. Adapun Model pengelompokan *stakeholder* tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1. Model Stakeholder Mitchell, Agle and Wood
Sumber Model Stakeholder Mitchell, Bradley and Donna (1997)

Pengelompokan *stakeholder* berdasarkan atribut *power*, *legitimacy* dan *urgency* yang digambarkan oleh Mitchell, Bradley and Donna (1997) pada gambar 2.1, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. *Dormant stakeholder*, yaitu *stakeholder*

yang hanya memiliki kekuatan namun tidak memiliki legitimasi dan urgensi, 2. *Discretionary stakeholder*, yaitu *stakeholder* yang hanya memiliki legitimasi namun tidak memiliki kekuatan dan urgensi, 3. *Demanding stakeholder*, yaitu *stakeholder* yang hanya memiliki urgensi namun tidak memiliki kekuatan dan legitimasi, 4. *Dominant stakeholder*, yaitu *stakeholder* yang memiliki kekuatan dan legitimasi namun tidak memiliki urgensi, 5. *Dangerous stakeholder*, yaitu *stakeholder* yang memiliki kekuatan dan urgensi namun tidak memiliki legitimasi, 6. *Dependant stakeholder*, yaitu *stakeholder* yang memiliki legitimasi dan urgensi namun tidak memiliki kekuatan, dan 7. *Definitive stakeholder*, yaitu *stakeholder* yang memiliki kekuatan, legitimasi dan urgensi.

Meskipun atribut kekuatan, legitimasi dan urgensi saling terkait dalam mempengaruhi pengambilan keputusan oleh perusahaan, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah atribut kekuatan (Fahriza, 2014). *Stakeholder* pada umumnya dapat mengendalikan pemakaian sumber ekonomi yang digunakan di dalam perusahaan. Kekuatan *stakeholder* untuk mengatur atau mempengaruhi pemakaian sumber daya perusahaan tergantung pada besar kecilnya pengaruh *stakeholder* di perusahaan (Widiyastuti dan Anis, 2012). Kekuatan pengaruh *stakeholder* di dalam perusahaan dapat berupa akses terhadap media, modal, dan kemampuan mengatur perusahaan (Deegan, 2000 dalam Ghazali dan Chariri 2007). Semakin kuat posisi *stakeholder*, semakin besar kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan *stakeholder*-nya (Pujiastuti, 2015).

Menurut Freeman (2001) dalam Ratnasari dan Andri (2011), *Stakeholder theory* mengasumsikan bahwa organisasi tidak hanya bertanggungjawab kepada

pemegang saham saja, tetapi juga harus bertanggungjawab kepada berbagai kelompok dalam masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Ghozali dan Chariri (2007) pun mengatakan, *stakeholder theory* berpandangan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun juga harus memberikan manfaat bagi para *stakeholders*-nya (*shareholder*, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misalnya tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Ghozali dan Chariri, 2007). Lanjut Ghozali dan Chariri (2007) bahwa dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholders*-nya.

Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dan *stakeholder* (Fahriza, 2014). Salah satu bentuk pengungkapan sosial adalah pengungkapan *sustainability report*. Melalui *sustainability report* perusahaan dapat memberikan informasi yang cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007), termasuk masyarakat muslim sebagai salah satu *stakeholder*. Sehingga, implikasi teori *stakeholder* dalam penelitian ini ialah bahwa, masyarakat muslim sebagai *stakeholder* mengharapkan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial berbasis syariahnya, sehingga membuktikan perusahaan beroperasi sesuai hukum Islam (Maulida, *et al.*, 2014).

C. *Shariah Enterprise Theory*

Menurut Meutia (2010: 28) dalam Susilowati (2013), *syariah enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang sudah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transedental dan lebih humanis. *Enterprise theory* ini mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholder* yang lebih luas (Triyuwono, 2007). Sehingga, dapat dikatakan bahwa, sebenarnya teori ini tidak berbeda jauh dengan *stakeholder theory* yang telah dibahas sebelumnya yang mengakui keberadaan *stakeholder* sebagai pemangku kepentingan perusahaan (Susilowati, 2013). Lanjut Susilowati (2013), kedua teori ini selain sarat dengan nilai-nilai kapitalisme, dalam teori tersebut juga mencakup nilai-nilai syariah yaitu keadilan, *rahmatan lil alamin*, dan *maslahah* karena keduanya mengutamakan kesejahteraan bagi kepentingan semua *stakeholder*-nya, tidak hanya kepentingan para pemegang saham (*shareholder*) saja. Namun dalam perkembangannya, *enterprise theory* ini dikembangkan lagi sehingga memiliki bentuk yang lebih dekat dengan syariah sehingga diperoleh bentuk teori yang dikenal dengan istilah *syariah enterprise theory* (Triyuwono, 2007).

Syariah enterprise theory ini memiliki cakupan *stakeholder* yang lebih luas, meliputi Allah, manusia dan alam (Triyuwono, 2007). Allah merupakan pihak yang paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia, sebagai konsekuensinya maka segala tata cara dan aturan yang dianut harus dibangun berlandaskan *sunatullah* yaitu berdasarkan tata-aturan dan hukum-hukum Allah (Susilowati, 2013). *Stakeholder* kedua adalah manusia, yang dikelompokkan dalam

direct stakeholder (memberikan kontribusi langsung) dan *indirect stakeholder* (tidak memberikan kontribusi langsung). *Stakeholder* ketiga adalah alam, yaitu pihak yang memberikan kontribusi bagi hidup matinya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan secara fisik ada karena didirikan di atas bumi, memproduksi dan menggunakan energi yang dihasilkan oleh alam. Alam kemudian menginginkan bentuk kepedulian berupa pelestarian alam, pencegahan terhadap pencemaran dan sebagainya.

Ketiga dimensi tersebut selanjutnya oleh Meutia (2010) dalam Susilowati (2013) digolongkan menjadi akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini ditujukan hanya kepada Tuhan, sedangkan akuntabilitas horizontal, ditujukan kepada tiga pihak, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam. Sehingga apabila digambarkan, perbedaan antara *stakeholder theory* dengan *syariah enterprise theory* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Stakeholder Theory dengan Syariah Enterprise Theory

No	<i>The Stakeholder Theory</i>	<i>Syariah Enterprise Theory</i>
1.	Perusahaan bertanggungjawab kepada <i>stakeholder</i> -nya (supplier, konsumen, karyawan, pemilik, pemerintah dan lain-lain)	- Allah sebagai sentral tujuan pertanggungjawaban - Menjalankan usaha sesuai dengan tata cara, aturan dan tujuan syariah
2.	Orientasi pada kesejahteraan <i>stakeholder</i>	Orientasi pada <i>stakeholder</i> yang lebih luas (Allah, manusia dan alam)
3.	Pengungkapan CSR sebagai alat berkomunikasi dengan <i>stakeholder</i>	Pengungkapan CSR sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap amanah Allah

Sumber: Meutia (2010: 32) dalam Susilowati (2013)

Meutia (2010) dalam Susilowati (2013) kemudian mengajukan beberapa konsep dalam *shariah enterprise theory* terkait dengan pengungkapan CSR. Beberapa di antaranya ialah bahwa, pengungkapan CSR adalah wajib (*mandatory*), karena merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan utama, serta harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders* (Meutia, 2010 dalam Susilowati, 2013). Lanjut Meutia (2010) dalam Susilowati (2013), bahwa pengungkapan CSR harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif. Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* ini lebih tepat bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah.

Shariah enterprise theory dalam penelitian ini mengimplikasikan bahwa *stakeholder* tertinggi adalah Allah sebagai pusat. Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan (Hafida, 2012). Hubungan pengungkapan CSR berbasis syariah yang dilakukan perusahaan merupakan pemenuhan Amanah dan kewajiban sebagai makhluk Allah, yang tidak terlepas dari tujuan Islam.

D. Corporate Social Responsibility dan Sustainability Reporting dalam Islam

Istilah CSR dalam konteks global sebenarnya telah ada sejak abad 17 dan mengalami perkembangan kajian yang cukup dinamis yang mencerminkan dinamika implementasi yang terus mengalami perubahan (Susilowati, 2013). Definisi CSR telah banyak dikemukakan oleh pakar, ahli, praktisi, dan lembaga

(Gustani, 2013). Namun, definisi tetap atas CSR hingga saat ini belum ada yang disepakati, masing-masing pihak memiliki definisi beragam mengenai CSR, meskipun dalam banyak hal memiliki kesamaan esensi (Arifiyanto, 2013; Gustani, 2013). Arifiyanto (2013) melanjutkan bahwa, keragaman ini sesungguhnya merupakan cerminan dari perbedaan latar belakang serta pola pikir para praktisi yang mendefinisikan CSR, walaupun secara garis besar dapat terlihat bahwa mereka telah memiliki maksud yang sama.

Awal mula definisi CSR dikemukakan oleh Barnard (1938) dalam Abreu, *et al.* (2005) sebagai analisis terhadap aspek ekonomi, hukum, moral, sosial, dan fisik dari lingkungan. Istilah CSR kemudian mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1997), karya John Elkington. Elkington (1997) mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, yang terdiri dari *Profit*, *Planet* dan *People*. Definisi CSR sendiri menurut Wibisono (2007: 6) dan Akbar (2008) ialah, tanggung jawab perusahaan kepada para *stakeholders* untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dari sekian banyak pendapat, dapat disimpulkan bahwa, CSR adalah sebuah bentuk komitmen perusahaan terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan (Gustani, 2013). Bila disederhanakan lagi, CSR adalah suatu konsep yang menerapkan keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek sosial serta lingkungan (Anonim, 2016).

Menurut konsep CSR sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas dan pengambilan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan semata melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun masa yang akan datang (Syahnaz, 2013). Selanjutnya, CSR ini diungkapkan dalam sebuah penyusunan laporan keberlanjutan atau *sustainability reporting* sebagai bukti bahwa telah adanya komitmen dari pihak perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang dapat dinilai hasilnya oleh para pihak yang membutuhkan informasi tersebut (Nanna, *et al.*, 2014). Penyampaian informasi CSR melalui pengungkapan *sustainability reporting* merupakan nilai tambah bagi perusahaan dalam mengukur dan menilai kinerjanya berdasar harapan dan persyaratan yang ada dalam masyarakat (Widianto, 2011).

Sustainability reporting pun memiliki definisi yang beragam seperti CSR. Menurut Elkington (1997), *sustainability reporting* berarti laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). KPMG (2002: 7) dalam Daub (2007) mendefinisikan *sustainability reporting* sebagai laporan yang mencakup informasi kuantitatif dan kualitatif pada kinerja keuangan/ekonomi, sosial/etika dan lingkungan secara seimbang. Sementara GRI (2013) mendefinisikan *sustainability reporting* sebagai praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder*, baik internal maupun eksternal. Dapat disimpulkan bahwa, *sustainability reporting* merupakan laporan

yang memuat informasi kinerja keuangan dan informasi non keuangan yang terdiri dari aktivitas sosial dan lingkungan yang lebih menekankan pada prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh sehingga memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan (Soeslistyoningrum, 2011).

Aktivitas CSR yang dilaporkan dalam *sustainability reporting* kini tidak hanya berkembang pada ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang pada ekonomi syariah, yaitu lembaga bisnis ataupun perusahaan yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan konsep syariah Islam (Sofyani, *et al.*, 2012; Widiawati, 2012; Khoirudin, 2013; Rama, 2014). Islam sebagai cara hidup memberikan panduan bagi umatnya untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan jamannya. Islam memungkinkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah, namun tidak dalam akidah, ibadah dan akhlaq (Kamali, 1989 dalam Fitria dan Dwi, 2010). Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah (Ahmad, 2002 dalam Fitria dan Dwi, 2010). Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Oleh karenanya ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat ketimbang dalam konsep konvensional, karena pada syariah didasarkan pada dasar-dasar religius (Fitria dan Dwi, 2010).

Islam mengajarkan bahwa tidak cukup bagi seorang Muslim hanya menfokuskan diri beribadah kepada Allah. Dalam Islam, manusia merupakan *khalifah* di muka bumi, sehingga manusia juga harus menyemarakkan kebaikan

kepada sesama makhluk ciptaan-Nya. Oleh sebab itu, kesempurnaan iman seorang muslim tidak dapat hanya dicapai dengan hubungan vertikal kepada Allah saja (*Hablumminallah*)-kesalehan Individual, tetapi juga harus dibarengi dengan hubungan yang baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah (*Hablumminannas*)-kesalehan sosial (Sofyani, *et al.*, 2012).

Konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara Islami (Widiawati, 2012). Widiawati (2012) menambahkan, konsep CSR dalam Islam lebih ditekankan sebagai bentuk ketaqwaan umat manusia kepada Allah SWT dalam dimensi perusahaan. Senada dengan Widiawati (2012), Putra (2014) menjelaskan bahwa, dalam perspektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan dapat diartikan dengan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Selain itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara yang berfungsi sebagai penerima amanah (Djakfar, 2007 dalam Putra, 2014). Maka dari itu, manusia diamanahkan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini yang membawa *rahmatan lil alamin* dalam setiap aspek kehidupan (Putra, 2014).

E. GRI Index dan ISR Index sebagai Pedoman Sustainability Reporting

Seiring meningkatnya tren *sustainability reporting*, juga diikuti dengan meningkatnya pedoman-pedoman atau aturan yang disediakan oleh badan

pemerintah dan badan industri (Sari, 2013). Tetapi, seiring waktu, salah satu yang muncul sebagai kerangka dominan adalah *Global Reporting Initiative* (GRI) (Ching, *et al.*, 2013). Sebagaimana yang dikatakan Wibowo dan Sekar (2014) bahwa, GRI yang berlokasi di Belanda merupakan pemegang otoritas di dunia dalam mengatur tentang *sustainability reporting*. Pedoman pelaporan keberlanjutan GRI merupakan standar pelaporan keberlanjutan komprehensif yang paling banyak digunakan di dunia (GRI, 2013). Menurut *Certified General Accountants Association of Canada* (CGA-Canada) (2005: 81), pedoman pelaporan keberlanjutan yang disediakan oleh GRI merupakan kerangka terbaik untuk mencapai standarisasi yang diperlukan. Lanjut CGA-Canada (2005: 81) bahwa, daya tarik pedoman GRI sebagai standar untuk pelaporan keberlanjutan adalah sebagian besar disebabkan oleh pendekatan *multi-stakeholder* yang diadopsi dalam pengembangan pedomannya.

GRI sendiri didirikan pada tahun 1997 di Amsterdam-Belanda oleh sejumlah perusahaan dan organisasi yang tergabung dalam Koalisi untuk Ekonomi yang Bertanggungjawab terhadap Lingkungan (*Coalition for Environmentally Responsible Economies/CERES*) (Adi dan Taufiq, 2013). GRI adalah organisasi nirlaba internasional dengan struktur berbasis jaringan yang kegiatannya melibatkan ribuan tenaga profesional dan organisasi dari beragam sektor, konstituen, dan wilayah (GRI, 2013). Lebih lanjut GRI (2013) menyatakan bahwa, misi GRI adalah untuk membuat pelaporan keberlanjutan menjadi praktik standar, agar semua perusahaan dan organisasi dapat melaporkan kinerja dan dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka, dengan membuat pedoman

pelaporan keberlanjutan tidak berbayar. Kerangka yang disediakan GRI ini didesain untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya, yang memperhatikan pertimbangan praktis yang dihadapi oleh berbagai macam organisasi, dari perusahaan kecil sampai kepada perusahaan yang memiliki operasi ekstensif dan tersebar di berbagai lokasi (GRI, 2013).

Kini GRI hadir dengan generasi keempat pedomannya yakni GRI versi 4 atau lebih populer disebut GRI-G4, lanjutan GRI-G3.1, yang telah dirilis pada Mei 2013. Tujuan GRI-G4 sederhana, yaitu untuk membantu pelapor menyusun laporan keberlanjutan yang bermakna dan membuat pelaporan keberlanjutan yang mantap dan terarah menjadi praktik standar (GRI, 2013). GRI-G4 menghasilkan kerangka konseptual, prinsip-prinsip, pedoman, dan indikator-indikator yang diterima umum secara global untuk mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk menghasilkan informasi andal, relevan, dan terstandardisasi, yang dapat digunakan untuk menilai peluang dan risiko, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih matang, baik di dalam perusahaan maupun di antara para pemangku kepentingannya (GRI, 2013).

Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan, baik bagi pelapor yang berpengalaman maupun bagi mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan dari sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya (GRI, 2013). Selain itu, GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda, baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu, atau pelaporan *online*

(GRI, 2013). Dalam standar GRI-G4 indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang mencakup praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab atas produk (GRI, 2013).

Sayangnya, pedoman *sustainability reporting* yang disediakan GRI-G4 dengan segala kelebihanannya, sebagaimana telah dijelaskan di atas, rupanya masih kurang sesuai untuk digunakan oleh suatu entitas yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu entitas syariah. Hal ini wajar saja mengingat GRI merupakan lembaga yang di dalamnya didominasi oleh orang barat, sehingga pedoman yang dihasilkannya lebih sesuai bagi entitas konvensional. Sebagaimana dikatakan oleh Putra (2014), bahwa landasan falsafah perusahaan Islam berbeda dengan falsafah perusahaan-perusahaan di dunia barat. Falsafah perusahaan dan CSR dalam Islam disandarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah serta kebiasaan budaya yang berkembang di dalam masyarakat muslim, sedangkan di barat didasarkan pada pandangan dan budaya barat serta berkemungkinan besar pengaruh agama mereka masuk dalam konsep CSR yang digunakan saat ini (Putra, 2014).

Walaupun pada kenyataannya, entitas syariah dalam pembuatan *sustainability reporting*-nya masih mengacu pada GRI (Haniffa, 2002). Namun, pedoman tersebut tentunya kurang tepat karena perusahaan yang diakui sebagai emiten syariah dan dinyatakan memenuhi syariat Islam seharusnya mengungkapkan informasi yang membuktikan perusahaan tersebut beroperasi sesuai hukum Islam (Maulida, *et al.*, 2014). Oleh karena itu, dibutuhkan acuan (*guideline*) untuk mengukur sejauh mana perusahaan-perusahaan yang tergolong

entitas syariah membuat laporan CSR yang turut menyajikan aspek-aspek religi dengan menyajikan pemenuhan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan syariah (Widiawati, 2012). Terkait hal ini, kemudian muncullah kerangka pelaporan CSR yang turut memperhatikan sisi spiritual, yang hadir dalam bentuk indeks *Islamic Social Reporting (ISR)* (Haniffa, 2002) dan saat ini sedang marak diperbincangkan (Fitria dan Dwi, 2010).

ISR menurut Widiawati (2012) pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) lalu dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman *et al.* tahun 2009 di Malaysia. ISR sendiri merupakan tolok ukur pelaksanaan kinerja sosial entitas syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam (Fitria dan Dwi, 2010). Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim, melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah SWT dan masyarakat.

Sebagaimana dikatakan Rama (2014) bahwa, ISR merupakan perluasan dari kerangka pelaporan konvensional yang tidak hanya berisikan aspek material, moral, ataupun sosial saja, namun juga memperhatikan bentuk produk serta jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Sesuainya ISR untuk entitas Islam dibanding GRI, karena mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti

produk, jasa atau transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba, spekulasi, *gharar* dan transaksi haram lainnya, serta mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti *shodaqoh*, *waqof*, *qordul hasan* dan bentuk amaliah lainnya yang digolongkan berdasarkan masing-masing cara perolehan serta penyalurannya, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan (Maulida, *et al.*, 2014; Putra, 2014; Rama, 2014). Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Rama, 2014). ISR ini kemudian terbagi menjadi enam indikator pengungkapan yang masing-masing terdapat berbagai item, yaitu investasi dan keuangan; produk dan jasa; tenaga kerja; sosial; lingkungan; dan tata kelola organisasi (Fitria dan Dwi, 2010).

F. Konvergensi ISR Index ke dalam GRI Index

Isu konvergensi indeks ISR ke indeks GRI telah dibahas dalam penelitian Fitria dan Dwi (2010). Menurut Fitria dan Dwi (2010), untuk melihat kemungkinan konvergensi antara indeks ISR ke indeks GRI maka diperlukan telaah lebih dalam terhadap tiap indikator indeks ISR. Telaah tersebut dapat dilakukan dengan menilai kelengkapan indikator-indikator CSR dalam indeks ISR terhadap indikator-indikator indeks GRI yang telah disusun secara detail dan komprehensif (Fitria dan Dwi, 2010). Lanjut Fitria dan Dwi (2010) bahwa, pengembangan indeks ISR di masa yang akan datang akan sangat bergantung pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Berdasarkan penelitian Fitria dan Dwi (2010) menggunakan GRI tahun 2006 (GRI-G3), diketahui bahwa konvergensi indeks ISR ke dalam indeks GRI-G3

memiliki dua manfaat. Pertama, konvergensi merupakan alternatif yang efisien karena dapat mengurangi biaya pengungkapan langsung (biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan dan menyajikan informasi misalnya biaya administrasi, pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi, serta biaya terkait lainnya) yang harus ditanggung oleh organisasi Islam. Dengan satu standar pengungkapan, mereka tidak perlu menyajikan dua laporan yang berbeda berdasarkan dua indeks yang berbeda juga. Kedua, lebih efektif bagi para pemakai laporan (*stakeholder*) untuk membaca satu laporan yang lengkap dibandingkan bila mereka harus membaca dua laporan yang berbeda tetapi isinya sebagian besar adalah sama (Fitria dan Dwi, 2010).

Walaupun telah terdapat usulan untuk melakukan konvergensi ISR ke dalam GRI, nyatanya hingga diluncurkannya GRI versi terbaru yaitu GRI-G4 sampai saat ini pun wacana ini nampaknya belum mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan. Hal ini karena, menurut Fitria dan Dwi (2010), perkembangan indeks ISR di Indonesia masih lambat, karena masih merupakan sesuatu yang baru dan tidak banyak diketahui entitas syariah Indonesia pada umumnya. Selain itu, penelitian mengenai indeks ISR di Indonesia pun masih jarang dilakukan. Hal ini berbeda dengan perkembangan indeks ISR di negara-negara Islam seperti Malaysia, Sudan, Bahrain, Uni Emirat Arab, Iran, Palestina, Kuwait, Bangladesh dan Qatar, di mana indeks ISR telah menjadi bagian dari pelaporan organisasi syariah di negara-negara yang bersangkutan (Fitria dan Dwi, 2010). Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian-penelitian mengenai indeks ISR di negara-negara tersebut (Fitria dan Dwi, 2010).

Namun, apabila indeks ISR telah dijadikan pedoman pengungkapan yang diterima secara umum dimasa yang akan datang, baik sebagai indeks yang berdiri sendiri atau telah dikonvergensi ke dalam indeks GRI, maka seluruh organisasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip syariah di Indonesia juga harus berpedoman pada indeks ini dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya (Fitria dan Dwi, 2010). Sehingga, salah satu tujuan dalam penelitian ini pun ialah untuk mengetahui dan mengembangkan penelitian Fitria dan Dwi (2010) terkait konvergensi indeks ISR ke indeks GRI yang nantinya dapat digunakan sebagai pedoman pembuatan *sustainability reporting* pada entitas syariah, dengan menggunakan GRI versi terbaru (GRI-G4).

G. Perbankan Syariah dan Jakarta Islamic Index (JII) sebagai Entitas Syariah

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga bisnis yang operasionalisasinya berdasarkan syariah. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan yang berlandaskan etika Islam ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah (Misbach, 2012: 27). Menurut Fitria dan Dwi (2010), perbankan syariah merupakan sektor yang patut diperhitungkan. Lanjut Fitria dan Dwi (2010) bahwa, survey yang dilakukan oleh *Bahrain Monetary Agency* di tahun 2004 memperlihatkan bahwa jumlah institusi perbankan syariah melonjak dengan cukup signifikan dari 176 di tahun 1997 menjadi 267 di tahun 2004 yang beroperasi di 60 negara di dunia. Sehingga, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 15% per tahunnya maka industri perbankan syariah merupakan sektor yang paling cepat

berkembang di negara muslim (Zaher dan Hassan, 2010 dalam Fitria dan Dwi, 2010).

Perbankan syariah di Indonesia pun berkembang cukup pesat dalam satu dekade terakhir ini (Putra, 2014). Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat akan sistem ekonomi yang berkeadilan semakin besar (Putra, 2014). Apalagi dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (Arifiyanto, 2013). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip syariah (Misbach, 2012: 29).

Menurut Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya dalam Pasal 2 dikatakan bahwa, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian di Pasal 3 dikatakan bahwa, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank Syariah berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu, juga dapat melakukan fungsi sosial yaitu dalam bentuk lembaga *baitul mal* yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, serta dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Sehingga, menurut Dusuki and Humayon (2005), pada perbankan syariah, tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat bahwa perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah yang meminta mereka untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Selain itu adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan Khalifah, serta adanya prinsip atas kepentingan umum yang terdiri dari penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan (Dusuki and Humayon, 2005).

Berdasarkan berbagai hal yang telah dikemukakan di atas, menurut Yusuf (2010) dalam Arifiyanto (2013), perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang sudah eksis ditingkat nasional maupun internasional harus menjadi lembaga keuangan percontohan dalam menggerakkan program CSR. Pelaporan CSR perbankan syariah bukanlah hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu, bahwa tanggung jawab sosial bank syariah dibangun atas dasar landasan falsafah dan *tasawwur* (*world view*) Islam yang sangat kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat (Arifiyanto, 2013). Namun, selain perbankan syariah, terdapat pula

entitas syariah lainnya yang juga relevan untuk dibicarakan terkait tanggung jawab sosial yang dilaksanakannya, salah satunya ialah pasar modal syariah.

Terminologi pasar modal syariah diartikan oleh Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Widiawati, 2012). Lanjut Widiawati (2012), penerapan prinsip dasar syariah di pasar modal bersumber dari Al Quran dan Hadist. Kegiatan di pasar modal syariah dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang berbentuk *muamalah*.

Salah satu alasan dikembangkannya pasar modal syariah memang adalah untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam yang ingin melakukan investasi di pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah (Shodiqurrosyad, 2014). Di Indonesia sendiri, pasar modal syariah berkembang dengan cukup baik. Perkembangan ini, meskipun tidak secepat perkembangan perbankan syariah, namun memiliki kecenderungan yang terus meningkat, sejalan dengan berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia (Shodiqurrosyad, 2014). Perkembangan yang terjadi pada pasar modal syariah banyak ditunjang dengan semakin menguatnya institusi pasar dan beragamnya instrumen investasi (Shodiqurrosyad, 2014), serta populasi muslim di Indonesia yang mencapai 85% dari total penduduk dengan tingkat pemahaman publik akan ekonomi Islam yang semakin membaik, merupakan potensi pasar yang sangat besar (Huda, 2006).

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ini dimulai sejak diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management

pada 3 Juli 1997 (Widiawati, 2012). Lanjut Widiawati (2012), kemudian pada 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII). Pembentukan instrumen syariah inilah yang kemudian mendukung pembentukan pasar modal syariah yang diluncurkan di Jakarta pada 14 Maret 2003 (Perdana, 2008).

JII sendiri adalah indeks harga saham dari 30 perusahaan pilihan yang dianggap memenuhi sejumlah kriteria yang sesuai syariah (Hanafi dan Syafiq, 2012). Basis dari JII adalah Daftar Efek Syariah, yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK bekerja sama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia). JII diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi pada saham berbasis syariah (Perdana, 2008; Aziz, 2010 dalam Muin, 2014). Lanjut Perdana (2008), diharapkan pula JII dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. Sehingga, JII mampu menjadi jawaban atas keinginan investor (Perdana, 2008) sekaligus mampu menjadi pemandu investor yang ingin yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi (Perdana, 2008; Widiawati, 2012). Selain itu, JII dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur kinerja (*benchmark*) suatu investasi pada saham berbasis syariah (Muin, 2014) dan dalam memilih portofolio saham yang halal (Perdana, 2008).

Pemilihan saham-saham dalam JII dilakukan oleh Bapepam-LK bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang dievaluasi secara berkala setiap bulan Januari dan Juli atau berdasarkan periode yang ditetapkan oleh Bapepam-LK yaitu pada saat diterbitkannya Daftar Efek Syariah. Kriteria syariah pemilihan

saham JII ini didasarkan pada Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa, emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut:

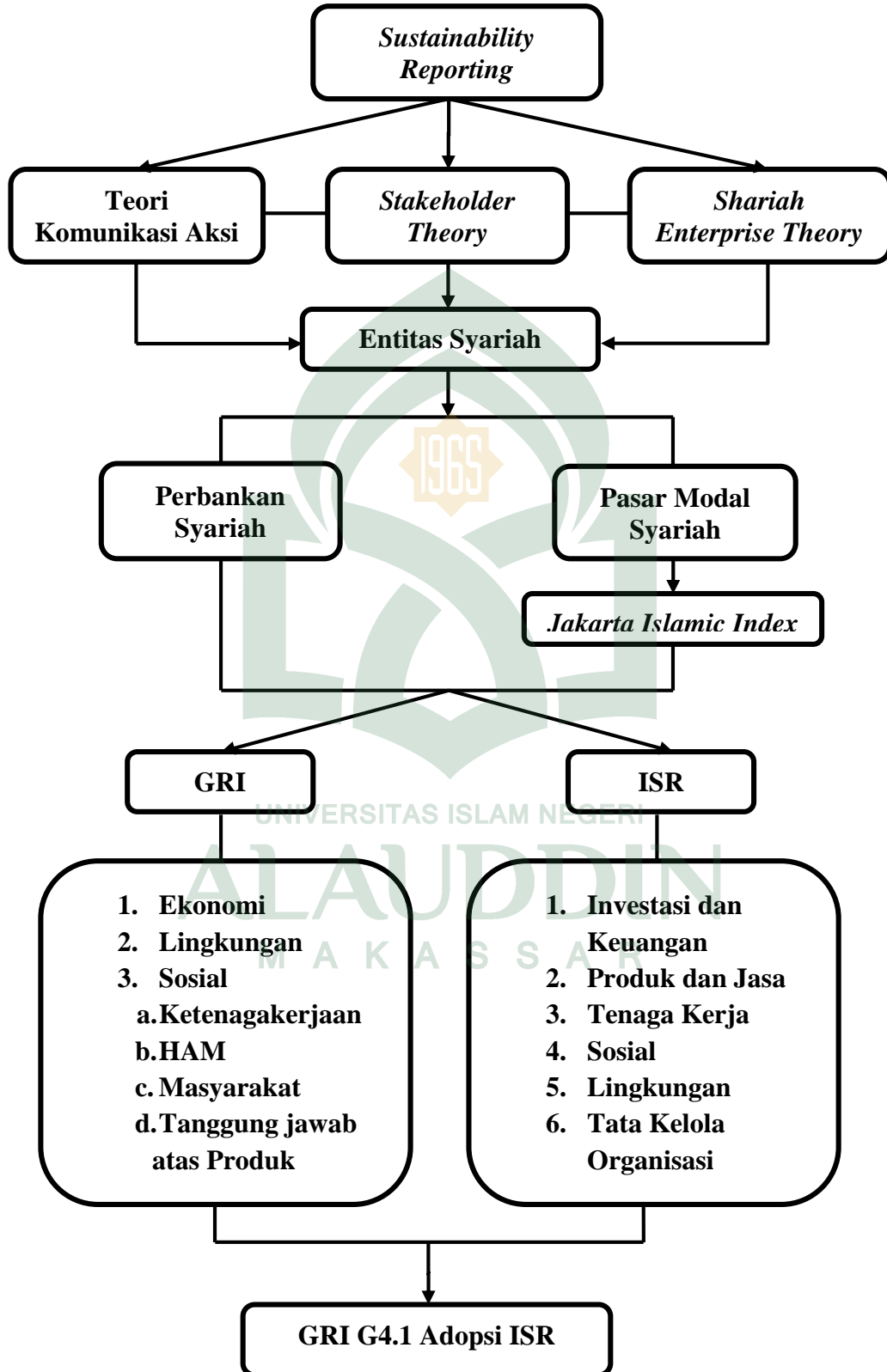
1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - b. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
 - 1) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - 2) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - c. Jasa keuangan ribawi, antara lain:
 - 1) Bank berbasis bunga;
 - 2) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - d. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
 - e. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 - 1) Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*);
 - 2) Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI;
 - 3) Barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat;
 - f. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

2. Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45 % (empat puluh lima per seratus); atau
 - b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10 % (sepuluh per seratus).

H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan landasan teori dan teori-teori yang relevan, pembahasan mengenai analisis kualitas *sustainability reporting* yang ditinjau dengan *GRI Index* dan *ISR Index*, harus dimulai dari penjelasan dasarnya terlebih dahulu (*philosophical thinking*), yaitu seberapa pentingnya *sustainability reporting* bagi sebuah perusahaan saat ini. Pentingnya *sustainability reporting* dapat ditinjau dengan menggunakan *Legitimacy Theory*, *Stakeholder Theory* dan *Shariah Enterprise Theory*. Penjelasan tersebut kemudian menjadi dasar bagi perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban sosialnya, yang tidak hanya diwajibkan pada entitas konvensional, tetapi juga pada entitas syariah. Entitas syariah dalam hal ini dikhususkan pada perbankan syariah dan perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal syariah, khususnya dalam JII. Kemudian pelaksanaan tanggung jawab sosial ini diukur berdasarkan indeks GRI dan indeks ISR. Hingga pada akhirnya akan melahirkan konsep baru dalam pedoman *sustainability reporting*, yaitu indeks GRI yang dikonvergensi dengan indeks ISR, yang kemudian disebut GRI konvergensi ISR. Secara sederhana, rerangka pikir ini dapat dijelaskan melalui gambar berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Denzin and Lincoln (1994: 2) dalam Sopanah (2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bekerja dalam *setting* alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat. Moleong (2006: 6) dalam Shodiqurrosyad (2014) pun berpendapat bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode kualitatif merupakan suatu metode yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya (Widiyastuti, 2012). Penelitian kualitatif adalah tipe penelitian yang sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas (Cresswell, 1994 dalam Somantri, 2005). Ciri-ciri yang menonjol dalam penelitian kualitatif adalah (1) sumber datanya langsung berupa data situasi alami dan peneliti adalah instrumen kunci; (2) bersifat deskriptif; dan (3) lebih menekankan makna proses daripada hasil, perilaku, dan dengan pandangan pendirian yang diperoleh dari pengamatan (Karmini, 2011). Dengan demikian, penelitian kualitatif lebih

memungkinkan untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam serta memperoleh deskriptif yang lebih jelas dan detail terkait fenomena yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan pada dua jenis perusahaan yang tergolong sebagai entitas syariah. Perusahaan jenis pertama berasal dari perbankan syariah, yang diwakili oleh Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Kemudian, perusahaan jenis kedua merupakan perusahaan yang sahamnya masuk dalam JII yang diwakili oleh PT Unilever Indonesia Tbk., PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT Kalbe Farma Tbk. Alasan pemilihan ketiga perusahaan dari sektor perbankan syariah dan perusahaan yang masuk dalam JII tersebut lebih kepada pertimbangan ukuran pangsa pasar di masing-masing kelompoknya. Di mana ketiga bank syariah yang dipilih tersebut merupakan perbankan syariah yang menguasai sebagian besar pangsa pasar perbankan syariah dan telah lebih lama bergelut dalam sektor perbankan syariah.

Sama halnya dengan sektor perbankan syariah, ketiga perusahaan yang masuk dalam JII tersebut juga merupakan tiga perusahaan terbesar dimasing-masing sektor, dengan produk-produk yang sangat banyak dan beragam sehingga mampu menguasai pangsa pasar masing-masing. Selain itu, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang menjadi konsumen produk-produk ketiga perusahaan tersebut, tentunya menginginkan agar perusahaan penghasil produk-produk yang digunakannya tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat menghasilkan produk-produk yang terjamin kehalalannya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan bukan berupa angka tetapi berupa kata-kata atau gambar. Data yang dimaksud berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, *tape recorder*, catatan atau memo atau dokumen resmi lainnya (Moleong, 2006: 6 dalam Shodiqurrosyad, 2014). Menurut Bungin (2007: 143), analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005: 63). Dalam metode deskriptif, peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Penelitian komparatif pada intinya adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang atau kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja Arikunto (2013: 236). Dapat juga digunakan untuk membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus, peristiwa atau ide. Dalam konteks lebih sederhana, komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Hapsari, 2015). Lebih sederhana lagi, menurut Silalahi (2009: 35) dalam Fatmawati (2013), penelitian

komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Deskriptif-komparatif membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda atau sebaliknya (Fatmawati, 2013).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dan menguraikan sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari objek/subjek yang diteliti guna mengetahui persamaan dan perbedaan yang ada dari objek/subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah kualitas *sustainability reporting* antara perbankan syariah dengan perusahaan dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) berdasarkan indeks GRI dan indeks ISR.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menurut Indriantoro dan Supomo (2013) adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data-data sekunder dalam penelitian ini berupa *sustainability reporting* perusahaan periode terbaru yang telah dipublikasi di *website* resmi masing-masing perusahaan dan *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), serta data-data atau dokumen pendukung lainnya berupa pedoman *sustainability reporting* dari GRI, ISR dan data lainnya yang relevan.

Penggunaan sampel penelitian yang relatif baru diharapkan akan menjadikan hasil penelitian lebih relevan untuk memahami kondisi aktual perbankan syariah di Indonesia dan perusahaan yang terdaftar dalam JII. Sedangkan pemilihan *sustainability reporting* baik berupa laporan tersendiri maupun yang

terintegrasi dalam laporan tahunan sebagai objek data yang dianalisis karena *sustainability reporting* merupakan sumber komunikasi perusahaan kepada para *stakeholder* dan banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan laporan sosial lingkungannya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Dokumentasi

Yaitu prosedur pengumpulan data berupa data-data sekunder yang dalam bentuk dokumen-dokumen sosial perusahaan yaitu *sustainability report* yang mengandung *narrative text*, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai praktik *sustainability reporting* perusahaan.

2. Studi Pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.

3. *Internet Searching*

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari *internet* guna melengkapi referensi penulis berkaitan masalah yang diteliti.

E. *Instrument penelitian*

Penelitian ini dilakukan dengan mengunduh (*download*) data yang dibutuhkan berupa *sustainability reporting* perusahaan objek dan data pendukung lainnya berupa panduan pelaporan *sustainability reporting* dari GRI dan ISR, serta data-data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

Menurut Patton (2005), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Di mana *content analysis* merupakan metode analisis data dengan cara melakukan observasi dan analisis terhadap isi dari suatu dokumen yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik atau informasi spesifik pada suatu dokumen, sehingga dapat menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis (Indriantoro dan Supomo, 2009). Analisis isi (*content analysis*) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks” (Bell, 2001: 13 dalam Shodiqurrosyad, 2014). Teks dapat berupa kata-kata, makna, gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan.

Bell (2001: 13) dalam Shodiqurrosyad (2014) melanjutkan bahwa, analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah teks dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman struktur makna sebuah teks secara

konsisten (Shodiqurrosyad, 2014). Metode analisis isi memiliki beberapa ciri khas, di antaranya ialah objektif, sistematis dan isi yang tampak (*manifest*) (Prajarto, 2010: 4-8; Eriyanto, 2011: 16-20).

Objektif berarti peneliti harus benar-benar melihat gambaran isi pesan secara apa adanya dan tidak memasukkan unsur subjektivitas (keinginan, bias, atau kecenderungan tertentu peneliti). Sehingga, jika penelitian dilakukan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil yang sama. Sistematis artinya penempatan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodean data agar tidak bias. Penelitian disebut sistematis jikalau peneliti menggunakan definisi yang sama untuk semua bahan yang akan dianalisis. Sementara isi yang nyata (*manifest*) berarti yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak), ada di dalam teks dan tidak dibutuhkan penafsiran untuk menemukannya, bukan makna yang dirasakan periset, yang dapat berupa gambar, kata-kata pesan, pemakaian warna, dan sebagainya (Prajarto, 2010: 4-8; Eriyanto, 2011: 16-20).

Adapun kelebihan dari metode *content analysis* menurut Gustani (2013) adalah tidak digunakannya manusia sebagai subjek penelitian, sehingga penelitian relatif mudah dan murah. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah hanya dapat meneliti pesan yang tampak, sesuatu yang disembunyikan dalam pesan bisa luput dari metode ini (Subiakto, 2004 dalam Bungin, 2007). Namun, metode ini merupakan metode yang paling cocok untuk mengetahui tingkat pengungkapan kinerja sosial yang dilakukan perusahaan (Raditya, 2012).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan *scoring* atau pembobotan dalam rangka menilai pengungkapan *sustainability reporting* yang dilaksanakan dan dilaporkan oleh objek penelitian berdasarkan indeks GRI dan indeks ISR. Adapun indeks ISR yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 57 item pengungkapan yang dikelompokkan dalam 6 indikator yang meliputi: investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Sedangkan indeks GRI yang digunakan mengacu pada GRI-G4 yang terdiri dari 91 item pengungkapan yang dikelompokkan dalam 3 indikator, yang meliputi indikator ekonomi, lingkungan dan sosial yang terdiri dari praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak; hak asasi manusia (HAM); masyarakat; dan tanggung jawab produk.

Sementara, penilaian kualitas dalam penelitian ini akan dievaluasi dengan menilai masing-masing pengungkapan menggunakan skala dan indeks kualitas pengungkapan. Umumnya, hal ini akan melibatkan setiap pertemuan kalimat yang relevan dalam menyoroti spesifikasi indeks pengungkapan dan kemudian dilakukan *coding* kalimat sesuai dengan skala penilaian kualitas yang ditentukan. Teks naratif ditempatkan dalam kategori untuk membuat kesimpulan tentang isi tematik berdasarkan skema klasifikasi yang tergabung dalam indeks pengungkapan dan skala penilaian (Harun, *et al.*, 2013). Metode ini akan membantu dalam mengklasifikasikan informasi kualitatif dan kuantitatif dalam kategori tertentu dalam rangka memberikan pemahaman lebih mengenai praktik pengungkapan (Guthrie, *et al.*, 2004 dalam Harun, *et al.*, 2013). Penelitian ini menerapkan sistem penilaian *polychotomous* yang diadopsi dari Hooks and Staden (2011) dalam

Harun, *et al.* (2013) yang menggunakan skala untuk menunjukkan tingkat atau kualitas pengungkapan. Kualitas mengacu pada tingkat spesifisitas untuk pengungkapan (Tooley and Guthrie, 2007). Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membuat tabel kerja atau lembar koding (*coding sheet*) yang akan digunakan sebagai alat penelitian untuk merekam temuan-temuan. Indikator tabel kerja ini diambil dari pedoman indeks GRI-G4 dan ISR.
2. Gambar, grafik, kata, kalimat dan sebagainya yang diungkapkan dalam *sustainability reporting* diidentifikasi dan dikelompokkan atau dikodekan sesuai dengan aspek sintaktiknya dengan mengacu pada item-item yang ada di dalam GRI-G4 dan ISR.
3. Selanjutnya dilakukan *scoring* atau pembobotan terhadap masing-masing item yang diungkapkan berdasarkan kedua indeks (GRI-G4 dan ISR), yang dilakukan dengan cara mengembangkan satu set skala yang mengacu pada penelitian Harun, *et al.*, (2013), yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Penilaian Kualitas *Sustainability Reporting*

Skor	Penjelasan
Nol (0)	Menunjukkan laporan tidak mengungkapkan apa-apa
Satu (1)	Menunjukkan laporan hanya mengungkapkan informasi kualitatif saja, tanpa penjelasan
Dua (2)	Menunjukkan laporan hanya mengungkapkan informasi kualitatif dan memberikan beberapa bukti
Tiga (3)	Menunjukkan laporan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif dengan bukti pada gambar, nomor dan sebagainya
Empat (4)	Menunjukkan laporan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif dengan mengikuti <i>benchmarking</i> terhadap praktik-praktik terbaik seperti yang dinyatakan oleh pedoman indeks GRI-G4 dan indeks ISR

Sumber: Harun, *et al.*, (2013)

4. Setelah dilakukan proses *scoring*, kemudian dilakukan penilaian secara kumulatif, yaitu semua data dihitung dan ditabulasi dalam bentuk tabel dan grafik untuk mengetahui tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan.
5. Selanjutnya dilakukan interpretasi atas hasil penilaian untuk kemudian dilakukan perbandingan pengungkapan antar perusahaan objek dan pemberian pendapat serta komentar atas pelaksanaan dan pengungkapan CSR dalam *sustainability reporting* yang dilakukan perusahaan objek.
6. Berdasarkan nilai indeks GRI-G4 dan ISR pada tiap-tiap item yang diungkapkan dalam *sustainability reporting* perusahaan objek, maka selanjutnya akan ditentukan predikat tingkat kualitas *sustainability reporting* masing-masing perusahaan objek. Penentuan predikat tingkat kualitas *sustainability reporting* ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Predikat Tingkat Kualitas *Sustainability Reporting*

Predikat	Nilai Indeks (%)
Sangat Informatif	81 s/d 100
Informatif	66 s/d < 80
Kurang Informatif	51 s/d < 65
Tidak Informatif	0 s/d < 50

Sumber: Diolah oleh peneliti (2016) mengacu pada Gustani (2013)

7. Terakhir, penelitian ini akan mencoba melakukan konvergensi terhadap item-item dalam indeks ISR ke dalam indeks GRI, sehingga akan lebih sesuai digunakan sebagai pedoman *sustainability reporting* oleh entitas syariah.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan validitas dan reabilitas dapat dilakukan melalui empat uji, yaitu dengan uji kredibilitas/*credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas) (Soendari, 2016). Namun dalam penelitian ini, hanya digunakan satu uji yang paling sesuai, yaitu kredibilitas/*credibility* (validitas internal). Hal ini karena, penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama yaitu: (a) Peneliti tidak 100 % independen dan netral dari *research setting*; (b) Penelitian kualitatif sangat tidak terstruktur (*messy*) dan sangat *interpretive*, sehingga dibutuhkan uji kredibilitas (Musdalifa, 2014).

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck* (Soendari, 2016). Karena penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan teori secara konsisten dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan prosedur triangulasi. Triangulasi artinya menggunakan dan membandingkan berbagai pendekatan yang berbeda dalam melakukan penelitian. Karena itu, penelitian ini dapat menggunakan lebih dari satu teori dan lebih dari satu metode dalam memecahkan masalah yang diteliti.

Triangulasi sendiri menurut Denzin (1978) merupakan gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Lebih lanjut, Denzin (1978)

mengatakan bahwa, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Namun, dalam penelitian ini hanya dua jenis triangulasi yang akan digunakan karena dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu triangulasi teori dan triangulasi sumber data.

Triangulasi teori yaitu penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Dalam hal ini, hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement* dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Di mana pada penelitian ini, berbagai teori sudah dijelaskan pada Bab II untuk dipergunakan dan menambah pengujian. Adapun triangulasi sumber data, yaitu peneliti menggali kebenaran informasi melalui beberapa metode dan sumber perolehan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen tertulis perusahaan berupa *sustainability reporting* serta beberapa artikel yang diperoleh dengan melakukan *searching* di beberapa situs media *online* terkait aktivitas CSR perusahaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Perusahaan*

1. **Bank Muamalat Indonesia**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) didirikan pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta pengusaha muslim dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia merupakan inisiator bisnis keuangan syariah lainnya antara lain; Asuransi syariah pertama (Asuransi Takaful), Dana pensiun lembaga keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), multifinance syariah pertama (Al-Ijarah Indonesia Finance).

Bank Muamalat Indonesia mendapatkan ijin sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994 dan merupakan perusahaan publik namun tidak *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Muamalat Indonesia telah melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah di tahun 2003. Dalam melakukan ekspansi bisnisnya, selain membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia juga membuka kantor cabang internasional di Kuala

Lumpur, Malaysia pada tahun 2009 dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia.

Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia:

Visi

Menjadi Bank Syariah Terbaik dan 10 Bank Terbesar di Indonesia dengan Kehadiran Regional yang Kuat

Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

2. Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri (Bank/BSM) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955. PT Bank Syariah Mandiri berlokasi dengan alamat kantor pusat di Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Per tanggal 31 Desember 2014, BSM memiliki pangsa pasar dan kantor operasional yang tersebar di seluruh

wilayah Indonesia dengan rincian, yakni 136 kantor cabang, 469 kantor cabang pembantu, 65 kantor kas, 145 *payment point* dan, 50 outlet kantor layanan gadai.

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri:

Visi

Bank Syariah terdepan dan Modern

Misi

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan
- Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. BNI Syariah

Perjalanan BNI Syariah bermula dari dibentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya juga disebut BNI Induk) pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu akan

dilakukan *spin off* pada 2009. Rencana *spin off* terlaksana pada 19 Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah atau Bank”) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010. Terwujudnya pendirian ini juga didukung oleh faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Saat ini BNI Syariah telah memiliki 4.255 pegawai di mana proses pengembangan kompetensi terus dilakukan agar setiap pegawai yang ada menjadi yang terbaik di bidangnya. Sedangkan dari sisi teknologi informasi, BNI Syariah selaku anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didukung dengan pemanfaatan bersama sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008. Hingga kini, jaringan usaha BNI Syariah tersebar mencapai 68 Kantor Cabang, 168 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 17 Kantor Fungsional, 23 Mobil Layanan Gerak, dan 24 Payment Point.

Visi dan Misi BNI Syariah:

Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Misi

- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

- Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4. PT Unilever Indonesia Tbk.

PT. Unilever Indonesia Tbk. (Unilever Indonesia) adalah sebuah perusahaan di Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta dan bergerak di bidang manufaktur, pemasaran dan distribusi barang kebutuhan sehari-hari (*fast-moving consumer goods-FMCG*). Didirikan pada 5 Desember 1933, Unilever telah menjadi pemimpin pasar untuk produk *Home* dan *Personal Care*, dan juga *Foods and Refreshments* di Indonesia. Portofolio produk Unilever Indonesia mencakup banyak produk dan merek yang telah sangat dikenal kalangan konsumen di dunia, seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Wall's, Blue Band, Royco, Bango.

Unilever melakukan penawaran saham perdana kepada masyarakat Indonesia di tahun 1981 dan Unilever Indonesia telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Sejarah panjang dan operasi bisnis Unilever yang dikelola secara profesional telah menjadikan Unilever Indonesia satu dari 5 Perusahaan Teratas di Bursa Efek Indonesia. Unilever Indonesia telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 80 tahun, dan telah dikenal luas di masyarakat, dengan pengaruh ekonomi yang sangat besar. Dengan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh nusantara, tujuan bisnis Unilever tetaplah sama dari dulu hingga sekarang: menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari – membuat banyak orang

merasa lebih baik, tampil lebih baik, dan lebih menikmati kehidupan yang mereka punya melalui produk dan jasa yang Unilever tawarkan.

Visi dan Misi Unilever Indonesia:

Visi

Untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya.

Misi

- Bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Unilever membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain.
- Menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Unilever senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh dua kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan.

5. PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) adalah perusahaan yang bergerak di bidang produsen mie dan penggilingan tepung. Indofood didirikan pada 14 Agustus 1990 dengan nama asli PT Panganjaya Intikusuma oleh Sudono Salim dan mulai beroperasi pada tahun 1990. Pada tahun 1994, PT. Panganjaya Intikusuma mengubah namanya menjadi PT. Indofood Sukses Makmur dan mencatatkan sahamnya pada BEI. Dalam dua dekade terakhir, Indofood telah bertransformasi

menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Saat ini, Indofood memiliki 36 pabrik, lebih dari 10 merek dengan 150 rasa dan tipe distributor yang melayani hampir 150.000 outlet.

Kegiatan usaha Indofood menurut Anggaran Dasar bergerak di bidang industri, perdagangan, agribisnis dan jasa. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Indofood meliputi antara lain, industri penggilingan gandum menjadi tepung terigu yang terintegrasi dengan kegiatan usaha anak perusahaan di bidang industri konsumen bermerek, yang antara lain membuat makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum dan tekstil pembuatan karung terigu, serta industri agribisnis yang terdiri dari perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dan tanaman lainnya, budidaya dan pengolahan sayuran, serta distribusi.

Visi dan Misi Indofood Sukses Makmur:

Visi

Menjadi Perusahaan *Total Food Solutions*

Misi

- Memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan
- Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi kami

- Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan
- Meningkatkan stakeholders' values secara berkesinambungan

6. PT Kalbe Farma Tbk.

Berdiri pada tahun 1966, Kalbe telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha & akuisisi, Kalbe telah tumbuh dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi usahanya: Divisi Obat Resep (kontribusi 24%), Divisi Produk Kesehatan (kontribusi 17%), Divisi Nutrisi (kontribusi 29%), serta Divisi Distribusi and Logistik (kontribusi 30%). Keempat divisi usaha ini mengelola portofolio obat resep dan obat bebas yang komprehensif, produk-produk minuman energi dan nutrisi, serta usaha distribusi yang menjangkau lebih dari satu juta *outlet* di seluruh kepulauan Indonesia.

Di pasar internasional, Perseroan telah hadir di negara-negara ASEAN, Nigeria, dan Afrika Selatan, dan menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang dapat bersaing di pasar ekspor. Didukung lebih dari 16.000 karyawan, kini Kalbe telah tumbuh menjadi penyedia layanan kesehatan terbesar di Indonesia, dengan keunggulan keahlian di bidang pemasaran, *branding*, distribusi, keuangan serta riset dan pengembangan. Kalbe Farma juga merupakan perusahaan produk kesehatan publik terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai kapitalisasi pasar Rp. 52,1 triliun dan nilai penjualan Rp. 17,9 triliun di akhir 2015.

Visi dan Misi Kalbe Farma:

Visi

Menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima.

Misi

Meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik.

B. Perbandingan Kualitas Sustainability Reporting Perbankan Syariah dan Perusahaan terdaftar JII berdasarkan Indeks ISR

Hasil skoring *sustainability reporting* pada perbankan syariah dan perusahaan dalam JII dengan menggunakan Indeks ISR dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Perbandingan Total Skor Pengungkapan Sustainability Reporting Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII berdasarkan Indeks ISR

Kode	Perbankan Syariah	Skor ISR	π Skor ISR	% Skor ISR	
BMI	Bank Muamalat Indonesia	230	220	65%	63%
BSM	Bank Syariah Mandiri	191		54%	
BNIS	BNI Syariah	239		68%	
Perusahaan dalam JII					
UNVR	Unilever Indonesia	145	164,3	41%	47%
INDF	Indofood Sukses Makmur	178		51%	
KLBF	Kalbe Farma	170		48%	

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas, secara umum, dapat diketahui bahwa perolehan skor tertinggi ditempati oleh BNI Syariah yaitu sebesar 239 atau 68% sedangkan skor terendah ditempati oleh Unilever Indonesia yaitu sebesar 145 atau 41%. Jika dilihat dari jenis perusahaannya, skor tertinggi pada perbankan syariah juga ditempati oleh BNI Syariah dan terendah ditempati oleh Bank Syariah Mandiri dengan skor 191 (54%). Adapun pada perusahaan dalam JII, skor tertinggi ditempati oleh Indofood Sukses Makmur dengan skor 178 (51%) dan terendah juga ditempati oleh Unilever Indonesia. Sementara, berdasarkan skor rata-rata kedua perusahaan, perbankan syariah memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dalam JII, yaitu sebesar 220 atau 63% sedangkan perusahaan dalam JII hanya memperoleh skor 164,3 atau 47%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas *sustainability reporting* pada perbankan syariah berdasarkan Indeks ISR lebih baik dibanding perusahaan dalam JII.

Berdasarkan tabel di atas, kemudian dapat ditentukan predikat tingkat kualitas *sustainability reporting* masing-masing perusahaan sebagai berikut.

Tabel 4.2 Perbandingan Predikat Tingkat Kualitas *Sustainability Reporting* Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII Berdasarkan Indeks ISR

Jenis Perusahaan	Skor	Predikat
Perbankan Syariah		
Bank Muamalat Indonesia	65%	Kurang Informatif
Bank Syariah Mandiri	54%	Kurang Informatif
BNI Syariah	68%	Informatif
Perusahaan dalam JII		
Unilever Indonesia	41%	Tidak Informatif
Indofood Sukses Makmur	51%	Kurang Informatif
Kalbe Farma	48%	Tidak Informatif

Sumber: Data diolah peneliti

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya BNI Syariah memperoleh predikat informatif. Jika diurutkan, maka kualitas *sustainability reporting* yang paling baik berdasarkan indeks ISR adalah BNI Syariah disusul Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Indofood Sukses Makmur, Kalbe Farma dan terakhir ialah Unilever Indonesia. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, predikat pertama sampai ketiga yang semuanya ditempati oleh perbankan syariah, menunjukkan bahwa kualitas *sustainability reporting* pada perbankan syariah berdasarkan Indeks ISR lebih baik dibanding perusahaan dalam JII. Lebih tingginya perolehan skor dan predikat perbankan syariah menunjukkan bahwa, perbankan syariah telah cukup baik dalam melakukan pengungkapan aspek kesyariahnya dibandingkan perusahaan dalam JII. Hal ini wajar saja mengingat perbankan syariah merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya secara syariah, sementara perusahaan yang masuk dalam JII tidaklah demikian. Hanya saja perusahaan dalam JII, dalam menjalankan usahanya tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat masuk dalam JII.

Namun, berdasarkan tabel di atas, diketahui pula bahwa belum ada satu pun perusahaan yang mencapai predikat sangat informatif. Jika dilihat dari perolehan skor rata-rata, tingginya perolehan skor perbankan syariah dibanding perusahaan dalam JII rupanya masih belum mencapai skor yang maksimal, bahkan tergolong rendah, yakni hanya 63%. Skor ini menunjukkan bahwa predikat perbankan syariah tergolong kurang informatif. Sementara perusahaan dalam JII yang memperoleh skor rata-rata sebesar 47% menunjukkan bahwa kualitas *sustainability reporting*-nya berpredikat tidak informatif.

Raditya (2012) mengungkapkan bahwa skor indeks ISR yang rendah tidak dapat mutlak disalah artikan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah dengan baik. Lanjut Raditya (2012), hal ini karena terdapat dua kemungkinan, yakni perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab sosial secara syariah akan tetapi tidak diungkapkan dalam laporan-laporannya atau perusahaan tersebut memang tidak melakukan tanggung jawab sosial secara syariah. Kemungkinan lainnya dapat disebabkan oleh rendahnya pengungkapan perbankan syariah pada kategori-kategori tertentu dalam indeks ISR, terutama kategori lingkungan. Sehingga, perlu untuk melihat perbandingan tingkat pengungkapan masing-masing perusahaan secara lebih detail melalui masing-masing kategori dalam indeks ISR.

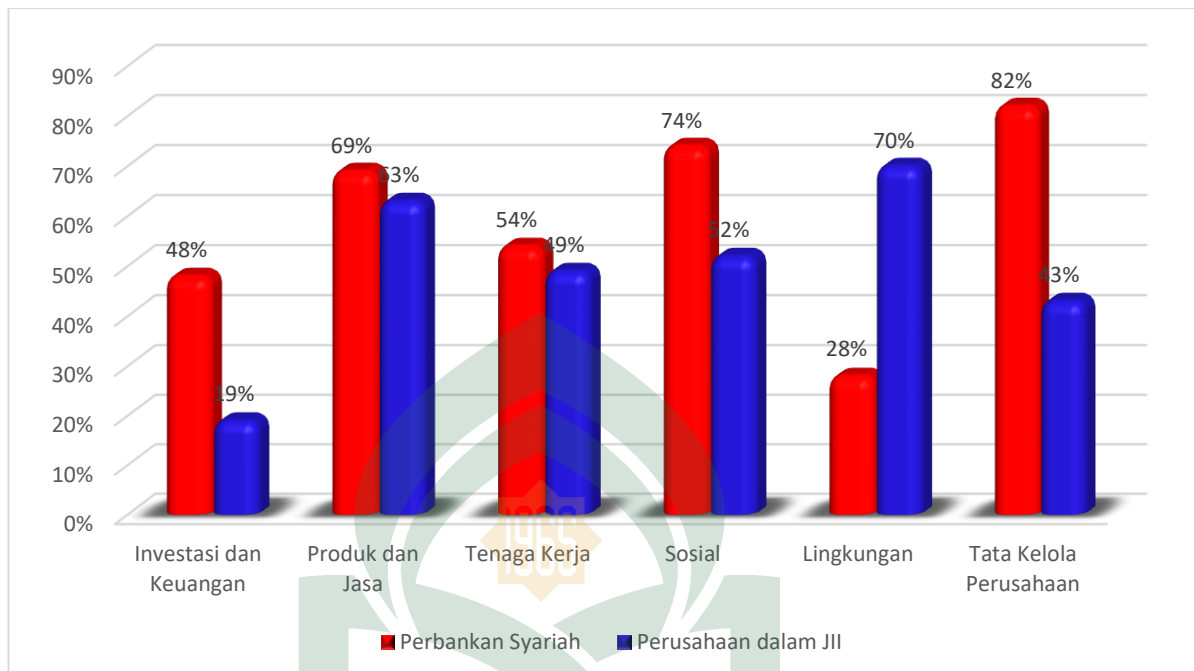
Tabel 4.3 Perbandingan Persentase Total Skor Pengungkapan *Sustainability Reporting* Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per-Kategori berdasarkan Indeks ISR

Kategori Indeks ISR		Perbankan Syariah			Perusahaan dalam JII		
		BMI	BSM	BNIS	UNVR	INDF	KLBF
1	Investasi dan Keuangan	55%	40%	48%	3%	25%	30%
2	Produk dan Jasa	65%	63%	80%	68%	58%	63%
3	Tenaga Kerja	50%	58%	55%	56%	45%	47%
4	Sosial	75%	64%	84%	52%	61%	43%
5	Lingkungan	25%	35%	23%	80%	78%	53%
6	Tata Kelola Perusahaan	92%	61%	93%	24%	51%	55%

Sumber: Data diolah peneliti

Untuk lebih memudahkan melihat perbandingan pengungkapan *sustainability reporting* kedua jenis perusahaan, maka dapat dibuatkan grafik perbandingan rata-rata skor kedua jenis perusahaan sebagai berikut.

Grafik 4.1 Perbandingan Rata-rata Pengungkapan Sustainability Reporting Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per-Kategori Indeks ISR



Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa kategori lingkungan merupakan kategori dengan skor terendah yang diperoleh oleh perbankan syariah. Skor sebesar 28% membuat kategori ini berpredikat tidak informatif. Hal ini wajar saja karena operasional perbankan syariah yang tidak berhubungan langsung dengan lingkungan seperti pada perusahaan manufaktur yang mengakibatkan polusi udara, pencemaran lingkungan dan akibat buruk lainnya. Karena operasionalnya yang tidak berhubungan langsung dengan lingkungan, menyebabkan pula minimnya tekanan dari *stakeholder* terhadap perbankan syariah, sehingga membuat perusahaan tidak terlalu perlu mengungkapkan atau melakukan banyak hal.

Jika dilihat berdasarkan tiga atribut pegelompokan *stakeholder* yang dikembangkan oleh Mitchell, Agle and Wood (1997) dalam teori *stakeholder*, yaitu

atribut kekuatan, atribut legitimasi dan atribut urgensi, minimnya perhatian perbankan syariah pada lingkungan disebabkan oleh kurangnya pengaruh atribut kekuatan. Sebagaimana yang dikatakan Fahriza (2014), bahwa meskipun atribut kekuatan, legitimasi dan urgensi saling terkait dalam mempengaruhi pengambilan keputusan oleh perusahaan, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah atribut kekuatan. Pengambilan keputusan dalam hal ini termasuk aktivitas CSR apa yang akan dilakukan dan seberapa besar dilakukan. Walaupun demikian, seharusnya hal tersebut tidak menjadi batasan bagi perbankan syariah untuk tidak memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.

Pelestarian lingkungan hidup oleh industri perbankan syariah merupakan suatu hal yang wajib untuk ditunaikan. Hal ini karena Islam sangat menganjurkan kepada semua umat manusia untuk bisa menjaga dan memanfaatkan bumi beserta isinya dengan bijak sebagai tanda syukur atas semua sumber daya alam yang telah Allah SWT limpahkan kepada manusia. Hal ini terkait pula dengan perintah Allah yang melarang manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi, melainkan agar manusia menjadi *rahmatan lil 'alamiin* (rahmat bagi sekalian alam). Selain itu, pelestarian lingkungan juga termasuk bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholder* ketiga dalam *syariah enterprise theory*, yaitu alam. *Stakeholder* ketiga yaitu alam, adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi hidup matinya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan secara fisik ada karena didirikan di atas bumi, berproduksi dan menggunakan energi yang dihasilkan oleh alam. Alam kemudian menginginkan bentuk kepedulian berupa,

pelestarian alam, pencegahan terhadap pencemaran dan sebagainya. Sehingga, perbankan syariah diharapkan dapat melakukan yang “lebih” untuk alam.

Walaupun secara kategori, pengungkapan perbankan syariah untuk lingkungan sangat rendah, namun jika dilihat berdasarkan item yang diungkapkan, terdapat dua item dalam kategori lingkungan yang diungkapkan perbankan syariah dengan cukup baik. Kedua item tersebut ialah item perbaikan dan pembuatan sarana umum yang mencapai skor maksimal, serta item konservasi lingkungan hidup yang memperoleh skor cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah berusaha memenuhi tanggungjawabnya kepada *stakeholder* ketiga serta menjadi *rahmatan lil 'alamiin*. Lain halnya dengan perusahaan dalam JII, kategori lingkungan justru merupakan kategori yang memperoleh skor tertinggi dalam indeks ISR.

Kategori lingkungan pada perusahaan dalam JII memperoleh skor sebesar 70% yang menjadikan kategori ini berpredikat informatif. Perusahaan dalam JII merupakan perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari sangat berhubungan erat dengan lingkungan hidup sekitar, baik dalam hal penggunaan bahan baku maupun pembuangan limbah ke lingkungan. Hal inilah yang menyebabkan tingginya skor perusahaan dalam JII untuk kategori lingkungan, karena perusahaan bertanggungjawab besar pada lingkungannya.

Jika dilihat dengan teori *stakeholder*, tingginya pengungkapan lingkungan perusahaan dalam JII karena dipengaruhi oleh ketiga tipe *stakeholder*, yaitu *stakeholder* dengan atribut kekuatan, legitimasi dan urgensi. *Stakeholder* dengan atribut kekuatan dalam hal ini dapat berupa tekanan/kekuatan dari regulator berupa

undang-undang tanggung jawab lingkungan, *stakeholder* dengan atribut legitimasi dapat berupa masyarakat sekitar maupun masyarakat luas termasuk konsumen. Sementara *stakeholder* dengan atribut urgensi dapat berupa masyarakat sekitar yang terkena langsung dampak negatif perusahaan, sehingga memiliki kepentingan yang mendesak untuk segera direspon perusahaan. Namun, tanggung jawab lingkungan perusahaan dalam JII tidak sekedar hanya memenuhi keinginan para *stakeholder*-nya, melainkan telah lebih baik dari kewajibannya.

Teori *stakeholder* menurut yang dikemukakan Rusdianto (2013) menyatakan bahwa perusahaan akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. Hal ini pun sejalan dengan teori komunikasi aksi Habermas yang menyatakan bahwa interaksi sosial yang dilakukan perusahaan tidak hanya mengarah pada interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem (*system mechanism*) melainkan juga pada interaksi yang berdasarkan kebutuhan sosial (*lifeworld*). Interaksi karena mekanisme sistem ini dilakukan karena adanya unsur keterpaksaan dan terjadi tidak dalam suasana *communicative action*, yang terutama dipengaruhi oleh *steering* media, yaitu *money* (pertimbangan ekonomis/untung dan rugi) dan *power* (tekanan intitusi dan birokrasi).

Interaksi yang dilakukan perusahaan dalam JII sudah mulai mengarah pada interaksi yang berdasarkan kebutuhan sosial (*lifeworld*). Perusahaan dalam JII telah cukup baik dalam mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan dan telah berupaya memperbaiki serta melestarikannya, yang juga terlihat dari tingginya

perolehan skor untuk kategori lingkungan ini. Tingginya perolehan skor perusahaan dalam JII menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab lingkungannya sekaligus tanggung jawab kepada *stakeholder* ketiga (alam) dengan cukup baik. Hal ini sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan terhadap amanat Allah untuk bisa menjaga dan memanfaatkan bumi beserta isinya dengan bijak.

Sementara, kategori yang mendapat skor tertinggi pada perbankan syariah ialah kategori tata kelola perusahaan. Skor untuk kategori ini sebesar 82% dan telah mencapai predikat sangat informatif. Hal ini karena, kategori ini memenuhi unsur kepatuhan, sehingga diungkapkan dengan sangat baik oleh setiap perusahaan. Kepatuhan dalam hal ini dapat berupa kepatuhan kepada Allah/Syariah maupun kepada regulator/pemerintah. Tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan indeks ISR menandakan bahwa perusahaan telah melaksanakan kepatuhannya tidak hanya pada regulator/pemerintah tetapi juga kepada Allah/Syariah. Tingginya perolehan skor perbankan syariah, telah cukup untuk menggambarkan kepatuhan perusahaan terhadap regulator/pemerintah terutama kepada Allah/Syariah. Hal ini sesuai dengan *syariah enterprise theory*, bahwa *stakeholder* tertinggi adalah Allah sebagai pusat. Manusia hanya sebagai wakil-Nya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Allah (Hafida, 2012).

Berbeda halnya menurut pandangan teori *stakeholder*. Tingginya tata kelola perusahaan dipandang lebih dipengaruhi oleh *stakeholder* dengan atribut kekuatan, terutama oleh regulator dan pemegang saham. Sebagaimana pernyataan Ghazali dan Chariri (2007) yang menyatakan bahwa, semakin besar atribut kekuatan

stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi memenuhi keinginan *stakeholder*-nya. Hal ini sejalan pula dengan dengan teori komunikasi aksi Habermas. Jika dilihat dari mekanisme sistem, tingginya pengungkapan kategori tata kelola perusahaan ini terlebih karena adanya tekanan intitusi dan birokrasi (*media power*). Namun, menurut pandangan Habermas, baiknya pengungkapan kategori ini menunjukkan bahwa, interaksi sosial yang terjadi antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya tidaklah hanya terbatas pada konsep mekanisme sistem saja, melainkan juga termasuk dalam konsep *lifeworld*.

Kategori tata kelola perusahaan ini pada perusahaan dalam JII justru memperoleh skor yang terbilang cukup rendah, yaitu sebesar 43%, sehingga berpredikat tidak informatif. Hal ini disebabkan oleh absennya item-item status kepatuhan terhadap syariah, profil dan kinerja DPS serta pernyataan kegiatan dilarang, yang memang wajar tidak dimiliki oleh perusahaan manufaktur seperti perusahaan dalam JII. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memprioritaskan tanggungjawabnya kepada Allah sebagai *stakeholder* tertinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan tata kelola perusahaan dalam JII terbatas hanya sebagai bentuk tanggung jawab karena tekanan *media power* berupa tanggung jawab pada *stakeholder* dengan atribut kekuatan. Meskipun tanggung jawab perusahaan dalam JII kepada *stakeholder* tertinggi tidak dijadikan prioritas, namun tanggung jawab kepada *stakeholder* kedua, yaitu manusia, telah dilakukan dengan cukup baik.

Bentuk tanggung jawab perusahaan dalam JII kepada *stakeholder* kedua ditunjukkan dengan tingginya perolehan skor untuk kategori produk dan jasa,

sosial, serta tenaga kerja. Tidak terkecuali pada perusahaan dalam JII, skor yang tinggi juga diperoleh oleh perbankan syariah untuk kategori-kategori tersebut. Untuk kategori produk dan jasa, menempati urutan kedua pada perusahaan dalam JII dengan skor sebesar 63% dan berpredikat kurang informatif, sementara pada perbankan syariah menempati urutan ketiga namun dengan skor yang lebih tinggi, yaitu sebesar 69%, sehingga berpredikat informatif. Predikat kurang informatif pada perusahaan dalam JII disebabkan karena tidak semua perusahaan mengungkapkan item status kehalalan suatu produk, kecuali Indofood. Walaupun demikian, pengungkapan untuk item lainnya telah diungkapkan dengan baik. Kategori produk dan jasa ini terkait dengan hubungan perusahaan dengan konsumennya.

Kategori sosial (masyarakat), menempati urutan ketiga pada perusahaan dalam JII dan kedua pada perbankan syariah. Skor untuk kategori ini pada perusahaan dalam JII sebesar 52% yang juga berpredikat kurang informatif, sementara skor pada perbankan syariah sebesar 74%, sehingga berpredikat informatif. Predikat kurang informatif pada perusahaan dalam JII juga disebabkan karena tidak diungkapkannya item-item terkait syariah oleh setiap perusahaan, seperti wakaf dan *qardhul hasan*. Sementara kategori tenaga kerja menempati urutan keempat pada kedua jenis perusahaan. Dengan skor perusahaan dalam JII sebesar 49% yang berpredikat tidak informatif dan untuk perbankan syariah sebesar 54% dengan predikat kurang informatif. Predikat tidak informatif dan kurang informatifnya kedua jenis perusahaan, juga disebabkan oleh tidak diungkapkannya item-item terkait syariah oleh setiap perusahaan, seperti pemberian izin beribadah

bagi karyawan Muslim. Item-item ini kemungkinan besar dilakukukan, namun tidak diungkapkan. Meskipun demikian, khusus untuk perusahaan dalam JII, pengungkapan item-item lainnya untuk kedua kategori ini telah dilakukan perusahaan dengan cukup baik.

Cukup baiknya pengungkapan untuk ketiga kategori ini, khususnya pada perbankan syariah, karena interaksi perusahaan dengan *stakeholder*-nya lebih dipengaruhi oleh mekanisme sistem, yang terutama dipengaruhi oleh *steering media money* (pertimbangan ekonomis/untung dan rugi). Konsumen dan karyawan sebagai pihak yang berkontribusi besar bagi kelangsungan perusahaan, serta masyarakat sebagai pihak yang dapat memberi dukungan kepada perusahaan sekaligus dapat memberi penolakan jika dirasa aktivitas perusahaan merugikannya. Tingginya pengungkapan ketiga kategori tersebut menunjukkan bahwa perusahaan lebih dipengaruhi oleh *stakeholder* dengan atribut legitimasi.

Khusus untuk *stakeholder* masyarakat, selain memiliki atribut legitimasi juga memiliki atribut urgensi, yang menuntut untuk diberikan perhatian sesegera mungkin. Sehingga, menurut pandangan Ghozali dan Chariri (2007) terkait teori *stakeholder* ini, bahwa perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai pengaruh besar (*power*) terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misalnya tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. Lanjut Ghozali dan Chariri (2007) bahwa dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholders*-nya.

Baiknya pengungkapan ketiga kategori tersebut juga dapat dimaknai bahwa interaksi kedua jenis perusahaan kepada *stakeholders*-nya tidak sekedar dipengaruhi oleh mekanisme sistem saja, melainkan mulai mengarah pada konsep *lifeworld*. Hal ini karena, tanggung jawab sosial yang dilakukan kedua perusahaan tidaklah sekedar pemberian bantuan sosial saja kepada masyarakat dan gaji semata pada pekerja serta penyediaan produk bermanfaat bagi konsumen, melainkan telah melebihi hal tersebut. Perusahaan telah memberi bantuan sosial berupa program-program pemberdayaan masyarakat yang bersifat berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di samping pemberian bantuan ekonomi langsung.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik ini menunjukkan pula bahwa perusahaan sangat menyadari tanggung jawab sosialnya dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat adalah bagian penting dari ISR. Perusahaan juga telah sangat baik dalam hal kesejahteraan pekerjanya, serta telah memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya. Hal ini pun didukung oleh pernyataan yang telah dikemukakan Rusdianto (2013) sebelumnya, bahwa perusahaan akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah mendukung pernyataan awal bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan cukup baik kepada *stakeholder* kedua (manusia), baik konsumen dan karyawan yang tergolong sebagai

direct stakeholder (memberikan kontribusi langsung) maupun kepada masyarakat sebagai *indirect stakeholder* (tidak memberikan kontribusi langsung).

Kategori terakhir adalah kategori investasi dan keuangan. Kategori ini rupanya memperoleh skor yang cukup rendah bagi kedua jenis perusahaan, bahkan terendah pada perusahaan dalam JII. Skor untuk kategori ini pada perusahaan dalam JII hanya sebesar 19%, sehingga berpredikat tidak informatif. Rendahnya pengungkapan kategori ini pada perusahaan dalam JII diketahui karena absennya item-item terkait transaksi keuangan yang sesuai syariah, seperti ada tidaknya aktivitas riba, *gharar* dan zakat, serta aktivitas keuangan lainnya. Kategori ini memang didominasi oleh aktivitas yang dilakukan pada lembaga keuangan seperti perbankan. Sehingga, wajar bila perusahaan dalam JII tidak mengungkapkan sebagian besar item dalam kategori ini karena operasionalnya yang bukan lembaga keuangan. Sementara pada perbankan syariah sendiri, skor untuk kategori ini sebesar 48% yang juga berpredikat tidak informatif. Cukup disayangkan, perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan syariah, memperoleh skor yang rendah untuk kategori keuangan.

Cukup rendahnya pengungkapan kategori investasi dan keuangan pada perbankan syariah disebabkan oleh rendahnya pengungkapan terhadap aktivitas-aktivitas bank yang dapat mengundang kritik. Aktivitas perbankan syariah yang dapat mengundang kritik ini dalam indeks ISR berupa aktivitas riba, *gharar*, dan kebijakan untuk mengatasi nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Hal ini sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian Maali (2006), bahwa bank-bank syariah di beberapa negara Islam yang dijadikan sampel

penelitiannya tidak melakukan pengungkapan atas aktivitas ini karena dapat merusak “*image*” bank. Bank lebih banyak mengungkapkan mengenai aktivitas-aktivitas sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi “*image*” bank.

Seperti halnya pada penelitian Fitria dan Dwi (2010), meskipun perbankan syariah dalam penelitian ini tidak mengungkapkan aktivitas *gharar* sama sekali, tetapi perbankan syariah tetap melakukan pengungkapan untuk item aktivitas riba dan kebijakan untuk mengatasi nasabah yang gagal bayar, walaupun tidak dijelaskan lebih rinci berapa persentase kontribusi riba dari profit dan persentase biaya tambahan yang dikenakan untuk masing-masing debitur yang gagal bayar. Pengungkapan terbatas hanya pada jumlah seluruh denda (biaya tambahan) yang kemudian dijadikan sebagai sumber bagi dana kebajikan (*qardhul hasan*). Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah cukup baik melakukan pengungkapan terkait item denda tersebut walaupun hal ini dapat dapat merusak “*image*” bank sendiri. Hal ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan prinsip kejujuran perbankan syariah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah sebagai *stakeholder* tertinggi atas amanah yang telah diberikan sebagai *khalitullah fil ardh*.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, diketahui bahwa terdapat perbedaan predikat antara perolehan skor rata-rata perusahaan dengan skor per kategori dalam indeks ISR. Meskipun perolehan skor rata-rata kedua jenis perusahaan berpredikat kurang informatif (perbankan syariah) dan tidak informatif (perusahaan dalam JII), namun berdasarkan skor per kategori dapat mencapai predikat sangat informatif.

Tabel 4.4 Perbandingan Predikat Tingkat Kualitas *Sustainability Reporting* Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per Kategori berdasarkan Indeks ISR

Kategori Indeks ISR		Perbankan Syariah		Perusahaan dalam JII	
		Skor	Peringkat	Skor	Peringkat
1	Investasi dan Keuangan	48%	Tidak Informatif	19%	Tidak Informatif
2	Produk dan Jasa	69%	Informatif	63%	Kurang Informatif
3	Tenaga Kerja	54%	Kurang Informatif	49%	Tidak Informatif
4	Sosial	74%	Informatif	52%	Kurang Informatif
5	Lingkungan	28%	Tidak Informatif	70%	Informatif
6	Tata Kelola Perusahaan	82%	Sangat Informatif	43%	Tidak Informatif

Sumber: Data diolah peneliti

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbankan syariah cukup rendah dalam mengungkapkan kategori investasi dan keuangan, lingkungan serta tenaga kerja. Sementara pada perusahaan dalam JII, semua kategori kecuali kategori lingkungan diungkapkan dengan cukup rendah oleh perusahaan. Rendahnya pengungkapan sejumlah kategori tertentu ini dapat menjadi hambatan untuk menjadikan indeks ISR sebagai pedoman yang baku yang dapat diterapkan pada entitas syariah. Belum baku dan populernya indeks ISR sebagai pedoman di Indonesia menjadikan perbankan syariah tidak memaksimalkan bahkan mengabaikan pengungkapan untuk item-item tertentu. Sementara pada perusahaan dalam JII, indeks ISR sulit dijadikan sebagai pedoman karena basis perusahaan yang bukan perusahaan syariah. Sehingga untuk memaksimalkan pengungkapan perusahaan, indeks ISR harus menjadi pedoman baku dengan item-item lebih luas sehingga dapat digunakan oleh perusahaan yang tidak berbasis syariah sekalipun.

C. Perbandingan Kualitas Sustainability Reporting Perbankan Syariah dan Perusahaan terdaftar JII berdasarkan Indeks GRI

Berdasarkan hasil skoring yang telah dilakukan, berikut ini akan disajikan bagaimana perbandingan pengungkapan *sustainability reporting* pada perbankan syariah dan perusahaan dalam JII berdasarkan indeks GRI.

Tabel 4.5 Perbandingan Total Skor Pengungkapan Sustainability Reporting Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII berdasarkan Indeks GRI

Kode	Perbankan Syariah	Skor GRI	π Skor GRI	% Skor GRI	
BMI	Bank Muamalat Indonesia	82	73	23%	20%
BSM	Bank Syariah Mandiri	59		16%	
BNIS	BNI Syariah	78		21%	
Perusahaan dalam JII					
UNVR	Unilever Indonesia	141	98,3	39%	27%
INDF	Indofood Sukses Makmur	71		20%	
KLBF	Kalbe Farma	83		23%	

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa perolehan skor tertinggi ditempati oleh Unilever Indonesia yaitu sebesar 141 (39%) dan terendah ditempati oleh Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar 59 (16%). Jika dilihat dari jenis perusahaannya, skor tertinggi pada perbankan syariah ditempati oleh Bank Muamalat Indonesia dengan skor 82 (23%) dan terendah juga ditempati oleh Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar 59 (16%). Adapun pada perusahaan dalam JII, skor tertinggi juga ditempati oleh Unilever Indonesia dengan skor 141 (39%) dan terendah ditempati oleh Indofood Sukses Makmur dengan skor 71 (20%). Dapat diketahui pula bahwa, berdasarkan skor rata-rata, perusahaan dalam JII memperoleh skor lebih tinggi, yaitu sebesar 98,3 (27%) dibanding perbankan

syariah yang hanya memperoleh skor 73 (20%). Walaupun dengan perbedaan skor yang tidak mencolok, hasil-hasil skor tersebut tetap menunjukkan bahwa kualitas *sustainability reporting* perusahaan dalam JII berdasarkan indeks GRI lebih unggul dibanding perbankan syariah. Hasil ini ternyata merupakan kebalikan dari hasil skoring sebelumnya yang menggunakan indeks ISR, yang menempatkan perbankan syariah lebih unggul dibanding perusahaan dalam JII.

Berdasarkan informasi pada tabel 4.5 pula, maka selanjutnya dapat ditentukan predikat tingkat kualitas *sustainability reporting* masing-masing perusahaan berdasarkan indeks GRI. Berdasarkan perolehan skor rata-rata, kualitas *sustainability reporting* masing-masing perusahaan baik perbankan syariah maupun perusahaan dalam JII tidak ada satu pun yang mencapai predikat informatif. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Perbandingan Predikat Tingkat Kualitas *Sustainability Reporting* Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII Berdasarkan Indeks GRI

Jenis Perusahaan	Skor	Predikat
Perbankan Syariah		
Bank Muamalat Indonesia	23%	Tidak Informatif
Bank Syariah Mandiri	16%	Tidak Informatif
BNI Syariah	21%	Tidak Informatif
Perusahaan dalam JII		
Unilever Indonesia	39%	Tidak Informatif
Indofood Sukses Makmur	20%	Tidak Informatif
Kalbe Farma	23%	Tidak Informatif

Sumber: Data diolah peneliti

Lebih tingginya perolehan skor perusahaan dalam JII pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa, perusahaan dalam JII telah cukup baik dalam melakukan

pengungkapan *sustainability reporting*-nya sesuai pedoman dalam indeks GRI dibandingkan perbankan syariah. Hal ini wajar saja melihat item-item dalam indeks GRI yang lebih diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur seperti perusahaan dalam JII. Sebagaimana dikatakan Rahma (2012) bahwa, hal ini terutama disebabkan adanya beberapa item yang memang tidak mungkin dipenuhi industri perbankan syariah. Namun, terlepas dari hal tersebut, tingginya perolehan skor perusahaan dalam JII dibanding perbankan syariah rupanya masih belum mencapai skor yang maksimal, bahkan tergolong sangat rendah, yakni hanya 27%, sehingga memperoleh predikat tidak informatif.

Rendahnya kualitas *sustainability reporting* perusahaan dalam JII dapat disebabkan oleh rendahnya pengungkapan pada kategori-kategori tertentu dalam indeks GRI. Indeks GRI merupakan indeks yang memiliki item-item sangat spesifik dalam setiap kategorinya yang juga disertai penjelasan rinci untuk memudahkan para pembuat laporan yang menggunakannya. Sehingga, sulit untuk memberi skor tinggi pada setiap item yang diungkapkan masing-masing perusahaan jika kurang sesuai dengan apa yang dimaksud dari penjelasan setiap item dalam indeks GRI.

Rata-rata pengungkapan masing-masing kategori dalam indeks GRI oleh kedua jenis perusahaan bahkan tidak ada yang mencapai 50%. Walaupun kedua jenis perusahaan berpedoman pada GRI dalam pembuatan laporannya, rupanya hal ini pun tidak menjamin perusahaan akan memperoleh skor yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua jenis perusahaan belum maksimal dalam berpedoman pada GRI. Namun, hal ini tidak lantas menjadikan pengungkapan kedua jenis perusahaan dianggap buruk. Sehingga, untuk lebih mempertajam

analisa, perlu untuk melihat perbandingan pengungkapan masing-masing perusahaan per-kategori dalam indeks GRI.

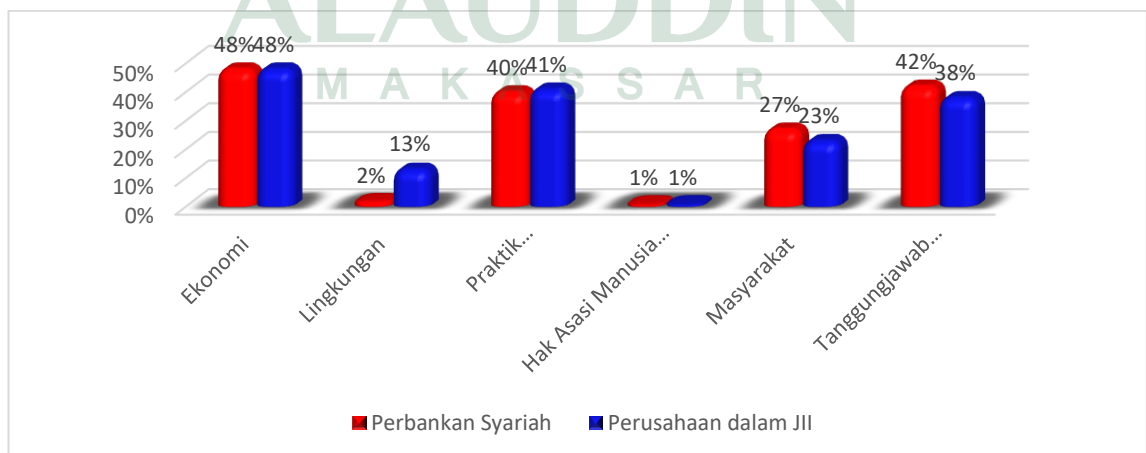
Tabel 4.7 Perbandingan Persentase Total Skor Pengungkapan *Sustainability Reporting* Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per-Kategori Indeks GRI

Kategori Indeks GRI		Perbankan Syariah			Perusahaan dalam JII		
		BMI	BSM	BNIS	UNVR	INDF	KLBF
1	Ekonomi	53%	42%	50%	36%	61%	47%
2	Lingkungan	0%	1%	4%	46%	12%	15%
3	Sosial :						
3.1.	Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja	42%	36%	42%	59%	33%	34%
3.2.	Hak Asasi Manusia (HAM)	0%	4%	0%	2%	0%	0%
3.3.	Masyarakat	34%	16%	30%	23%	9%	25%
3.4.	Tanggungjawab atas Produk	58%	28%	39%	44%	22%	33%

Sumber: Data diolah peneliti

Perbandingan total skor kedua perusahaan per-kategori tersebut kemudian dapat dibuat ilustrasi berupa grafik untuk lebih memudahkan melihat perbandingan masing-masing kategori.

Grafik 4.2 Perbandingan Rata-rata Pengungkapan *Sustainability Reporting* Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per-Kategori Indeks GRI



Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diketahui bahwa kategori HAM merupakan kategori dengan skor terendah untuk kedua jenis perusahaan. Rata-rata pengungkapan kategori ini hanya memperoleh skor 1% dan sekaligus berpredikat tidak informatif. Hal ini dapat terjadi karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu memang tidak terjadi aktivitas-aktivitas yang dimaksud kategori ini dalam perusahaan, berupa pelanggaran terhadap HAM. Kategori HAM dalam indeks GRI juga memiliki item-item yang terlalu spesifik dan sangat jarang mendapat perhatian perusahaan sehingga tidak diungkapkan. Alasan lainnya bahwa, item HAM merupakan hal yang cukup privasi bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk menjaga privasi dan melindungi *image*-nya agar tidak buruk.

Rendahnya pengungkapan untuk kategori HAM ini bila dipandang dari teori *stakeholder* terjadi karena rendahnya pengaruh atribut kekuatan dan atribut urgensi yang dimiliki *stakeholder* yang terkandung dalam kategori ini. Sejalan dengan hal tersebut, menurut teori komunikasi aksi, interaksi perusahaan terkait masalah HAM merupakan interaksi yang dipengaruhi oleh media *money* (pertimbangan ekonomis/untung dan rugi). Masalah HAM tidak terlalu menjadi perhatian serius *stakeholder*, sehingga tidak memberi keuntungan jika diungkapkan. Padahal, pengungkapan mengenai HAM penting untuk perusahaan, karena akan berpengaruh signifikan pada informasi yang nantinya akan disampaikan kepada *stakeholder* dan *shareholder* dalam mempertahankan kepercayaan mereka terhadap perusahaan.

Jika sebelumnya kedua jenis perusahaan memperoleh skor yang sama untuk kategori pengungkapan terendah (HAM), kedua jenis perusahaan juga memperoleh skor yang sama untuk kategori pengungkapan tertinggi, yaitu kategori ekonomi. Skor rata-rata pengungkapan untuk kategori ekonomi ini ialah sebesar 48%. Meskipun terlihat cukup rendah, namun jika dilihat pada masing-masing perusahaan, terdapat beberapa perusahaan yang mengungkapkan kategori ini di atas 50%, yaitu Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah dan Indofood Sukses Makmur. Sehingga, kategori ini memperoleh predikat kurang informatif, setidaknya tidak terlalu buruk dibanding predikat tidak informatif. Tingginya pengungkapan untuk kategori ini dapat terjadi karena jumlah item dalam kategori ini yang lebih sedikit dibanding kategori lainnya, serta item-itemnya pun merupakan item yang mudah untuk diungkapkan perusahaan.

Berdasarkan teori komunikasi aksi, interaksi perusahaan terkait masalah ekonomi juga merupakan interaksi yang dipengaruhi oleh media *money*. Pengungkapan perusahaan yang lebih baik untuk kategori ini dianggap untuk meningkatkan *image*-nya di mata *stakeholder* dan *shareholder* yang ditunjukkan dengan pengungkapan item kinerja ekonomi yang baik serta adanya dampak ekonomi tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut teori *stakeholder* pun, lebih baiknya pengungkapan kategori ini karena adanya pengaruh *stakeholder* dengan atribut kekuatan, berupa pengungkapan kinerja ekonomi yang lebih baik pada *shareholder*. Serta adanya pengaruh *stakeholder* dengan atribut legitimasi (masyarakat).

Kategori selanjutnya yang menempati urutan kedua dan ketiga untuk perusahaan dalam JII ialah kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja dan kategori tanggungjawab atas produk. Dengan skor masing-masing sebesar 42% dan 33%. Sebaliknya, kedua kategori tersebut berada pada urutan ketiga (40%) dan kedua (42%) untuk perbankan syariah. Kedua kategori ini merupakan sub-kategori dari kategori sosial. Tidak berbeda dengan kategori sebelumnya, kedua kategori ini juga memperoleh skor cukup rendah, sehingga berpredikat tidak informatif meskipun berada pada urutan kedua dan ketiga. Rendahnya kedua kategori ini disebabkan absennya sejumlah item dalam masing-masing kategori. Pada kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, item yang tidak diungkapkan di antaranya terkait kesehatan dan keselamatan kerja, berupa resiko dan cedera pekerja. Item-item ini tidak diungkapkan perusahaan terutama perusahaan dalam JII dianggap karena dapat memperburuk *image* perusahaan. Sementara item lainnya yang juga tidak diungkapkan ialah item terkait *gender* berupa item cuti melahirkan dan item kesetaraan remunerasi laki-laki dan perempuan. Item-item ini mungkin dilakukan perusahaan namun tidak diungkapkan karena dianggap tidak menjadi perhatian *stakeholder*.

Namun, di luar hal tersebut, masing-masing perusahaan telah cukup baik dalam pemberian pelatihan dan pendidikan serta tunjangan kepada karyawannya. Khusus bagi perbankan syariah, perbankan syariah telah mengungkapkan dengan baik item pengaduan masalah ketenagakerjaannya. Selain itu, dalam kategori tanggung jawab atas produk, perbankan syariah juga telah melakukan penanganan yang baik atas keluhan nasabahnya. Masalah kesehatan dan keselamatan pelanggan

pun diperhatikan dengan sangat baik oleh kedua jenis perusahaan. Namun, untuk item-item terkait insiden ketidakpatuhan tidak diungkapkan oleh kedua jenis perusahaan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, kedua jenis perusahaan hanya akan mengungkapkan dengan baik item-item yang menguntungkannya, berupa item yang dapat meningkatkan *image* perusahaan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam teori komunikasi aksi, pengungkapan kedua kategori tersebut oleh perusahaan dilakukan semata karena pertimbangan ekonomis/untung rugi (*media money*). Pengungkapan yang dilakukan perusahaan dipandang sebagai pengaruh dari *stakeholder* dengan atribut legitimasi, berupa keinginan legitimasi dari karyawan dan konsumen. Hal ini pun menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya bertanggungjawab kepada *stakeholder* kedua.

Kategori selanjutnya dalam indeks GRI yang berada pada urutan keempat dan kelima untuk perusahaan dalam JII ialah kategori lingkungan dan kategori masyarakat. Seperti sebelumnya, urutan kedua kategori ini untuk perbankan syariah merupakan sebaliknya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam indeks ISR, wajar saja jika perbankan syariah memperoleh skor sangat rendah untuk kategori lingkungan. Namun, perusahaan dalam JII yang sebelumnya memperoleh skor tertinggi untuk kategori yang sama dalam indeks ISR, justru memperoleh skor yang cukup rendah dalam indeks GRI yang terutama lebih banyak menyangkut aktivitas lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena sangat banyak dan kompleksnya item-item dalam kategori lingkungan ini, yang kemungkinan tidak dilakukan ataupun tidak dapat diungkapkan perusahaan, terutama untuk item-item keanekaragaman hayati.

Sementara, untuk kategori masyarakat, kedua jenis perusahaan juga mendapat skor yang tergolong sangat rendah. Seperti sebelumnya, hal ini berbanding terbalik dengan tingginya perolehan skor perusahaan berdasarkan indeks ISR untuk kategori yang sama. Hal ini diketahui terjadi karena item-item dalam indeks GRI ini sangat berbeda dengan indeks ISR. Item-item dalam kategori masyarakat pada indeks GRI lebih menyangkut masalah kepatuhan, anti korupsi dan persaingan serta item-item lainnya yang kemungkinan tidak dilakukan perusahaan sehingga tidak diungkapkan. Dengan demikian, berdasarkan indeks GRI, pengungkapan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* kedua (manusia) dan ketiga (alam) dinilai cukup rendah.

Pemaparan-pemaparan di atas menunjukkan bahwa, perolehan skor kedua jenis perusahaan baik berdasarkan total skor dan maupun rata-rata skor per kategori sama-sama memperoleh predikat tidak informatif. Hal ini berbeda dengan perolehan predikat kedua jenis perusahaan berdasarkan indeks ISR sebelumnya. Kerangka yang disediakan GRI ini didesain untuk digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya, yang memperhatikan pertimbangan praktis yang dihadapi oleh berbagai macam organisasi, dari perusahaan kecil sampai kepada perusahaan yang memiliki operasi ekstensif dan tersebar di berbagai lokasi (GRI, 2013). Sehingga, perbankan syariah sebagai perusahaan dengan sektor keuangan hanya mampu mengungkapkan informasi yang terbatas sesuai sektor usahanya. Adapun perbandingan predikat kedua jenis perusahaan per kategori indeks GRI dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.8 Perbandingan Predikat Tingkat Kualitas *Sustainability Reporting* Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per Kategori berdasarkan Indeks GRI

Kategori Indeks GRI		Perbankan Syariah		Perusahaan dalam JII		
		Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	
1	Ekonomi	48%	Tidak Informatif	48%	Tidak Informatif	
2	Lingkungan	2%	Tidak Informatif	25%	Tidak Informatif	
3	Sosial	3.1 Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja	40%	Tidak Informatif	42%	Tidak Informatif
		3.2 Hak Asasi Manusia (HAM)	1%	Tidak Informatif	1%	Tidak Informatif
		3.3 Masyarakat	27%	Tidak Informatif	19%	Tidak Informatif
		3.4 Tanggungjawab atas Produk	42%	Tidak Informatif	33%	Tidak Informatif

Sumber: Data diolah peneliti

Tidak maksimal bahkan rendahnya pengungkapan kedua jenis perusahaan dengan indeks GRI meskipun telah berpedoman pada indeks GRI terjadi karena berbagai alasan. Item-item seperti pengungkapan ketidakpatuhan, pengaduan insiden tertentu serta dampak negatif dari aktivitas perusahaan merupakan item-item yang paling banyak tidak diungkapkan karena memang tidak terjadi atau tidak dilakukan perusahaan. Hal ini dapat bermakna bahwa perusahaan telah beraktivitas dengan baik, namun juga dapat bermakna bahwa perusahaan berusaha untuk menjaga *image*-nya dengan tidak mengungkapkan item-item tersebut.

Khusus bagi perusahaan dalam JII, indeks GRI merupakan pedoman yang disediakan untuk berbagai macam perusahaan, mulai skala kecil sampai besar. Sehingga meskipun termasuk perusahaan berskala besar, perusahaan dalam JII tetap tidak mengungkapkan item-item yang memang diperuntukkan untuk perusahaan dengan skala yang lebih besar. Sementara bagi perbankan syariah, indeks GRI merupakan indeks yang lebih dikhususkan bagi perusahaan yang terlibat langsung dengan lingkungan, sehingga perbankan syariah tidak dapat mengungkapkan banyak hal karena merupakan perusahaan yang bergerak dalam

sektor keuangan. Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pengungkapan kedua jenis perusahaan ialah dengan melakukan pengungkapan pada item-item seperti pengungkapan ketidakpatuhan, pengaduan insiden tertentu serta dampak negatif dari aktivitas perusahaan.

D. Perbandingan Kualitas Sustainability Reporting Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII berdasarkan Indeks ISR dan Indeks GRI

Berdasarkan informasi hasil skoring yang telah diperoleh pada tabel-tabel sebelumnya, maka dapat dibuat tabel yang menyajikan bagaimana perbandingan kualitas *sustainability reporting* pada perbankan syariah dan perusahaan dalam JII berdasarkan indeks ISR dan indeks GRI. Tabel tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

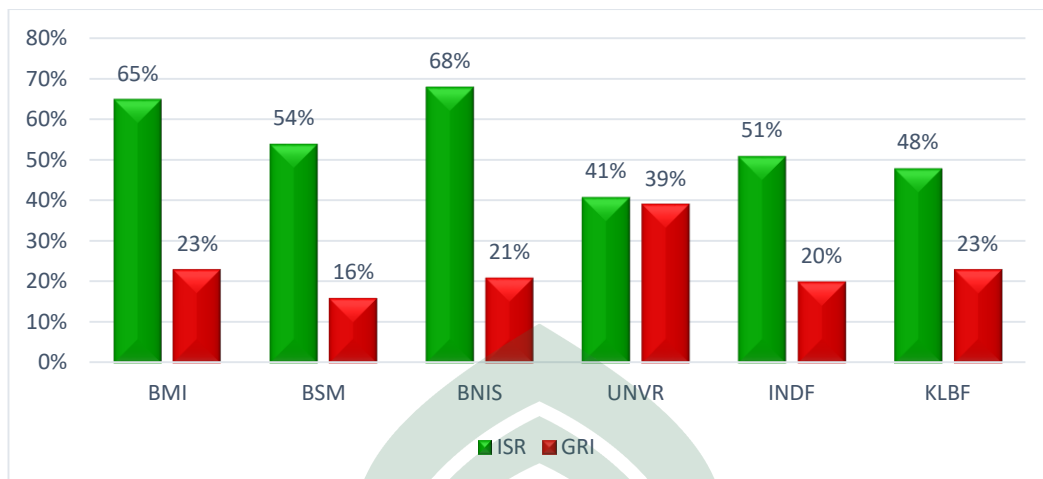
Tabel 4.9 Perbandingan Skor Pengungkapan Sustainability Reporting Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII berdasarkan Indeks ISR dan Indeks GRI

Kode	Jenis Perusahaan	Persentase Hasil Skoring			
		ISR	π ISR	GRI	π GRI
Perbankan Syariah					
BMI	Bank Muamalat Indonesia	65%	63%	23%	20%
BSM	Bank Syariah Mandiri	54%		16%	
BNIS	BNI Syariah	68%		21%	
Perusahaan dalam JII					
UNVR	Unilever Indonesia	41%	47%	39%	27%
INDF	Indofood Sukses Makmur	51%		20%	
KLBF	Kalbe Farma	48%		23%	

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas, untuk memudahkan melihat perbandingan kedua jenis perusahaan berdasarkan indeks ISR dan indeks GRI, maka dapat dibuatkan ilustrasi sebagai berikut.

Grafik 4.3 Perbandingan Skor Pengungkapan *Sustainability Reporting* Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII berdasarkan Indeks ISR dan Indeks GRI



Sumber: Data diolah peneliti

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok di antara kedua indeks (ISR dan GRI) dalam mengukur kualitas *sustainability reporting* kedua jenis perusahaan. Berdasarkan tabel di atas pula diketahui bahwa, kualitas *sustainability reporting* perbankan syariah dan perusahaan dalam JII berdasarkan indeks ISR lebih tinggi (lebih baik) dibanding berdasarkan indeks GRI. Hal ini kemungkinan dipicu oleh indeks ISR yang tidak terlalu memberi penjelasan terperinci pada setiap itemnya, sehingga lebih mudah untuk memberi skor tinggi pada suatu item ketika item tersebut diungkapkan. Sedangkan pada indeks GRI, skor tinggi akan sangat sulit untuk diberikan, karena harus mengikuti penjelasan rinci setiap item yang disediakan oleh pedoman GRI-G4. Sehingga, ketika suatu item telah diungkapkan, maka harus diperiksa dengan teliti kesesuaiannya dengan yang dimaksudkan dalam pedoman indeks GRI-G4 untuk mendapatkan skor yang tinggi. Hal ini dapat dimaklumi mengingat indeks GRI merupakan pedoman baku yang telah digunakan sebagian besar perusahaan di

dunia dalam menyusun laporannya, sementara indeks ISR masih merupakan pedoman yang belum baku dan masih dalam pengembangan, serta penggunaannya yang belum meluas, yaitu kebanyakan baru digunakan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Kemungkinan lainnya, ialah bahwa item-item dalam indeks ISR merupakan item-item yang wajar ditemui dalam setiap laporan saat ini, baik dalam *annual report* maupun *sustainability reporting* perusahaan khususnya perbankan syariah. Sehingga, akan mudah bagi setiap perusahaan untuk memperoleh skor tinggi ketika mengungkapkan item ISR yang dimaksud. Selain itu, indeks GRI memiliki item-item khusus dan sangat terinci dalam setiap kategorinya yang sulit atau tidak mungkin untuk dipenuhi oleh perusahaan tertentu, terutama sektor perbankan syariah. Namun, hal ini tidak lantas membuat indeks ISR kurang baik untuk digunakan sebagai pedoman pelaporan dibanding GRI.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini pun cukup mendukung indeks ISR dengan memberi penilaian yang lebih baik dibanding indeks GRI. Berdasarkan pandangan teori komunikasi aksi, penggunaan indeks ISR dalam penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi sosial yang dilakukan perusahaan tidak hanya terbatas pada interaksi yang dipengaruhi oleh mekanisme sistem (*system mechanism*), melainkan telah mengarah pada interaksi yang berdasarkan kebutuhan sosial (*lifeworld*). Selain itu, berdasarkan *syariah enterprise theory*, perusahaan telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik kepada ketiga *stakeholder*-nya, yaitu Allah, manusia dan alam. Hal ini dapat terlihat dari baiknya skor yang diperoleh kedua jenis perusahaan pada kategori-kategori tertentu sebagai berikut.

Tabel 4.10 Perbandingan Skor Rata-rata Pengungkapan *Sustainability Reporting* Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per Kategori berdasarkan Indeks ISR dan Indeks GRI

Kategori Indeks ISR		π Bank Syariah	π JII	Kategori Indeks GRI		π Bank Syariah	π JII	
1	Investasi dan Keuangan	48%	19%	1	Ekonomi	48%	48%	
2	Produk dan Jasa	69%	63%	2	Lingkungan	2%	25%	
3	Tenaga Kerja	54%	49%	3	Sosial:	3.1 Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja	40%	42%
4	Sosial	74%	52%			3.2 Hak Asasi Manusia (HAM)	1%	1%
5	Lingkungan	28%	70%			3.3 Masyarakat	27%	19%
6	Tata Kelola Perusahaan	82%	43%			3.4 Tanggungjawab atas Produk	42%	33%

Sumber: Data diolah peneliti

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau CSR oleh perbankan syariah dan perusahaan dalam JII yang tertuang baik pada *sustainability reporting* maupun *annual report*, pada dasarnya bukan sekedar alat untuk meningkatkan citra atau *image* di mata para *stakeholders*, khususnya nasabah/konsumen dan investor. Esensi utama dari pelaporan atau pengungkapan yang dilakukan perusahaan adalah untuk menunjukkan tanggung jawab kepada Allah SWT serta kepatuhan terhadap prinsip Islam. Selain itu, pelaksanaan dan pengungkapan CSR juga menunjukkan karakter utama perbankan syariah yang membedakannya dari bank konvensional, serta perusahaan dalam JII yang membedakannya dari perusahaan non JII.

Menariknya, perbandingan indeks ISR dan indeks GRI dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan dengan penelitian sebelumnya. Perbandingan indeks ISR dan indeks GRI dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Sofyani dan Anggar (2012), tetapi berbeda dengan penelitian Fitria dan Dwi (2010) serta Susilowati (2013). Penelitian Fitria dan Dwi

(2010) serta Susilowati (2013) menemukan bahwa indeks GRI yang lebih tinggi dibanding indeks ISR. Perbedaan ini mungkin disebabkan berbedanya jenis perusahaan yang diperbandingkan dan skala skoring yang digunakan. Fitria dan Dwi (2010) melakukan perbandingan pada perbankan syariah dengan konvensional, sementara Susilowati (2013) membandingkan perusahaan dalam JII dengan perusahaan non JII. Serta keduanya hanya menggunakan skala skoring 0 dan 1 dalam penelitiannya. Berbeda halnya dengan Sofyani dan Anggar (2012).

Sofyani dan Anggar (2012) yang melakukan perbandingan pada perbankan syariah Indonesia dan Malaysia juga menemukan bahwa indeks ISR lebih tinggi dibanding indeks GRI. Hal ini menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten antar penelitian serupa, yang dapat disebabkan oleh kedua perbedaan yang telah disebutkan sebelumnya. Lebih tingginya hasil perbandingan indeks ISR dibanding indeks GRI menurut Sofyani dan Anggar (2012), menunjukkan bahwa perbankan syariah, khususnya di Indonesia, mulai bergeser untuk menjalankan aktivitas sosial dari yang awalnya berdasarkan indeks GRI menuju indeks ISR yang notabene dirancang untuk unit bisnis syariah. Hal inilah pula yang mungkin dapat menjelaskan hasil penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas *sustainability reporting* masing-masing perusahaan hanya akan lebih unggul dalam satu indeks saja. Berdasarkan indeks ISR, perbankan syariah menunjukkan skor lebih tinggi dibanding perusahaan dalam JII. Namun sebaliknya, ketika menggunakan indeks GRI, perusahaan dalam JII justru menunjukkan skor yang lebih tinggi dibanding perbankan syariah. Bila diperhatikan, pola peringkat kedua jenis perusahaan pada

indeks ISR dan indeks GRI juga berbeda. Perusahaan yang mendapat peringkat tertinggi atau terendah pada indeks ISR tidak akan menempati peringkat yang sama lagi pada indeks GRI. Berbeda halnya dengan penemuan Fitria dan Dwi (2010) yang menemukan bahwa, perusahaan yang mendapat ranking tinggi pada indeks GRI akan mendapat ranking tinggi juga pada indeks ISR.

Hal ini membuktikan bahwa, indeks ISR notabene memang dirancang untuk unit bisnis syariah, sehingga indeks ISR lebih sesuai untuk digunakan perbankan syariah dalam penyusunan laporannya dibanding menggunakan indeks GRI. Sementara, jika melihat lebih tingginya skor perusahaan dalam JII ketika menggunakan indeks GRI, dapat pula dikatakan bahwa GRI memang dirancang untuk perusahaan manufaktur, seperti perusahaan dalam JII. Sehingga, perusahaan dalam JII dirasa lebih sesuai menggunakan indeks GRI. Namun disayangkan pula bahwa, sebagai perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal syariah, diharapkan agar perusahaan dalam JII turut memasukkan item-item syariah dalam laporannya agar dapat lebih menambah keyakinan dan minat investasi oleh investor Muslim.

Adapun mengenai belum maksimalnya pengungkapan kedua jenis perusahaan berdasarkan indeks ISR salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengungkapan perusahaan pada kategori tertentu. Khususnya pengungkapan kategori lingkungan yang sangat rendah pada perbankan syariah. Namun demikian, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan kembali bagi perbankan syariah, karena perbankan syariah berhubungan dengan industri lain seperti perumahan dan industri manufaktur dalam hal kerjasama pembiayaan usaha, sehingga perbankan syariah secara tidak langsung juga berkaitan dengan aspek-aspek lingkungan. Oleh karena

itu, bank syariah bisa saja turut andil dalam menjalankan aktivitas sosial dengan memberikan syarat tertentu kepada industri sebelum memberikan pembiayaan, misalnya perusahaan perumahan yang bekerja sama dengan bank syariah harus menjalankan aktivitas sosial seperti *green product*, pengelolaan air, dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan perbaikan lingkungan.

Penyebab lain belum maksimalnya pengungkapan kedua jenis perusahaan berdasarkan indeks ISR ialah karena belum bakunya indeks ISR sehingga belum dijadikan pedoman bagi perusahaan, khususnya perbankan syariah. Untuk itulah perlu dilakukan upaya untuk membuat pedoman pelaporan yang dapat diterima umum dengan item-item syariah di dalamnya, sehingga dapat digunakan oleh berbagai jenis perusahaan meskipun tidak berbasis syariah, seperti oleh perusahaan dalam JII. Salah satu yang dapat dilakukan ialah dengan membuat konvergensi indeks ISR ke dalam indeks GRI. Hal ini karena, perusahaan yang diakui sebagai entitas syariah dan dinyatakan memenuhi syariat Islam seharusnya mengungkapkan informasi yang membuktikan perusahaan tersebut beroperasi sesuai hukum Islam (Maulida, *et al.*, 2014).

E. Analisa Konvergensi ISR Index ke dalam GRI Index

Konvergensi indeks ISR ke dalam indeks GRI pada penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian Fitria dan Dwi (2010). Menurut Fitria dan Dwi (2010), kemungkinan konvergensi antara indeks ISR dan indeks GRI memerlukan telaah lebih dalam terhadap tiap kategori indeks ISR. Telaah tersebut dilakukan dengan menilai kelengkapan kategori-kategori pengungkapan tanggung jawab sosial indeks ISR terhadap kategori-kategori indeks GRI yang telah disusun secara

detail dan komprehensif. Berikut adalah penilaian kelengkapan dan kesesuaian tingkat pengungkapan kedua indeks tersebut dengan mendasarkan pada item indeks ISR yang mengacu pada penelitian Fitria dan Dwi (2010).

1. Investasi dan Keuangan

Item-item yang ada pada kategori ini tidak terdapat pada indeks GRI. Item yang termasuk dalam kategori investasi dan keuangan adalah mengenai sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan transaksi yang diharamkan oleh Islam, serta item mengenai kebijakan perusahaan untuk menangani nasabah yang bermasalah. Seluruh item tidak diungkapkan pada indeks GRI dikarenakan kategori ini benar-benar menekankan pada pengungkapan yang difokuskan pada prinsip-prinsip etis Islam. Namun, karena kategori investasi dan keuangan ini menyangkut masalah ekonomi, sehingga dapat dikonvergensi ke dalam kategori ekonomi dalam indeks GRI.

Terdapat beberapa item dalam kategori ini yang dapat dimasukkan ke dalam kategori ekonomi dalam indeks GRI. Item-item tersebut ialah aktivitas *riba*, *gharar*, zakat, dan kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh *insolvent clients*. Sedangkan item lainnya dianggap tidak perlu dimasukkan karena sudah tercakup dalam beberapa item pada kategori ekonomi. Item-item tersebut ialah item *current value balance sheet* (nilai neraca saat ini), kegiatan investasi, dan proyek pembiayaan yang telah tercakup dalam item kinerja ekonomi, serta item *value added statements* (pernyataan nilai tambah perusahaan bagi masyarakat) yang telah tercakup dalam item dampak ekonomi tidak langsung. Sehingga, apabila dikonvergensi, jumlah item dalam kategori ekonomi indeks GRI-G4 yang semula

berjumlah 9 item, akan menjadi 15 item setelah dilakukan penjabaran pada item yang ditambahkan.

Tabel 4.11 Item Konvergensi Indeks ISR ke Indeks GRI-G4 Kategori Ekonomi

KATEGORI EKONOMI		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
Riba	EC10	Identifikasi jenis aktivitas yang mengandung riba dan persentase kontribusi dari profif
Gharar	EC11	Identifikasi jenis aktivitas yang mengandung gharar dan persentase kontribusi dari profif
Zakat	EC12	Metode perhitungan zakat yang digunakan
	EC13	Sumber dan jumlah zakat
	EC14	Penyaluran zakat
Kebijakan Piutang	EC15	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran piutang oleh insolvent clients (klien yang tidak sanggup membayar)

Sumber: Data diolah peneliti

2. Produk dan Jasa

Kategori kedua pada indeks ISR yaitu mengenai produk dan jasa. Pada indeks GRI, kategori produk dan jasa diungkapkan pada sub-kategori tanggungjawab atas produk. Namun, apabila dibandingkan dengan sub-kategori tanggungjawab atas produk pada indeks GRI, kategori produk dan jasa pada indeks ISR masih sangat terbatas sementara indeks GRI lebih terperinci. Persamaan item-item pada kategori ini baik pada indeks ISR maupun indeks GRI adalah menekankan pada pengungkapan terhadap komplain atau keluhan pelanggan/nasabah.

Item yang perlu untuk dimasukkan dalam sub-kategori tanggungjawab atas produk ini ialah item status kehalalan produk. Sedangkan item-item lainnya yang dianggap sudah tercakup dalam sub-kategori ini ialah item *green product*, kualitas dan keamanan produk serta item pengembangan produk yang tercakup dalam item kesehatan dan keselamatan pelanggan, serta item jenis dan definisi setiap produk yang tercakup dalam item pelabelan produk dan jasa. Sehingga, item dalam sub-kategori tanggungjawab atas produk yang semula berjumlah 9 menjadi 10 item.

Tabel 4.12 Item Konvergensi Indeks ISR ke Indeks GRI-G4 Kategori Sosial Sub-Kategori Tanggungjawab atas Produk

SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK		
Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa
Status Kehalalan Suatu Produk	PR10	Sertifikat kehalalan produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernyataan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa baru, dan sebagainya.

Sumber: Data diolah peneliti

3. Tenaga Kerja

Pada indeks GRI, kategori ini termasuk ke dalam sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja pada kategori sosial. Pada indeks ISR item-item kategori ini tetap menekankan pada prinsip-prinsip Islam. Salah satunya yaitu mengenai kesempatan beribadah untuk karyawan di tempat kerja.

Secara keseluruhan item-item dalam kategori karyawan dalam indeks ISR hampir telah tercakup semua dalam sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, kecuali untuk item-item terkait syariah. Namun, item lainnya di luar item terkait syariah yang dapat ditambahkan ke sub-kategori ini ialah item keterlibatan karyawan dan item perekrutan khusus yang dimasukkan ke item kepegawaian. Sehingga, item dalam sub-kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja yang semula berjumlah 16 item menjadi 21 item.

Tabel 4.13 Item Konvergensi Indeks ISR ke Indeks GRI-G4 Kategori Sosial Sub-Kategori Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja

SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Perekrutan karyawan dari kelompok khusus (misalnya, cacat fisik, mantan pengguna/pecandu narkoba atau mantan narapidana)
	LA3	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA4	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
Hubungan Industrial	LA5	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA6	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA7	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA8	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka

Lanjutan Tabel 4.13 Item Konvergensi Indeks ISR ke Indeks GRI-G4 Kategori Sosial Sub-Kategori Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja

	LA9	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	LA10	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
	LA11	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberkelanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA12	Persentase karyawan yang menerima rewiuw kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
	LA13	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA14	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Keterlibatan karyawan	LA15	Keterlibatan karyawan dalam suatu pekerjaan, misalnya dalam diskusi manajemen dan pengambilan keputusan.
Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA16	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA17	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	LA18	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diadakan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Kesempatan beribadah bagi karyawan	LA19	Pemberian izin bagi karyawan Muslim shalat wajib pada waktunya dan puasa di bulan Ramadhan pada hari kerja
	LA20	Pelaksanaan kegiatan ibadah bersama-sama (sholat berjamaah) antara karyawan tingkat atas (pejabat tinggi) dengan karyawan tingkat menengah dan tingkat bawah
	LA21	Tempat beribadah yang memadai bagi karyawan

Sumber: Data diolah peneliti

4. Sosial

Kategori sosial merupakan kategori yang sangat erat hubungannya dengan konsep tanggungjawab sosial. Kategori sosial ini dapat dimasukkan juga ke dalam kategori sosial pada sub-kategori masyarakat indeks GRI karena dianggap lebih sesuai. Secara keseluruhan, hampir semua item dalam kategori ini tidak terdapat pada sub-kategori masyarakat dalam indeks GRI. Kategori sosial pada indeks ISR sebagian besar difokuskan pada pengungkapan terkait dengan prinsip-prinsip Islam

seperti item *saddaqah*, *waqaf* dan *qardhul hassan*. Selain ketiga item tersebut, dapat pula ditambahkan item program pendidikan dan item kegiatan amal/sosial lainnya. Sehingga, item dalam sub-kategori masyarakat yang semula berjumlah 11 item menjadi 18 item setelah ditambah sub item dalam item yang ditambahkan.

Tabel 4.14 Item Konvergensi Indeks ISR ke Indeks GRI-G4 Kategori Sosial Sub-Kategori Masyarakat

SUB-KATEGORI: MASYARAKAT		
Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Penyaluran Dana Kebajikan	SO12	Pemberian sedekah atau donasi
	SO13	Pemberian Wakaf
	SO14	Qardhul Hasan atau pinjaman untuk kebajikan yang sifatnya tidak memberi keuntungan finansial
Program Pendidikan	SO15	Bantuan pendidikan berupa beasiswa, pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya
Kegiatan Amal atau Sosial Lainnya	SO16	Pemberian bantuan berupa bantuan bencana alam, donor darah, sunatan massal, pembangunan atau renovasi Masjid/infrastruktur, mudik bareng, dan sebagainya)
	SO17	Kepedulian terhadap anak-anak (yatim piatu)

Sumber: Data diolah peneliti

5. Lingkungan

Kategori lingkungan pada indeks ISR memiliki item-item pengungkapan yang masih terbatas. Berbeda dengan indeks GRI yang pada dasarnya memiliki pengungkapan yang lebih komprehensif. Namun, terdapat beberapa item yang dianggap dapat ditambahkan pada kategori lingkungan indeks GRI ini, item-item tersebut ialah pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan/sertifikasi dibidang lingkungan hidup dan audit lingkungan. Sehingga, item dalam kategori lingkungan yang semula berjumlah 34 item menjadi 37 item.

Tabel 4.15 Item Konvergensi Indeks ISR ke Indeks GRI-G4 Kategori Lingkungan

KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi di luar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
Air	EN7	Konsumsi energi di luar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam <i>iucn red list</i> dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)

Lanjutan tabel 4.15 Item Konvergensi Indeks ISR ke Indeks GRI-G4 Kategori Lingkungan

	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen Pemasok Atas Lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Pendidikan mengenai lingkungan hidup	EN35	Pemberian pendidikan mengenai lingkungan hidup kepada karyawan, konsumen dan masyarakat luas
Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	EN36	Penghargaan atau sertifikasi dibidang Lingkungan Hidup yang diperoleh
Audit Lingkungan	EN37	Pernyataan verifikasi dari pihak independen/pemerintahan atas kegiatan pengelolaan lingkungan atau pelaksanaan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) yang telah diaudit

Sumber: Data diolah peneliti

6. Tata Kelola Perusahaan

Kategori terakhir dalam indeks ISR yaitu kategori tata kelola perusahaan. Item-item pada kategori ini pengungkapannya juga masih sangat terbatas dibandingkan dengan item-item pada indeks GRI-G4. Pada indeks GRI-G4, kategori tata kelola perusahaan terdapat pada pengungkapan standar umum, sementara dalam penelitian ini khusus hanya dibahas pengungkapan standar khusus, karena mengatur mengenai praktik sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan, yang lebih sesuai untuk penelitian ini. Sehingga, tidak perlu dilakukan konvergensi lagi untuk kategori ini. Namun, dapat diusulkan untuk menambahkan item-item syariah pada indeks ISR ke dalam kategori tata kelola perusahaan pada indeks GRI, sehingga lebih sesuai digunakan oleh entitas syariah.

Setelah konvergensi dilakukan, jumlah item indeks GRI-G4 yang semula berjumlah 91 item, kini menjadi 112 item. Hal ini menunjukkan bahwa, secara garis besar, item-item indeks ISR telah cukup mewakili sebagian item dalam indeks GRI-G4, sehingga tidak perlu menambahkan banyak item lagi. Hal yang membedakan keduanya adalah item-item dalam indeks GRI-G4 memiliki rincian yang lebih detail dan komprehensif. Sedangkan item-item dalam indeks ISR masih sangat sederhana dan mengandung makna yang luas sehingga perlu adanya batasan-batasan agar setiap item dapat dievaluasi dengan baik. Untuk menjadi suatu pedoman pengungkapan yang diterima umum, indeks ISR harus memiliki item-item yang detail dan komprehensif.

Berdasarkan hasil konvergensi yang telah dilakukan, konvergensi indeks ISR ke indeks GRI yang telah menghasilkan pedoman baru selanjutnya dapat

dinamakan dengan GRI G4.1 Adopsi ISR. Penamaan GRI G4.1 ini diusulkan untuk menjadi lanjutan GRI G4. Diharapkan dengan hadirnya GRI G4.1 Adopsi ISR dapat menjadi pertimbangan regulator untuk dapat digunakan sebagai pedoman pelaporan pada perbankan syariah serta sebagai salah satu syarat dalam Penerbitan Efek Syariah untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini ingin melihat apakah indeks ISR memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan indeks GRI dalam menentukan kualitas *sustainability reporting* perusahaan. Berdasarkan hasil dan telaah yang telah dilakukan, penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa :

1. Kualitas *sustainability reporting* perbankan syariah berdasarkan indeks ISR lebih baik dibanding perusahaan dalam JII. Sebaliknya, berdasarkan indeks GRI, kualitas *sustainability reporting* perusahaan dalam JII lebih baik dibanding perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas *sustainability reporting* masing-masing jenis perusahaan hanya lebih unggul dalam satu indeks saja.
2. Pengungkapan *sustainability reporting* perbankan syariah dan perusahaan dalam JII berdasarkan indeks ISR lebih tinggi dibandingkan indeks GRI, dengan tingkat perbedaan kedua indeks yang sangat menonjol. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah, khususnya di Indonesia, mulai bergeser untuk menjalankan aktivitas sosial dari yang awalnya berdasarkan indeks GRI menuju indeks ISR yang notabene dirancang untuk unit bisnis syariah.
3. Konvergensi antara indeks ISR dan indeks GRI dapat dilakukan dengan menyempurnakan indeks GRI dengan cara menambahkan item-item syariah

yang terdapat dalam indeks ISR, tetapi tidak meninggalkan indeks ISR. Dengan demikian, indeks ISR dapat dikonvergensi ke dalam indeks GRI karena item-item pada indeks ISR tidak jauh berbeda dengan item pada indeks GRI kecuali untuk aspek syariahnya.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa rekomendasi atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan dan perkembangan penelitian pada masa mendatang, di antaranya :

1. Jumlah sampel sebaiknya diperluas hingga mencakup seluruh perbankan syariah di Indonesia dan seluruh perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian bisa lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menghindari subjektivitas. Pengembangan skala skoring untuk hasil skor yang lebih objektif dapat dilakukan dengan memperluas data ke berbagai sumber data di luar *sustainability reporting* dan *annual report*, seperti laporan kegiatan yang ada di *website* perusahaan, serta pemberitaan dari media cetak dan elektronik untuk memperkuat bukti yang diperlukan dalam setiap skala.
3. Penelitian selanjutnya harus dapat mengembangkan item-item dalam indeks ISR secara lebih detail dan komprehensif agar dapat menjadi suatu pedoman pengungkapan. Item-item dalam indeks ISR masih sangat sederhana dan mengandung makna yang luas, sehingga perlu adanya batasan-batasan dan penjelasan detail agar setiap item dapat dievaluasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abreu, R., F. David, and D. Crowther. 2005. *Corporate Social Responsibility in Portugal: Empirical Evidence of Corporate Behaviour*. Emerald Group Publishing Limited. Vol. 5, No. 5, Hal. 134-168.
- Adi, Fajar dan Taufiq Awaluddin. 2013. *Analisis Kesesuaian Panduan Laporan Keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI) dengan Akuntansi Syariah: Suatu Tinjauan terhadap Indikator Kinerja Ekonomi*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis. Institut Pertanian Bogor.
- Adjie, Ayuardhini Puspita. 2013. *Analisis Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Perusahaan-Perusahaan Pemenang Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) 2011)*. Skripsi.
- Agustia, Dian. 2010. *Pelaporan Biaya Lingkungan Sebagai Alat Bantu bagi Pengambilan Keputusan yang Berkaitan dengan Pengelolaan Lingkungan*. Jurnal Akuntansi: Akrua. Vol.1, No.2, Hal. 80-100.
- Ahzar, Fahri Ali dan Rina Trisnawati. 2013. *Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah di Indonesia*. Proceeding Seminar Nasional dan Call for Papers Sancall 2013. Hal. 477-483.
- Akbar, Gita N. 2008. *Pengungkapan Sustainability Reporting Tahun 2006 pada Enam Perusahaan di Industri Pertambangan*. Jurnal Ekonomi, Institut Pertanian Bogor.
- Anonim. 2015. *Penghidupan Berkelanjutan (Sustainability Living 2015)*. Unilever Indonesia Tbk.
- _____. 2016. *Peranan Corporate Social Responsibility dalam Kaitannya dengan Akuntansi Lingkungan*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.
- Anugrah, Ageng Widhi. 2011. *Analisis Pengaruh Environmental Performance, Struktur Corporate Governance, dan Earning Management Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arifiyanto, Dimas Bangkit. 2013. *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah di Indonesia*. Artikel Publikasi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi ke-15. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsad, Syahiza, Roshima Said, Haslinda Yusoff, Yusuf Haji-Othman and Rahayati Ahmad. 2014. *The Relationship between Islamic Corporate Social Responsibility and Firm's Performance: Empirical Evidence from Shari'ah Compliant Companies*. European Journal of Business and Management. Vol. 6, No. 36, Hal. 161-173.
- Arta, Silvie Ananda, Ria Nelly Sari dan Enni Savitri. 2015. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Informasi Lingkungan Perusahaan Berbasis Website (Studi Empiris pada Industri Rawan Lingkungan yang terdaftar di BEI Tahun 2013)*. Disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVIII Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ballou, Brian, Dan L. Heitger and Charles E. Landes. 2016. *The Future of Corporate Sustainability Reporting: A Rapidly Growing Assurance Opportunity*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan.
- Baydoun, N. and Willet R. 1997. *Islam and Accounting: Ethical Issues in the Presentation of Financial Information, Accounting, Commerce and Finance*. The Islamic Perspective. Vol. 1 No. 1, Hal. 1-25.
- Budiani, Rizka Julia dan Anis Chariri. 2011. *Narsisme dalam Pelaporan Keuangan: Analisis Semiotik atas Laporan Keuangan Perusahaan yang Mengalami Kerugian*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan, A. H. N. and Rahmati N. 2012. *The Impact of Sustainability reporting on Company Performance*. Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura. Vol 15, No. 2, Hal. 257-272.
- CGA-Canada Research Foundation. 2005. *Measuring Up: A Study on Corporate Sustainability Reporting in Canada*. By the Certified General Accountants Association of Canada.
- Cahyono, Budi. 2011. *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Chariri, Anis dan Firman Aji Nugroho. 2009. *Retorika dalam Pelaporan Corporate Social Responsibility: Analisis Semiotik Atas Sustainability reporting PT Aneka Tambang Tbk*. Disajikan pada SNA XII. Palembang.

- Ching, Hong Yuh; Fábio Gerab and Thiago Toste. 2013. *Analysis of Sustainability Reports and Quality of Information Disclosed of Top Brazilian Companies*. International Business Research. Vol. 6, No. 10, Hal. 62-77.
- Clarkson, M. B. E. 1995. *A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance*. Academy of Management Review. Vol. 20, No. 1, Hal. 92-117.
- Daub, Claus-Heinrich. 2007. *Assessing the Quality of Sustainability Reporting: An Alternative Methodological Approach*. Journal of Cleaner Production. Vol. 15, No. 1, Hal. 75-85.
- Denzin, Norman K. 1978. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. 2nd Edition, First Published on 1970. New York: McGraw Hill.
- Dewi, I Gusti Ayu Agung Omika. 2010. *Dialektika dan Refleksi Kritis Realitas "Sustainability" dalam Praktik Sustainability Reporting: Sebuah Narasi Habermasian*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 7, No. 2, Hal. 22-38.
- Dusuki, Asyraf Wajdi and Humayon Dar. 2005. *Stakeholders' Perceptions of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks: Evidence From Malaysian Economy*. International Conference on Islamic Economics and Finance, Hal. 389-417.
- Eccles, R. G., George Serafeim and Michael P. Krzus. Consulting. 2011. *Market Interest in Nonfinancial Information*. Journal of Applied Corporate Finance. Vol. 23, No. 4, Hal. 113-127.
- Elkington, J. 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone: Oxford.
- Fahriza, Romi. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sustainability Report (Studi pada Perusahaan High Profile di BEI Tahun 2009-2013)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Fatmawati, Ega. 2013. *Studi Komparatif Kecepatan Temu Kembali Informasi di Depo Arsip Koran Suara Merdeka antara Sistem Simpan Manual dengan Foto Repro*. Tesis. Jurusan Ilmu Perpustakaan, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Fauziah, Khusnul dan Prabowo Yudho J. 2013. *Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks*. Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol. 5, No. 1, Hal. 12-20.
- Ferrero, Jennifer M., Isabel M. G. Sanchez and Beatriz C. Ballesteros. 2013. *Effect of Financial Reporting Quality on Sustainability Information Disclosure*. Published online in Wiley Online Library.
- Fitria, Soraya dan Dwi Hartanti. 2010. *Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks*. Disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BP UNDIP).
- GRI. 2013. *An introduction to G4 The next generation of sustainability reporting*. Global Reporting Initiative. Amsterdam, The Netherlands.
- Gunawan, Yovani dan Sekar Mayangsari. 2015. *Pengaruh Sustainability Reporting terhadap Nilai perusahaan dengan Investment Opportunity Set sebagai Variabel Moderating*. E-Journal Akuntansi Trisakti, Vol. 2, No. 1, Hal. 1-12.
- Gustani. 2013. *Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.
- Hafida, Andi Safitri. 2012. *Implementasi Syariah Enterprise Theory Melalui Value Added Statement untuk Menilai Tanggung Jawab Perbankan Syariah Kepada stakeholders*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Hanafi, Mamduh M. dan Syafiq M. Hanafi. 2012. *Perbandingan Kinerja Investasi Syariah dan Konvensional: Studi pada Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks LQ45*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (EKBISI). Vol. 7, No. 1, Hal. 16-27.
- Haniffa, R. 2002. *Social Reporting Disclosure - An Islamic Perspective*. Indonesian Management and Accounting Research. Vol. 1, No. 2, Hal. 128-146.
- Hapsari, Shanhaz Ulfah. 2015. *Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad Kafâlah di Bank Muamalat dan Akad Wakâlah bil Ujrah di BNI Syariah Cabang Malang*. Skripsi. Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

- Harun, Noor Ashikin, Azwan Abdul Rashid and Bakhtiar Alrazi. 2013. *Measuring The Quality of Sustainability Disclosure in Malaysian Commercial Banks*. Proceedings Book of ICEFMO, 2013, Malaysia Handbook on the Economic, Finance and Management Outlooks. PAK Publishing Group. Hal. 695-702.
- Hasanah, Faizatul, Heri Yanto dan Bestari Dwi. 2014. *Model Pengembangan Good Corporate Governance dan Sustainability Report pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVII, Universitas Mataram, Lombok.
- Horison, M. Yulio dan Yeterina W Nugrahanti. 2014. *Perbedaan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan antara Perusahaan dengan Manajemen Laba Tinggi dan Rendah*. Seminar Nasional dan Call for Paper (Sancall 2014): Research Methods and Organizational Studies, Hal. 281-295.
- Huda, N. 2006. *Kinerja Pasar Modal Syariah Indonesia: Suatu Kajian terhadap Saham Syariah*. Makalah Disampaikan dalam Diskusi Bulanan IAEI, FE Yarsi.
- Idah. 2013. *Peran Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan terdaftar di BEI Periode 2010-2011*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada.
- Karmini, Ni Wayan. 2011. *Keterpinggiran Perempuan Hindu Pekerja Hotel Berbintang Lima di Kawasan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar*. Tesis. Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar.
- Kementerian Agama RI. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). *Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah* Nomor: KEP-208/BL/2012.
- Khoirudin, Amirul. 2013. *Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Accounting Analysis Journal. Vol. 2, No. 2, Hal. 1-26.
- Luthfia, Khaula. 2012. *Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Corporate Governance terhadap Publikasi Sustainability Report*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Lynch, N., Michael F. Lynch and David B. Casten. 2014. *The Expanding Use of Sustainability Reporting Standards Setting and Assurance Opportunities for CPAs*. The CPA Journal, Hal. 19-24.
- Mardikanto, T. 2014. *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Marwati, Candri Puspita dan Yulianti. 2015. *Analisis Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Non-Keuangan Tahun 2009-2013*. Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol. 7, No. 2, Hal. 167-181.
- Maulida, Ken Auva dan Helmy Adam. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sustainability Performance (Studi pada Website Perusahaan Manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011)*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Misbach, Irwan. 2012. *Kualitas Layanan Bank Syariah*. Makassar: Alauddin University Press.
- Mitchell, R. K., B. R. Agle and D. J. Wood. 1997. *Toward a Theory of Stakeholder Identification and Saliency: Defining the Principle of Who and What Really Counts*. Academy of Management Review. Vol. 22, No. 4, Hal. 853-886.
- Muin, Rahmawati. 2014. *Lembaga Keuangan Syariah: Bank dan Non Bank*. Makassar: Alauddin University Press.
- Musdalifa, Eva. 2014. *Analisis Kritis Professional Judgment berdasarkan Internasional Financial Reporting Standard: Sebuah Tinjauan Etika Profetik*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Nanna, Amelia Putri, Annisa Sabrina D. dan Putri Ayuningsih. 2014. *Pelaporan Keberlanjutan dan Pelaporan Terintegrasi*. Makalah. Program Pendidikan Profesi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Natalia, Ria dan Josua Tarigan. 2014. *Pengaruh Sustainability Reporting terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik dari Sisi Profitability Ratio*. Business Accounting Review. Vol. 2, No. 1, Hal. 111-120.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nurdin, Emillia dan Fani Cahyandito. 2006. *Pengungkapan Tema-tema Sosial dan Lingkungan dalam Laporan Tahunan Perusahaan terhadap Reaksi*

- Investor*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran.
- Perdana, Aditya Rahmat. 2008. *Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Saham Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Pujiastuti. 2015. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Good Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Sustainability Report*. Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis. Vol. 2, No. 1, Hal. 12-23.
- Purwitasari, Fadilla dan Anis Chariri 2011. *Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory: Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang
- Putra, Haris Fifta. 2014. *Analisis Pelaksanaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting (ISR)*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Raditya, A. N. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok.
- Rahayu, Gadis Puri dan Tjiptohadi Sawarjuwono. 2015. *Narsisme Bahasa pada Pelaporan Kegiatan CSR Melalui Pendekatan Semiotik dalam Sustainability Report PT PLN (Persero)*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Universitas Airlangga.
- Rahma, Nadia. 2012. *Analisis Penerapan Islamic Social Reporting Index dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia*. Skripsi. Program Studi Keuangan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rama, Ali. 2014. *Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting: Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia*. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2014, Hal. 95-115.
- Ratnasari, Yunita dan Andri Prastiwi. 2011. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Republik Indonesia. 2007. *UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

- Republik Indonesia. 2008. *UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Reverte, Carmelo. 2009. *Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish Listed Firms*. *Journal of Business Ethics*, Vol. 88, Issue 2, Hal. 351-366.
- Rufaida, Izza. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Pengungkapan Media terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Perusahaan Penghasil Bahan Baku yang terdaftar di BEI Periode 2010-2012)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ruthinaya, Alifa. 2012. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSSR) pada Perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Periode 2007-2011*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Universitas Negeri Surabaya
- Sakina, Diajeng Ade, Nining Ika Wahyuni dan Imam Mas'ud. 2014. *Narsisme dalam Pelaporan Corporate Social Responsibility: Analisis Semiotik atas Sustainability Reporting PT. Kalitim Prima Coal dan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)*. e- Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol. 1, No. 1, Hal. 32-41.
- Sari, Mega Putri Y. 2013. *Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability report*. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sawarjuwono, Tjiptohadi. 2005. *Bahasa Akuntansi Dalam Praktik: Sebuah Critical Accounting Study*. TEMA (Telaah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). Vol. 6, No. 2, Hal. 34-47.
- Sayekti, Yosefa dan Ludovicus Sensi Wondabio. 2007. *Pengaruh CSR Disclosure terhadap Earning Response Coefficient (Suatu Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sharafina, Annissa dan Esther Marietty. 2014. *Corporate Social Responsibility and Sustainability Reporting*. Makalah Tidak Dipublikasikan. Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
- Shodiqurrosyad, Ahmad. 2014. *Peran Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Analisis Kasus Tahun 2000-2012)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

- Sobur, Alex. 2005. *Peliputan Isu Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Mediator. Vol. 6, No.2, Hal. 19-31.
- Soelistyoningrum, Jenia Nur. 2011. *Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soendari, Tjutju. 2016. *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*. Jurusan PLB, Fakultas Ilmu Pendidikan, UPI.
- Sofyani, Hafiez dan Anggar Setiawan. 2012. *Perbankan Syariah dan Tanggungjawab sosial: Sebuah Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Islamic Social Reporting Index dan Global Reporting Initiative Index*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. *Memahami Metode Kualitatif*. Makara, Sosial Humaniora. Vol. 9, No. 2, Hal. 57-65.
- Sopannah. 2011. *Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebuah Studi Interpretif*. Disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Suartana, I Wayan. 2010. *Akuntansi Lingkungan dan Tripple Bottom Line Accounting: Paradigma Baru Akuntansi Bernilai Tambah*. Jurnal Bumi Lestari. Vol. 10, No. 1, Hal. 105 - 112.
- Suryono, H. dan A. Prastiwi. 2011. *Pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, aktivitas, ukuran perusahaan, dan corporate governance terhadap praktik pengungkapan sustainability report*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Susanto, Yohanes Kurniawan dan Josua Tarigan. 2013. *Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Profitabilitas Perusahaan*. Business Accounting Review. Vol. 1.
- Susilowati, Kartika Dewi Sri. 2013. *Analisis Komparasi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Islamic Social Reporting (ISR) Index dan Global Reporting Initiative (GRI) Index*. Proceeding Call for Papers dan Seminar Nasional, Hal. 19-38.
- Syahnaz, Melisa. 2013. *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

- Thistlethwaite, Jason and Melissa Menzies. 2016. *Assessing the Governance Practices of Sustainability Reporting*. Policy Brief No. 71. Hal. 1-8.
- Tooley, S. and Guthrie J. 2007. *Reporting performance by New Zealand secondary schools: an analysis of disclosures*. Financial Accountability and Management. Vol. 23, No. 4, Hal. 351–374.
- Triyuwono, Iwan. 2007. *Mengangkat “Sing Liyan” untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah*. Disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, UNHAS Makassar.
- Turcu, Radu-Dan. 2015. *Sustainability Reporting – An Analysis of the Worldwide Diffusion*. SEA - Practical Application of Science. Volume III, Issue 1 (7), Hal. 557-564.
- Utama. 2006. *Praktek Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia*. Disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi III.
- Wibowo, Imam dan Sekar Akrom Faradiza. 2014. *Dampak Pengungkapan Sustainability report terhadap Kinerja Keuangan dan Pasar Perusahaan*. Disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVII, Universitas Mataram, Lombok.
- Widianto, Hari Suryono. 2011. *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report (Studi Pada Perusahaan Perusahaan yang Listed (Go-Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2009)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widiyastuti, Yuni dan Anis Chariri. 2012. *Evolusi dalam Pelaporan Keuangan Perusahaan: Analisis Semiotik atas Integrated Reporting PT United Tractors Tbk*. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widiawati, Septi. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting Perusahaan-perusahaan yang terdapat pada Daftar Efek Syariah Tahun 2009-2011*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1
Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks ISR

No	Item ISR	Hasil Scoring Perusahaan						
		BMI	BSM	BNIS	UNVR	INDF	KLBF	
A. KEUANGAN DAN INVESTASI								
1.	Riba							
	Aktivitas yang mengandung riba. Contoh : bunga (beban bunga dan pendapatan bunga) dan pendapatan non halal lainnya.							
	1.1	Identifikasi jenis aktivitas yang mengandung riba	4	2	2	0	4	4
	1.2	Persentase kontribusi dari profit	0	0	0	0	0	0
2.	Gharar							
	Aktivitas yang mengandung <i>Gharar</i> (ketidakjelasan atau spekulasi), termasuk di dalamnya unsur judi, <i>hedging</i> , <i>future on delivery trading/margin trading</i> , <i>arbitrage baikspot</i> maupun <i>forward</i> , <i>short selling</i> , <i>pure swap</i> , <i>warrant</i> , dan sebagainya.							
	2.1	Identifikasi aktivitas yang mengandung <i>gharar</i>	0	0	0	0	2	0
	2.2	Persentase kontribusi dari profit	0	0	0	0	0	0
3.	Zakat							
	Adanya pendistribusian zakat oleh pihak perusahaan/bank, baik itu dari konsumen/nasabah maupun dari perusahaan itu sendiri.							
	3.1	Metode perhitungan yang digunakan	0	0	0	0	0	0
	3.2	Sumber zakat	4	4	4	0	0	0
	3.3	Jumlah zakat	4	4	4	0	0	0
	3.4	Penyaluran (penerima) zakat	4	4	4	0	0	0
3.5	Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat	1	0	0	0	0	0	
4.	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent clients</i> (klien yang tidak sanggup membayar)							
	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan pengungkapan/penghapusan piutang tak tertagih.							
	4.1	Identifikasi kebijakan untuk menanggulangi <i>insolvent clients</i>	4	2	4	0	2	4
	4.2	Besarnya biaya tambahan yang dikenakan sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran	0	0	0	0	0	0

Lanjutan Lampiran 1
Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks ISR

	4.3	Opini Dewan Pengawas syariah terkait dengan izin mengenai biaya tambahan yang dikenakan sebagai konsekuensi keterlambatan pembayaran oleh <i>insolvent clients</i>	0	0	0	0	0	0
5.	Current Value Balance Sheet (nilai neraca saat ini)		2	2	2	0	0	2
6.	Value Added Statements/Pernyataan nilai tambah perusahaan (bagi masyarakat)		2	2	1	2	1	2
7.	Kegiatan Investasi (secara umum)		4	0	4	0	4	4
8.	Proyek Pembiayaan (secara umum)		4	4	4	0	2	2
Jumlah			33	24	29	2	15	18
B. PRODUK DAN JASA								
1.	Green product							
	Produk atau kegiatan operasi ramah lingkungan. Dalam konteks perbankan, bisnis hijau dipersepsikan dengan penyaluran kredit yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah kredit hijau (<i>green lending</i>). Kredit hijau dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat.		0	4	1	3	3	3
2.	Status kehalalan suatu produk							
	Sertifikat kehalalan produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernyataan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa baru, dan sebagainya.		4	0	3	0	4	0
3.	Jenis dan definisi setiap produk		4	2	4	2	4	2
4.	Kualitas dan keamanan produk							
	Kualitas produk dari awal, misalnya bahannya terbuat dari apa, bagaimana proses pembuatannya, dijual dengan harga berapa, bagaimana kekuatan produk di pasaran, <i>style</i> , ada tidaknya layanan purna jual (garansi, <i>service</i> berkala gratis). Pada bank, produk perbankan bisa berupa penjelasan akurat tentang produk mereka.		3	2	4	4	4	4
5.	Pengembangan produk		4	4	4	4	4	4
6.	Pelayanan atas keluhan konsumen/nasabah							
	Keluhan/pengaduan dapat pula berupa kejadian yang timbul karena ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku.							
	6.1	Bentuk dan total keluhan	3	4	4	3	0	4
	6.2	Penanganan/penyelesaian keluhan tersebut	4	4	4	4	0	4
	6.3	Denda baik berupa uang maupun non-uang terkait pelanggaran peraturan	0	0	0	0	0	0
	6.4	Peningkatan pelayanan	4	4	4	3	4	4
6.5	Survei atas kepuasan pelanggan	0	1	4	4	0	0	
Jumlah			26	25	32	27	23	25

Lanjutan Lampiran 1
Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks ISR

C. TENAGA KERJA/KARYAWAN								
1.	Karakteristik pekerjaan							
	1.1	Jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan kriteria tertentu	4	4	4	4	4	
	1.2	Jumlah jam kerja per hari	0	0	0	0	0	
	1.3	Hari libur dan cuti	0	0	1	1	2	0
	1.4	Kebijakan gaji dan tunjangan (kebijakan remunerasi)	3	4	3	2	2	2
2.	Pendidikan dan pelatihan karyawan							
	Program-program untuk peningkatan kemampuan dan pembelajaran jangka panjang yang mendukung mereka dalam mengerjakan tugas-tugas pekerjaan mereka							
	2.1	Program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan	4	4	4	4	3	4
2.2	Persentase karyawan yang menerima pengembangan karir	2	3	2	3	2	2	
3.	Persamaan kesempatan							
	Kesempatan/peleluasan yang sama bagi seluruh karyawan yang dapat berupa kesetaraan hak antara pria dan wanita.		0	3	4	4	3	4
4.	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi		4	4	4	4	2	1
5.	Keterlibatan karyawan							
	Keterlibatan karyawan dalam suatu pekerjaan, misalnya dalam diskusi manajemen dan pengambilan keputusan.		4	3	1	2	2	2
6.	Kesehatan dan keselamatan kerja		4	4	4	4	4	4
7.	Lingkungan/suasana kerja		1	4	4	4	1	4
8.	Perekrutan khusus							
	Karyawan dari kelompok khusus (misalnya, cacat fisik, mantan pengguna/pecandu narkoba atau mantan narapidana)		0	0	0	0	0	0
9.	Pelaksanaan kegiatan ibadah bersama-sama (sholat berjamaah) antara karyawan tingkat atas (pejabat tinggi) dengan karyawan tingkat menengah dan tingkat bawah		2	0	0	0	0	0
10.	Pemberian izin bagi karyawan Muslim shalat wajib pada waktunya dan puasa di bulan Ramadhan pada hari kerja		0	0	0	0	0	0
11.	Tempat beribadah yang memadai bagi karyawan		0	0	0	0	0	0
12.	Kesejahteraan Karyawan		4	4	4	4	4	3
Jumlah			32	37	35	36	29	30
D. SOSIAL/MASYARAKAT								
1.	Pemberian sedekah/donasi (jumlah dan penyalurannya)		4	4	4	3	2	3
2.	Wakaf (jenis dan penyalurannya)		0	0	4	0	0	0

Lanjutan Lampiran 1
Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks ISR

3.	<i>Qardhul Hasan</i> /pinjaman untuk kebajikan yang sifatnya tidak memberi keuntungan finansial (jumlah dan penyalurannya)	4	0	4	0	0	0
4.	Sukarelawan berupa zakat atau sumbangan dari kalangan karyawan atau nasabah	4	4	4	0	0	0
5.	Program pendidikan (beasiswa, pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya)	4	4	3	3	4	3
6.	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (termasuk magang atau praktik kerja lapangan)	2	3	3	0	4	0
7.	Pengembangan generasi muda	0	2	0	2	2	3
8.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin (pemberdayaan ekonomi)	3	3	3	4	4	0
9.	Kepedulian terhadap anak-anak (yatim piatu)	4	0	4	3	3	2
10.	Kegiatan amal atau sosial lainnya (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan massal, pembangunan atau renovasi Masjid/infrastruktur, mudik bareng, dan sebagainya)	4	4	4	4	4	4
11.	Mensponsori/menyokong acara/kegiatan kesehatan masyarakat, proyek rekreasi, olahraga, <i>event</i> budaya, pendidikan, keagamaan dan lain-lain	4	4	4	4	4	4
Jumlah		33	28	37	23	27	19
E. LINGKUNGAN							
1.	Kampanye <i>go green</i>	1	2	1	3	1	2
2.	Konservasi lingkungan hidup	3	3	2	4	4	2
3.	Perlindungan terhadap flora dan fauna liar/terancam punah, seperti tidak membahayakan/mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna	0	0	0	0	2	0
4.	Kegiatan mengurangi pencemaran lingkungan/efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah/air limbah, pengelolaan air bersih, dan sebagainya)	2	3	2	4	4	4
5.	Pendidikan mengenai lingkungan hidup	0	1	0	3	2	3
6.	Penghargaan/sertifikasi dibidang Lingkungan Hidup	0	0	0	4	4	0
7.	Hubungan produk terhadap lingkungan (produk lingkungan/proses terkait)	0	1	0	4	4	4
8.	Perbaikan dan pembuatan sarana umum	4	4	4	3	3	2
9.	Audit Lingkungan atau pernyataan verifikasi dari pihak independen/pemerintahan						
	Berupa kegiatan pengelolaan lingkungan atau pelaksanaan PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) yang telah diaudit	0	0	0	3	3	0
10.	Sistem/kebijakan manajemen lingkungan	0	0	0	4	4	4
Jumlah		10	14	9	32	31	21

Lanjutan Lampiran 1
Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks ISR

F. TATA KELOLA PERUSAHAAN								
1.	Status kepatuhan terhadap syariah							
	1.1	Pernyataan/opini dari Dewan Pengawas Syariah	4	0	4	0	0	0
	1.2	Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa (kegiatan operasional)	4	3	4	0	0	0
	1.3	Penerapan fungsi audit intern dan ekstern	4	3	4	2	4	4
	1.4	Penerapan fungsi kepatuhan	4	4	4	3	3	4
2.	Struktur kepemilikan saham (jumlah pemegang saham (Muslim) dan kepemilikan sahamnya)		4	3	3	2	3	3
3.	Profil dan strategi organisasi		4	4	4	4	4	4
4.	Struktur organisasi							
	4.1	Rincian nama dan profil Dewan Pengawas Syariah	4	4	4	0	0	0
	4.2	Kinerja DPS (rincian pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	4	2	4	0	0	0
	4.3	Remunerasi DPS	4	0	4	0	0	0
	4.4	Rincian nama dan profil dewan komisaris	4	4	4	0	4	4
	4.5	Kinerja komisaris (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	4	2	4	0	4	4
	4.6	Remunerasi dewan komisaris	4	0	4	0	2	2
	4.7	Rincian nama dan profil dewan direksi/manajemen	4	4	4	0	4	4
	4.8	Kinerja direksi (pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat)	4	2	4	0	4	4
	4.9	Remunerasi dewan direksi	4	0	4	0	2	2
	4.10	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	4	4	4	1	4	4
5.	Batas maksimum penyaluran dana		4	0	4	0	0	0
6.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan		4	3	4	3	4	4
7.	Pendapatan dan penggunaan dana non-halal		4	4	4	0	2	2
8.	Etika perusahaan		4	4	4	4	4	4
9.	Pernyataan kegiatan dilarang							
	Pernyataan kegiatan dilarang, seperti praktek monopoli, penimbunan barang yang dibutuhkan, manipulasi harga, praktik penipuan bisnis, perjudian, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan sebagainya.							
	9.1	Pengungkapan melakukan kegiatan dilarang atau tidak	0	0	0	0	0	0
	9.2	Kebijakan anti pencucian uang	3	4	4	0	0	0
	9.3	Kebijakan anti penyaluran dana kegiatan terorisme	3	4	4	0	0	0

Lanjutan Lampiran 1
Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks ISR

10.	Perkara hukum							
	10.1	Pengungkapan adanya perkara hukum atau tidak	4	0	4	2	3	2
	10.2	Penanganan benturan kepentingan	2	1	2	0	0	2
11.	Kebijakan anti korupsi (kode etik, whistleblowing system dan sebagainya)		4	4	4	4	2	4
Jumlah			96	63	97	25	53	57
TOTAL			230	191	239	145	178	170
%			65%	54%	68%	41%	51%	48%

Sumber: Data diolah peneliti

Lampiran 2

Hasil Skoring Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per Kategori Indeks ISR

Perusahaan	Investasi dan Keuangan	Produk dan Jasa	Tenaga Kerja	Sosial	Lingkungan	Tata Kelola Perusahaan	Total
BMI	33 (55%)	26 (65%)	32 (50%)	33 (75%)	10 (25%)	96 (92%)	230 (65%)
BSM	24 (40%)	25 (63%)	37 (58%)	28 (64%)	14 (35%)	63 (61%)	191 (54%)
BNIS	29 (48%)	32 (80%)	35 (55%)	37 (84%)	9 (23%)	97 (93%)	239 (68%)
UNVR	2 (3%)	27 (68%)	36 (56%)	23 (52%)	32 (80%)	25 (24%)	145 (41%)
INDF	15 (25%)	23 (58%)	29 (45%)	27 (61%)	31 (78%)	53 (51%)	178 (51%)
KLBF	18 (30%)	25 (63%)	30 (47%)	19 (43%)	21 (53%)	57 (55%)	170 (48%)

Sumber: Data diolah peneliti

Lampiran 3

Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks GRI

ITEM PER KATEGORI INDEKS GRI-G4		Perbankan Syariah			Perusahaan dalam JII		
		BMI	BSM	BNIS	UNVR	INDF	KLBF
KATEGORI EKONOMI							
Kinerja Ekonomi							
EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	4	4	4	0	4	4
EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim	0	0	0	0	4	0
EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti	4	4	4	1	4	4
EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	0	0	0	0	0	0
Keberadaan Pasar							
EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan	0	0	0	0	0	0
EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan	0	0	0	0	0	0
Dampak Ekonomi Tidak Langsung							
EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan	4	4	4	4	4	4
EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak	4	3	4	4	4	3
Praktek Pengadaan							
EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan	3	0	2	4	2	2
Jumlah		19	15	18	13	22	17
KATEGORI LINGKUNGAN							
Bahan							
EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume	0	0	0	0	0	0
EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang	0	1	0	2	1	1
Energi							
EN3	Konsumsi energi dalam organisasi	0	0	0	3	0	2
EN4	Konsumsi energi di luar organisasi	0	0	0	0	0	0
EN5	Intensitas Energi	0	0	0	3	0	0
EN6	Pengurangan konsumsi energi	0	1	1	4	2	4
Air							
EN7	Pengurangan kebutuhan energi pada rodud dan jasa	0	0	0	4	2	2
EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber	0	0	0	4	0	0
EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air	0	0	0	2	0	0
EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali	0	0	0	4	0	0

Lanjutan Lampiran 3
Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks GRI

Keanekaragaman Hayati							
EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung	0	0	0	0	2	0
EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung	0	0	0	0	0	0
EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan	0	0	0	0	2	0
EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan	0	0	0	0	0	0
Emisi							
EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)	0	0	0	4	1	2
EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)	0	0	0	2	0	0
EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)	0	0	0	0	0	0
EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	0	0	0	4	0	0
EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)	0	0	0	4	1	2
EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)	0	0	0	2	0	0
EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya	0	0	0	3	0	0
Efluen dan Limbah							
EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan	0	0	0	4	0	2
EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan	0	0	0	4	2	2
EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan	0	0	0	0	0	0
EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional	0	0	0	0	0	0
EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi	0	0	0	0	0	0
Produk dan Jasa							
EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa	0	0	0	4	2	2
EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori	0	0	0	2	1	2

Lanjutan Lampiran 3
Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks GRI

Kepatuhan							
EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan	0	0	0	0	0	0
Transportasi							
EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja	0	0	0	2	0	0
Lain-lain							
EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis	0	0	4	0	0	0
Asesmen Pemasok Atas Lingkungan							
EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan	0	0	1	0	0	0
EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil	0	0	0	2	0	0
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan							
EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	2	6	63	16	21
KATEGORI SOSIAL							
SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA							
Kepegawaian							
LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah	3	3	3	2	3	2
LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan	4	4	3	3	3	2
LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender	0	0	0	0	1	0
Hubungan Industrial							
LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama	2	0	0	4	0	0
Kesehatan dan Keselamatan Kerja							
LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja	2	0	0	4	0	2
LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender	0	0	0	4	0	0

Lanjutan Lampiran 3
Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks GRI

LA7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka	0	0	0	0	0	0
LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja	0	2	3	3	2	2
Pelatihan dan Pendidikan							
LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan	3	3	3	3	1	3
LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberkelanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti	3	4	4	2	4	4
LA11	Persentase karyawan yang menerima reviu kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan	2	0	3	3	3	3
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang							
LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya	4	3	4	4	4	4
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki							
LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan	0	0	0	4	0	0
Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan							
LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan	0	0	0	2	0	0
LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	0	0
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan							
LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diadakan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi	4	4	4	0	0	0
Jumlah		27	23	27	38	21	22
SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA							
Investasi							
HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan Aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih	0	0	0	0	0	0

Lanjutan Lampiran 3
Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks GRI

Non-Diskriminasi							
HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil	0	0	0	0	0	0
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama							
HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut	0	2	0	0	0	0
Pekerja Anak							
HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif	0	0	0	0	0	0
Pekerja Paksa Atau Wajib Kerja							
HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja	0	0	0	0	0	0
Praktik Pengamanan							
HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi	0	0	0	0	0	0
Hak Adat							
HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	0	0
Asesmen							
HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak asasi manusia	0	0	0	0	0	0
Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia							
HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia	0	0	0	1	0	0
HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	0	0
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia							
HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	2	0	1	0	0

Lanjutan Lampiran 3
Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks GRI

SUB-KATEGORI: MASYARAKAT							
Masyarakat Lokal							
SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan	3	3	3	4	4	3
SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal	0	0	0	0	0	0
Anti-Korupsi							
SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi	2	2	2	2	0	2
SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi	2	2	2	2	0	2
SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	4	0	3	0	0	0
Kebijakan Publik							
SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat	0	0	0	2	0	0
Anti Persaingan							
SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya	0	0	0	0	0	0
Kepatuhan							
SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan	4	0	3	0	0	4
Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat							
SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat	0	0	0	0	0	0
SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil	0	0	0	0	0	0
Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat							
SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi	0	0	0	0	0	0
Jumlah		15	7	13	10	4	11
SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK							
Kesehatan Keselamatan Pelanggan							
PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan	4	4	4	4	4	4
PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil	4	0	0	0	0	4

Lanjutan Lampiran 3
Daftar Item dan Hasil Skoring per Item Indeks GRI

Pelabelan Produk dan Jasa							
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis	2	2	3	4	4	4
PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil	3	0	0	0	0	0
PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan	0	0	4	4	0	0
Komunikasi Pemasaran							
PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan	0	0	0	0	0	0
PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil	0	0	0	0	0	0
Privasi Pelanggan							
PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	4	4	3	4	0	0
Kepatuhan							
PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa	4	0	0	0	0	0
Jumlah		21	10	14	16	8	12
Total Skor		82	59	78	141	71	83
%		23%	16%	21%	39%	20%	23%

Sumber: Data diolah peneliti

Lampiran 4 Hasil Skoring Perbankan Syariah dan Perusahaan dalam JII per Kategori Indeks GRI

Perusahaan	Ekonomi	Lingkungan	Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja	HAM	Masyarakat	Tanggungjawab atas Produk	Total
BMI	19 (53%)	0 (0%)	27 (42%)	0 (0%)	10 (25%)	15 (34%)	82 (23%)
BSM	15 (42%)	2 (1%)	23 (36%)	2 (4%)	14 (35%)	7 (16%)	59 (16%)
BNIS	18 (50%)	6 (4%)	27 (42%)	0 (0%)	9 (23%)	13 (30%)	78 (21%)
UNVR	13 (36%)	63 (46%)	38 (59%)	1 (2%)	32 (80%)	10 (23%)	141 (39%)
INDF	22 (61%)	16 (12%)	21 (33%)	0 (0%)	31 (78%)	4 (9%)	71 (20%)
KLBF	17 (47%)	21 (15%)	22 (34%)	0 (0%)	21 (53%)	11 (25%)	83 (23%)

Sumber: Data diolah peneliti

Lampiran 5

MANUSKRIP

Penelitian ini didasari adanya fenomena pada pengungkapan aktivitas CSR dalam *sustainability reporting* pada entitas syariah khususnya perbankan syariah yang masih berpedoman pada GRI, padahal sebagai entitas syariah, perbankan syariah seharusnya berpedoman pada ISR yang lebih sesuai untuk entitas syariah. Selain itu, masih jarangnya dilakukan penelitian dengan membandingkan pengungkapan CSR menggunakan Indeks ISR dan Indeks GRI di perbankan syariah, serta belum adanya yang membandingkan kedua Indeks tersebut pada perbankan syariah dan non perbankan atau pasar modal syariah, yang dalam hal ini adalah JII, menjadi motivasi untuk melakukan penelitian ini.

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode analisis isi. Dalam hal ini, pemrosesan informasi yang menyangkut isi-isi dalam *sustainability reporting* dianalisis dengan teknik *scoring* terhadap setiap item yang diungkapkan berdasarkan pada item-item yang ada di dalam GRI-G4 dan ISR dengan menggunakan skala 0 sampai 4, yang kemudian hasilnya diinterpretasi dan dibandingkan antar perusahaan objek. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah. Adapun penggunaan skala dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kualitas *sustainability reporting* antar perusahaan objek.

Pada *sustainability reporting*, jika ditemukan item-item berupa kata, kalimat, gambar dan sebagainya yang dapat menjadi pernyataan bukti bahwa perusahaan sudah berkomitmen menjalankan kegiatan CSR dan bilamana

dicantumkan lebih banyak, maka hal ini akan menjadi penilaian yang lebih tinggi bagi perusahaan tersebut. Adapun tipe pernyataan bukti yang dipakai untuk melihat bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan sudah berkomitmen menjalankan kegiatan CSR, meliputi beberapa kategori berikut:

- Kategori 1, merupakan pernyataan moneter yang ditunjukkan melalui pernyataan jumlah uang yang dialokasikan untuk kegiatan CSR.
- Kategori 2, merupakan pernyataan kuantitatif nonmoneter yang ditunjukkan melalui pernyataan yang memuat angka-angka selain menyangkut jumlah uang, seperti jumlah pelajar/mahasiswa penerima beasiswa, jumlah guru yang mendapatkan pelatihan, jumlah UKM yang telah dibina perusahaan dan sebagainya.
- Kategori 3, merupakan pernyataan deklaratif yang ditunjukkan melalui pernyataan bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas CSR namun tidak memuat angka-angka. Misalnya, membangun sejumlah sekolah, tempat ibadah dan fasilitas publik lainnya, mendukung kampanye pelestarian hutan, menyelenggarakan pengobatan gratis dan sebagainya.
- Kategori kombinasi, merupakan gabungan pilihan kategori yang ada, bisa berupa gabungan dua kategori atau gabungan tiga kategori.
- Tidak jelas, artinya perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti bahwa mereka telah melaksanakan praktik CSR.

Lampiran 6

RIWAYAT HIDUP



Penulis **HASNITA**, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Oktober 1995. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara, buah hati dari ayahanda Hamka dan Ibunda Nuraeni. Penulis memiliki 2 saudara laki-laki yang bernama Hasrun dan Fadli serta 2 saudara perempuan bernama Wahyuni dan Fajrianti. Penulis memulai pendidikan di TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal VI Cabang Tello Baru, Makassar pada tahun 2000 dan selesai di tahun yang sama. Setelah menamatkan TK, penulis melanjutkan pendidikan di SD Inpres Kassi, Makassar dan selesai pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP 17 Makassar dan selesai pada tahun 2009. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA 10 Makassar selama tiga tahun dan selesai pada tahun 2012. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui Jalur Masuk Ujian Masuk Mandiri (UMM) dan lulus pada program studi strata satu (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menempuh pendidikan penulis mengikuti organisasi-organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi periode 2012-2013, *Accounting Study Club* "Al-Mizan", *Study Club Al-Ikhtishodiyah* dan Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM).